

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DRAFT

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD

PEMERINTAH
KABUPATEN
LANGKAT

2018



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LANGKAT

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Buku Laporan Akhir ini merupakan laporan tahap akhir dari kegiatan "Penyusunan Draft Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD ". Materi yang disampaikan dalam Laporan Akhir ini adalah hasil pengkajian pembangunan berkelanjutan Kabupaten Langkat 2019-2024. Hasil penyusunan Laporan Akhir ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019-2024.

Dalam proses kegiatan ini, tentunya kami mendapatkan banyak masukan dari para pihak terkait. Besar harapan kami agar laporan ini bisa diterima, saran dan kritik untuk perbaikan sangat kami harapkan. Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, dan semoga buku Laporan Akhir ini memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan, khususnya untuk kawasan kajian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam penyusunan RPJMD Kab. Langkat tahun 2019-2024 perlu dilakukan KLHS sebagai amanah dari UU No.39 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses penyusunan KLHS mengacu kepada Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, di mana pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD; 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; 3) Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan 4) Penjaminan Kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

KLHS perlu dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS sendiri merupakan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip terpadu, berkelanjutan, fokus, transparan, akuntabel, partisipatif, dan interaktif.

Berdasarkan PP No.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk menyelaraskan SDGs dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang yang ada di Nasional dan daerah. Oleh karena itu, KLHS RPJMD dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Langkat karena isi KLHS yang selaras dengan tujuan-tujuan yang ingin diangkat oleh SDGs.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Langkat dimaksudkan sebagai bagian persiapan penyusunan dan bahan perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Selain itu, KLHS RPJMD bertujuan untuk tersusunnya pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Langkat 2014-2019 dan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Langkat 2019-2024.

Dalam proses pengkajian pembangunan berkelanjutan ini pada tahap pertama dilakukan penapisan indikator TPB. Dari proses penapisan indikator TPB, dari 17 tujuan SDGs didapatkan total 156 dengan rincian sebagai berikut: 1) Tujuan 1, 16 indikator terpilih; 2) Tujuan 2, 11 indikator terpilih; 3) Tujuan 3, 19 indikator terpilih; 4) Tujuan 4, 8 indikator terpilih; 5) Tujuan 5, 8 indikator terpilih; 6) Tujuan 6, 19 indikator terpilih; 7) Tujuan 7, tidak ada indikator terpilih; 8) Tujuan 8, 11 indikator terpilih; 9) Tujuan 9, 8 indikator terpilih; 10) Tujuan 10, 8 indikator terpilih; 11) Tujuan 11, 8 indikator terpilih; 12) Tujuan 12, 4 indikator terpilih; 13) Tujuan 13, 2 indikator terpilih; 14) Tujuan 14, tidak ada indikator terpilih; 15) Tujuan 15, 3 indikator terpilih; 16) Tujuan 16, 18 indikator terpilih; dan 17) Tujuan 17, 13 indikator terpilih.

Setelah melakukan penapisan indikator TPB, pada langkah kedua dilakukan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan indikator per tujuan yang memiliki dampak langsung terhadap jasa ekosistem. Dalam tujuan 1 dan tujuan 13 didapatkan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana alam yang tidak menunjang pencapaian indikator. Kemudian tujuan 2 didapatkan jasa ekosistem penyediaan pangan yang

tidak menunjang pencapaian indikator. Untuk Tujuan 6, jasa ekosistem penyediaan air, pengaturan pemurnian air, dan pengaturan iklim dinilai telah memenuhi untuk mencapai indikator, sedangkan tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan bencana alam, dan pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah belum memenuhi untuk mencapai indikator. Namun untuk tujuan 9, terdapat 2 indikator yang terkait dengan jasa ekosistem, akan tetapi indikator tersebut tidak terpilih pada saat penapisan, sehingga tidak ada jasa ekosistem yang dilihat lebih lanjut. Tujuan 11 didapatkan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana alam, pemeliharaan kualitas udara, dan pengaturan pengelolaan dan penguraian limbah dinilai belum dapat memenuhi untuk mencapai indikator. Dalam tujuan 12, jasa ekosistem tidak mencapai kriteria indikator. Dan, untuk tujuan 15, pengaturan pemurnian air, pengaturan iklim dan jasa ekosistem sumber daya genetik(biodiversity) mendukung pencapaian indikator.

Dengan demikian, rekapitulasi pemilihan indikator memperoleh total 156 indikator terpilih -34 diantaranya dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup- dari total 473 indikator pada Permendagri No. 7 tahun 2018.

Setelah proses penapisan dan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pada langkah ketiga indikator-indikator yang terpilih dikelompokkan ke dalam indikator yang terpengaruhi DDDTLH dan tidak terpengaruhi DDTHLH, proyeksi pemenuhan dan pencapaian sasaran, serta ketersediaan data. Dari pengelompokan tersebut disusun skenario indikator yang tidak terpengaruhi DDDTLH sebanyak 3 buah (Indikator TPB mencapai sasaran, indikator TPB tidak mencapai sasaran, dan indikator TPB perlu pengumpulan data) dan skenario indikator yang terpengaruhi DDDTLH sebanyak 5 buah (Indikator TPB dipengaruhi DDDTLH dan mencapai sasaran, indikator TPB dipengaruhi DDDTLH tidak mencapai sasaran, Indikator TPB tidak mencapai DDDTLH dan mencapai sasaran, indikator TPB tidak mencapai DDDTLH tidak mencapai sasaran dan indikator TPB perlu pengumpulan data).

Pada tahap kelima sekaligus terakhir dari hasil analisis capaian indikator-indikator TPB sebagaimana yang telah dijelaskan dalam empat tahap sebelumnya dirumuskan isu strategis dan permasalahan dari 45 indikator terpilih yang tidak mencapai target nasional. Isu strategis dan permasalahan tersebut kemudian dibagi ke beberapa urusan sesuai dengan urusan konkuren pemerintah daerah. Urusan-urusan tersebut antara lain: (1) administrasi kependudukan dan catatan sipil, (2) kesehatan, (3) ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, (4) lingkungan hidup, (5) pangan, (6) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (7) pendidikan, (8) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (9) sosial, (10) tenaga kerja, (11) perekonomian, dan (12) tata kelola pemerintahan.

Isu strategis pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mencakup pencatatan kelahiran anak melalui dokumen akte kelahiran; pada urusan kesehatan mencakup prevalensi gizi balita, anemia pada hamil, dan rendahnya persentase bayi usia kurang dari enam bulan yang mendapatkan ASI eksklusif; pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencakup tinggi indeks risiko bencana daerah, belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan dan tingginya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir; pada urusan lingkungan hidup mencakup proporsi tutupan lahan yang menurun serta belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dan rendahnya pengolahan sampah dinilai dari rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; dan pada urusan pangan mencakup

rendahnya kualitas konsumsi pangan dan tingkat konsumsi ikan serta penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak isu strategis dan permasalahannya mencakup proporsi rendahnya peningkatan persentase keterwakilan perempuan di DPRD dan Lembaga eksekutif eselon II dan rendahnya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif; pada urusan pendidikan mencakup rendahnya tingkatan partisipasi belajar 9 tahun dan rendahnya partisipasi dalam pendidikan tahap lanjutan; pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencakup rendahnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak aman dan berkelanjutan; pada urusan sosial mencakup tingginya jumlah penduduk miskin; pada urusan tenaga kerja mencakup rendahnya presentase dan proporsi tenaga kerja pada sektor formal dan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur; pada urusan perekonomian mencakup dalam implementasinya akan bersifat lintas sektoral dapat ebrkaitan dengan urusan-urusan seperti pangan, koperasi dan UMKM, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, ESDM, perdagangan, perindustrian; serta pada Tata Kelola Pemerintahan, mencakup rendahnya pendapatan pemerintah dan tidak seimbangnya anggaran domestik yang didanai oleh pajak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN	2
1.2.1 Maksud	2
1.2.2 Tujuan	2
1.2.3 Sasaran	2
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 RUANG LINGKUP	3
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah	3
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan	3
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN	4
2.1 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	4
2.2 TINJAUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA	6
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara	6
2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara	7
2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara	8
2.3 TINJAUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT	10
2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat	10
2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Langkat	10
2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat	12

BAB 3	KONDISI UMUM DAERAH	16
3.1	KONDISI GEOGRAFIS.....	16
3.1.1	Topografi.....	16
3.1.2	Sumber Daya Air.....	16
3.1.3	Sumber Daya Tanah	17
3.1.4	Penggunaan Lahan.....	19
3.1.5	Kawasan Rawan Bencana	20
3.2	KONDISI DEMOGRAFIS.....	21
3.3	KARAKTERISTIK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT	24
3.3.1	PDRB	24
3.3.2	Kemiskinan.....	25
3.4	ASPEK LAYANAN UMUM.....	27
3.4.1	Sarana Pendidikan.....	27
3.4.2	Sarana Kesehatan	28
3.5	ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	28
3.5.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	28
3.5.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	29
3.5.3	Iklim Berinvestasi	30
3.5.4	Sumber Daya Manusia.....	30
3.6	KONDISI KEUANGAN DAERAH.....	32
3.6.1	Pendapatan Daerah	32
3.6.2	Belanja Daerah	35
3.6.3	Pembiayaan Daerah	35
BAB 4	PENGKAJIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	38
4.1	PENAPISAN INDIKATOR TPB.....	38
4.1.1	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	38
4.1.2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	39
4.1.3	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	40
4.1.4	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	41
4.1.5	Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	42
4.1.6	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua.....	43

4.1.7	Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua.....	45
4.1.8	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	45
4.1.9	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	46
4.1.10	Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	47
4.1.11	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	48
4.1.12	Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	49
4.1.13	Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	50
4.1.14	Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	50
4.1.15	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	50
4.1.16	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	51
4.1.17	Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	52
4.2	ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN	54
4.3	ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP	55
4.3.1	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	55
4.3.2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	56
4.3.3	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua.....	56
4.3.4	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	58
4.3.5	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	58
4.3.6	Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	58
4.3.7	Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	60
4.3.8	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	60
4.4	REKAPITULASI PENAPISAN INDIKATOR TPB	62
4.5	ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB	62
4.5.1	Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	62
4.5.2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	64

4.5.3	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	65
4.5.4	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	67
4.5.5	Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	67
4.5.6	Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua.....	68
4.5.7	Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua	69
4.5.8	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	71
4.5.9	Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara	71
4.5.10	Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	72
4.5.11	Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.....	73
4.5.12	Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	73
4.5.13	Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	74
4.5.14	Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	75
4.5.15	Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	76
BAB 5	PENYUSUNAN ALTERNATIF PROYEKSI.....	77
5.1	PENGGOLONGAN SKENARIO	77
5.2	SKENARIO INDIKATOR TIDAK DIPENGARUHI DDDTLH	78
5.2.1	Skenario 1.1: Indikator TPB Mencapai Sasaran	79
5.2.2	Skenario 1.2: Indikator TPB Tidak Mencapai Sasaran	81
5.2.3	Skenario 1.3: Indikator TPB Perlu Pengumpulan Data	83
5.3	SKENARIO INDIKATOR DIPENGARUHI DDDTLH	86
5.3.1	Skenario 2.1: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Mencapai Sasaran	87
5.3.2	Skenario 2.2: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Tidak Mencapai Sasaran	87
5.3.3	Skenario 2.3: Indikator TPB Tidak Mencapai DDDTLH dan Mencapai Sasaran	88
5.3.4	Skenario 2.4: Indikator TPB Tidak Mencapai DDDTLH dan Tidak Mencapai Sasaran	88
5.3.5	Skenario 2.5: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Perlu Pengumpulan Data	89

BAB 6	PERUMUSAN ISU STRATEGIS.....	91
6.1	RUMUSAN ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN	91
6.1.1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	93
6.1.2	Urusan Kesehatan	93
6.1.3	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	93
6.1.4	Urusan Lingkungan Hidup.....	93
6.1.5	Urusan Pangan	94
6.1.6	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94
6.1.7	Urusan Pendidikan	94
6.1.8	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94
6.1.9	Urusan Sosial	94
6.1.10	Urusan Tenaga Kerja	94
6.1.11	Urusan Perekonomian	95
6.1.12	Tata Kelola Pemerintahan.....	95
6.2	RUMUSAN SASARAN STRATEGIS	95
6.2.1	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	95
6.2.2	Urusan Kesehatan	95
6.2.3	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	96
6.2.4	Urusan Lingkungan Hidup.....	96
6.2.5	Urusan Pangan	96
6.2.6	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	96
6.2.7	Urusan Pendidikan	96
6.2.8	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	97
6.2.9	Urusan Sosial	97
6.2.10	Urusan Tenaga Kerja	97
6.2.11	Urusan Perekonomian	97
6.2.12	Tata Kelola Pemerintahan.....	97

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2017-2037	9
Tabel 2.2	Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031	13
Tabel 2.3	Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031	14
Tabel 3.1	Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat	17
Tabel 3.2	Jenis Bahan Galian di Kabupaten Langkat	18
Tabel 3.3	Curah Hujan Kabupaten Langkat Tahun 2009-2013	19
Tabel 3.4	Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013/2014 Berdasarkan Kecamatan	20
Tabel 3.5	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017	21
Tabel 3.6	Perkembangan pertumbuhan PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan (Hk 2010) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Nasional	24
Tabel 3.7	Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 Kabupaten Langkat	25
Tabel 3.8	Kemiskinan Kabupaten Langkat 2014-2017	26
Tabel 3.9	Statistik Pendidikan Kab. Langkat 2017	27
Tabel 3.10	Statistik Kesehatan Kab. Langkat 2017	28
Tabel 3.11	Fasilitas Kesehatan	28
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017	32
Tabel 3.13	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2013-2017	33
Tabel 3.14	Kontribusi Kelompok Pendapatan dan Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017	34
Tabel 3.15	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017	36
Tabel 3.16	Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017	37
Tabel 4.1	Penapisan Indikator Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	38
Tabel 4.2	Penapisan Indikator Tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	39
Tabel 4.3	Penapisan Indikator Tujuan 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	40
Tabel 4.4	Penapisan Indikator Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	42
Tabel 4.5	Penapisan Indikator Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	42
Tabel 4.6	Penapisan Indikator Tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	43
Tabel 4.7	Penapisan Indikator Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	45

Tabel 4.8	Penapisan Indikator Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	46
Tabel 4.9	Penapisan Indikator Tujuan 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	47
Tabel 4.10	Penapisan Indikator Tujuan 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	48
Tabel 4.11	Penapisan Indikator Tujuan 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	49
Tabel 4.12	Penapisan Indikator Tujuan 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	50
Tabel 4.13	Penapisan Indikator Tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	50
Tabel 4.14	Penapisan Indikator Tujuan 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	51
Tabel 4.15	Penapisan Indikator Tujuan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	53
Tabel 4.16	Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJMD Kabupaten Langkat	54
Tabel 4.17	Rekapitulasi Penapisan Indikator TPB Kabupaten Langkat.....	62
Tabel 4.18	Capaian Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	63
Tabel 4.19	Capaian Tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	64
Tabel 4.20	Capaian Tujuan 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	66
Tabel 4.21	Capaian Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	67
Tabel 4.22	Capaian Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	68
Tabel 4.23	Capaian Tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	68
Tabel 4.24	Capaian Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	69
Tabel 4.25	Capaian Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	71
Tabel 4.26	Capaian Tujuan 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	72
Tabel 4.27	Capaian Tujuan 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	72
Tabel 4.28	Capaian Tujuan 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	73
Tabel 4.29	Capaian Tujuan 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	74
Tabel 4.30	Capaian Tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	74
Tabel 4.31	Capaian Tujuan 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	75
Tabel 4.32	Capaian Tujuan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	76
Tabel 5.1	Kriteria Pemilihan Skenario	77
Tabel 5.2	Rekapitulasi Penggolongan Skenario Indikator TPB Kabupaten Langkat.....	78
Tabel 5.3	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.1	79
Tabel 5.4	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.2.....	81
Tabel 5.5	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.3.....	83
Tabel 5.6	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.1	87
Tabel 5.7	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.2.....	87

Tabel 5.8	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.3.....	88
Tabel 5.9	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.4.....	88
Tabel 5.10	Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.5.....	89
Tabel 6.1	Indikator Terpilih yang Tidak Mencapai Target Nasional	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	5
Gambar 2.2 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	6
Gambar 3.1 Tingkat Kepadatan penduduk Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017	22
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017	23
Gambar 3.3 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2011-2017	23
Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2017	24
Gambar 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	26
Gambar 3.6 Jumlah Fasilitas Pendidikan	27
Gambar 3.7 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara, 2015	29
Gambar 3.8 Peta Ilustrasi Potensi Investasi pada Kabupaten Langkat	30
Gambar 3.8 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara	31
Gambar 3.9 Grafik Rasio Gini Kabupaten Langkat 2012-2017	31
Gambar 3.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)	32
Gambar 3.11 Grafik SiLPA dan Devisit Anggaran tahun 2013-2017	35
Gambar 4.1 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 1	55
Gambar 4.2 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 2	56
Gambar 4.3 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 6	57
Gambar 4.4 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 11	59
Gambar 4.5 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 12	59
Gambar 4.6 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 13	60
Gambar 4.7 Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 15	61

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun 2017 Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Permendagri ini sebagai pengganti Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Setelah terbitnya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tersebut seluruh dokumen evaluasi dan rencana pembangunan daerah harus mengacu kepada aturan tersebut baik dari sisi substansi maupun penjadwalan (timeline) setiap tahapannya. Pada pasal 41 huruf e Permendagri No. 86 tahun 2017 disebutkan bahwa salah satu tahap dalam persiapan penyusunan RPJMD adalah disusunnya rancangan teknokratik RPJMD yang harus diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Selain itu, mengacu pada Undang-undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kebijakan/rencana/program perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program tersebut. Dalam hal ini KLHS sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sebagai suatu proses, KLHS merupakan proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip terpadu, berkelanjutan, fokus, transparan, akuntabel, partisipatif, dan interaktif.

Kemudian, pada tahun 2017 dikeluarkan Peraturan Presiden No. 59 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres ini menyebutkan mengenai komitmen pemerintah untuk menyelaraskan Sustainable Goals Development (SDGs) dengan seluruh perencanaan pembangunan dan tata ruang yang ada di Nasional dan daerah. Penyelarasan tersebut berlaku juga pada RPJMD yang disusun Kab. Langkat. Sehingga dibutuhkan pengadaan KLHS RPJMD.

Pembuatan Draft KLHS untuk RPJMD Kab. Langkat 2019-2024 ini, kemudian mengacu pada Permendagri No. 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa KLHS RPJMD mencakup: 1) Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD; 2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; 3) Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan 4) Penjaminan Kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud pekerjaan Penyusunan Draft KLHS RPJMD ini dimaksudkan sebagai bagian persiapan penyusunan dan bahan perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah RPJMD Kab. Langkat Tahun 2019-2024.

1.2.2 Tujuan

Tujuan pekerjaan Penyusunan Draft KLHS RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya pengkajian Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Langkat 2014-2019.
2. Tersusunnya rumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Langkat 2019-2024.

1.2.3 Sasaran

Sasaran pekerjaan Penyusunan Draft KLHS RPJMD ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kondisi umum daerah Kabupaten Langkat.
2. Mengevaluasi capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Langkat Tahun 2014-2019.
3. Mengidentifikasi Pembagian Peran Pemangku Kepentingan.
4. Menyusun Alternatif Proyeksi Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Langkat 2019-2024.
5. Merumuskan isu, permasalahan, dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD RPJMD Kabupaten Kab. Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1.4 RUANG LINGKUP

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam pekerjaan Penyusunan Draft Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kab. Langkat Tahun 2019-2024 adalah seluruh wilayah Kabupaten Langkat.

1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam pekerjaan Penyusunan Draft Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kab. Langkat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- Identifikasi kondisi umum daerah Kabupaten Langkat
- Evaluasi capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kab. Kab. Langkat Tahun 2014-2019
- Identifikasi Pembagian Peran Pemangku Kepentingan
- Penyusunan Alternatif Proyeksi Kondisi Capaian Tujuan Pembangunan Kab. Langkat Tahun 2019-2024
- Perumusan isu, permasalahan, dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akhir terdiri dari 6 bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi penjabaran mengenai latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, keluaran/output, ruang lingkup, dasar hukum, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Kebijakan

Berisi penjabaran mengenai kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan dan arahan dalam proses analisis dan keseluruhan penyusunan dokumen

Bab III Kondisi Umum Daerah

Berisi pembahasan mengenai gambaran umum wilayah studi yaitu Kabupaten Langkat secara keseluruhan dari aspek fisik, sosial kependudukan dan ekonomi.

Bab IV Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Berisi penjabaran mengenai penapisan indikator yang digunakan serta ketercapaian masing-masing indikator di Kabupaten Langkat.

Bab V Penyusunan Alternatif Proyeksi

Bab ini menjelaskan tentang rekapitulasi penapisan indikator TPB, penggolongan skenario, perumusan proyeksi indikator TPB tanpa upaya, serta perumusan proyeksi indikator TPB dengan upaya rekomendasi.

Bab VI Perumusan Isu Strategis

Bab ini menjelaskan tentang rumusan isu strategis dan permasalahan, serta sasaran strategis wilayah.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR DAN KEBIJAKAN

2.1 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti.

Konsep SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh kesepakatan untuk menjadi tujuan bersama yang universal. Tujuan bersama tersebut merupakan arah untuk memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam menjaga tiga dimensi tersebut SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berupa SDGs. Tujuan global dari SDGs sebagai berikut:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 2.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



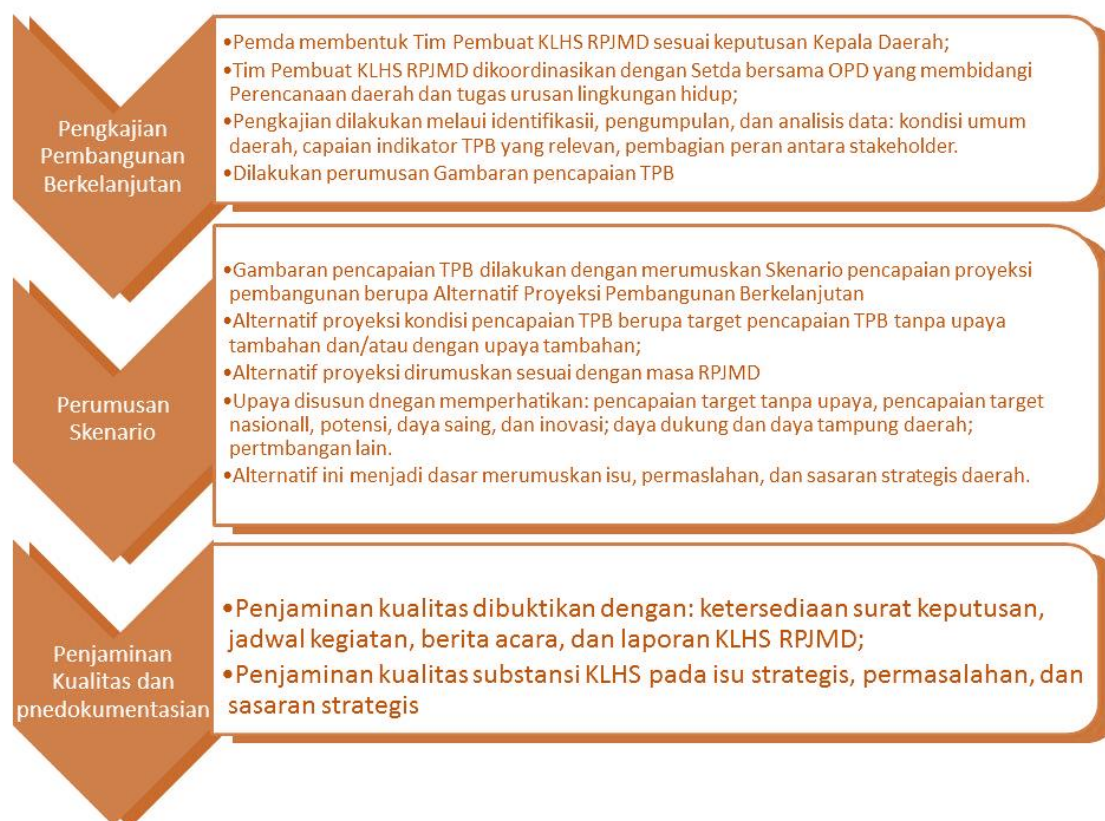
Sumber: United Nations, 2015

Berdasarkan Perpres 59 tahun 2017, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

Sesuai dengan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka mendampingi dan mengawasi Rencana Tata Ruang, untuk memastikan aspek Pembangunan Berkelanjutan dalam rencana tersebut dibutuhkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Berdasarkan PP 46 tahun 2016, KLHS dibutuhkan untuk dilakukan seluruh Pemerintah Daerah. Terutama dalam penyelenggaraan Rencana Pembangunan dan Rencana Tata Ruang. Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2017 dan Permendagri 7 tahun 2018 aspek pembangunan berkelanjutan tersebut diperjelas sebagai bentuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 2.2
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017



Sumber: Peraturan Kementerian Dalam Negeri No.7 Tahun 2018

Dalam kerangka perumusan RPJMD maka KLHS yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan agar mengampu aspek TPB atau SDGs. Berdasarkan Permendagri 7 Tahun 2018 didapatkan proses pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
- Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan;
- Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Dalam keberjalanan perumusan KLHS RPJMD perumusan target dilakukan sesuai dengan target nasional yang terdapat pada Permendagri no.7 tahun 2018 serta Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Setelah dirumuskan KLHS ini diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dan pertimbangan dalam merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

2.2 TINJAUAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang mencakup rentang waktu 20 tahun kedepan hanya dapat disusun apabila 'wujud' daerah Sumatera Utara yang ingin dicapai dalam rentang waktu tersebut telah dirumuskan dengan jelas. Wujud yang ingin dicapai tersebut harus benar-benar mampu menjawab permasalahan strategis masyarakat

sehubungan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal baik dalam lingkup lokal maupun domestik dan global.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang dirumuskan adalah

“VISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA UTARA YANG BERIMAN, MAJU, MANDIRI, MAPAN DAN BERKEADILAN DI DALAM KEBHINEKAAN”

Dalam usaha pencapaian tersebut dirumuskan misi-misi untuk mendukung pembangunan yang ada. Ke-7 misi tersebut sebagai berikut:

1. Memperkuat akhlak dan moral penyelenggara pemerintahan dan pelaku ekonomi
2. Memantapkan sistem pembinaan aparatur pemerintahan yang berkualitas sebagai landasan pembangunan masyarakat madani.
3. Mendorong tumbuhnya lingkungan yang kondusif dalam penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah,
5. Memantapkan sendi-sendi pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada pertanian, agriindustri, kepariwisataan serta sektor unggulan
6. Memantapkan sistem pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia berkualitas yaitu yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi serta semangat partisipatoris yang kuat dalam pembangunan lingkungannya secara keseluruhan.
7. Meningkatkan rasa keadilan, kesetaraan, kebersamaan dan rasa persatuan dalam masyarakat yang perwujudannya terlihat antara lain dari kemajemukan komposisi dalam pemerintahan dalam arti luas.

Misi-misi tersebut selanjutnya diterjemahkan menjadi arah pembangunan. Arah pembangunan daerah Sumatera Utara pada dasarnya adalah strategi pembangunan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan misi pembangunan guna mencapai tujuan jangka panjang pembangunan Sumatera Utara sebagai upaya untuk mewujudkan visi Sumatera Utara sebagaimana telah dirumuskan diatas. Arah pembangunan jangka panjang harus mencakup arah umum dan arah khusus. Arah umum pembangunan jangka panjang menjelaskan tentang kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintah dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Arah khusus menjelaskan tentang peran sub-wilayah (kabupaten/kota) di Sumatera Utara yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Utara.

Tujuan pembangunan jangka panjang Sumatera Utara (2005-2025) ialah mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing kuat baik dalam 69 bidang ekonomi maupun sosial, berkeadilan dibawah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur.

Pada tahapan RPJPD yang dijadikan landasan untuk merumuskan RPJMD 2019-2023 kali ini ada pada tahap keempat. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM-D ke-3, maka RPJM-D ke-4 ditujukan kepada **perwujudan masyarakat Sumatera Utara yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, semakin makmur, berkeadilan dan maju** melalui percepatan pembangunan semua bidang telah berhasil ditumbuhkan dalam RPJP-D ke-3 dengan fokus pemantapan struktur ekonomi kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan sumberdaya alam yang lestari. Diperkirakan pada akhir periode RPJM-D ke-4, Sumatera Utara akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh dengan kontribusi sektor sekunder (industri) sebesar 45 %, sektor primer sebesar 20 %, sektor tertier dan sektor lainnya sebesar 15 %.

2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPJMD Sumatera Utara tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dalam pencapaian rencana tersebut. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJM-D ke -2, maka RPJM-D ke-3 ditujukan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan

pada **pembangunan daya saing kompetitif perekonomian** berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat.

Sejalan dengan tercipta dan terpeliharanya rasa aman, damai dan tumbuhnya demokratisme masyarakat yang ditandai dari semakin mantapnya pertumbuhan nilai-nilai demokrasi ditengah-tengah masyarakat serta tumbuhnya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai produk dari RPJP-D ke-1 dan RPJP-D ke-2, maka Sumatera Utara akan sudah berada pada posisi yang cukup baik untuk menumbuhkan dan memacu daya saing melalui transformasi daya saing komparatif berbasis sumberdaya alam menjadi daya saing kompetitif berbasis sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.

Untuk itu, pemantapan struktur ekonomi dan keseimbangan persebaran pertumbuhan sektor-sektor melalui peningkatan keterpaduan sektor industri manufaktur (sektor sekunder) dengan sektor pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya (sektor primer) dan sektor jasa-jasa yaitu keuangan, perdagangan, dan transportasi (sektor tertier) yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan akan menciptakan daya saing yang tangguh bagi Sumatera Utara.

Ketersediaan infrastruktur yang mantap sesuai dengan rencana tata ruang yang meliputi mantapnya jaringan jalan terutama kearah kantong-kantong produksi dan daerah pemasaran, terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal (tersedia sepanjang hari) dan efisien (tarif yang realistis) baik untuk kebutuhan industri /sektor bisnis maupun rumah tangga, tersedia pasokan air baik air minum/bersih maupun air irigasi merupakan kondisi penting lainnya yang harus dijamin pemenuhannya melalui pembangunan tahap ketiga ini. Pembudayaan penggunaan teknologi informasi baik dalam pemerintahan maupun di dunia pendidikan, organisasi bisnis dan lain-lain diharapkan telah tumbuh dengan baik. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memotivasi dan memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang membangun infrastruktur teknologi untuk meningkatkan kemampuan aksesnya terhadap informasi.

Sehingga dirumuskan arah pembangunan wilayah pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 sebagai berikut:

1. mendorong percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi sebagai penggerak utama pertumbuhan dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan keunggulan daerah,
2. memperhatikan aspek keberlanjutan dengan berpedoman kepada RTRW dan KLHS dalam pengembangan dan pembangunan wilayah,
3. mendorong pengembangan dan pemerataan wilayah secara terpadu untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan yang adil dan merata di seluruh wilayah,
4. menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, serta antara wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan
5. meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah dengan kebijakan nasional

2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Rencana tata ruang wilayah provinsi yang dijadikan acuan dalam penyusunan KLHS ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017.

2.2.3.1 Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan, dan Strategi-Strateginya

Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2037 adalah mewujudkan wilayah yang sejahtera, merata, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan enam kebijakan

yang di antaranya (1) mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat, (2) mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk, (3) mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif, (4) menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem, (5) mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah, dan (6) meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekoomi ke seluruh wilayah provinsi.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi strategi-strategi. **Error! Reference source not found.** memperlihatkan strategi dari masing-masing kebijakan penataan ruang.

Tabel 2.1
Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Kebijakan	Strategi
(1) Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat.	A. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat B. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas wilayah timur-barat dan dataran tinggi
(2) Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.	A. Mendorong kegiatan pengolahan komoditas unggulan di pusat produksinya. B. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengolahan komoditas tersebut. C. Meningkatkan aksesibilitas lokasi produksi ke lokasi pemasaran serta kinerja infrastrukturnya seperti air, listrik, dan telekomunikasi. D. Mengembangkan agropolitan dan minapolitan serta kawasan wisata potensial.
(3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi lahan yang ada dan ekstensifikasi kegiatan pertanian pada lahan non-produktif.	A. Mempertahankan dan melindungi lahan pertanian. B. Meningkatkan produktivitas pertanian. C. Menambah luas lahan pertanian.
(4) Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.	Mempertahankan, meningkatkan, dan mengembalikan ekosistem kawasan lindung.
(5) Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.	A. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungannya. B. Mengendalikan pemanfaatan ruang. C. Mendorong sinergi pemanfaatan ruang antara di perkotaan dengan perdesaan.
(6) Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekoomi ke seluruh wilayah provinsi.	Menyediakan, mengembangkan, dan meratakan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan sosial.

2.2.3.2 Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang terdiri atas rencana pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringannya. Lebih rincinya, rencana struktur ruang dijabarkan menjadi rencana sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

Kabupaten Langkat dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara tersebut direncanakan akan dilakukan pengembangan sumber daya air pada kawasan rawa yang tersebar di banyak kabupaten, termasuk kabupaten Langkat. Keterangan ini terdapat dalam pasal 22 ayat (3).

2.2.3.3 Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang yang berkaitan erat dengan fungsi kegiatan di ruang tersebut. Peruntukan fungsi ruang tersebut dibagi menjadi fungsi lindung dan budidaya, atau dengan kata lain kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam pasal 29 pada paragraf 2 tentang Rencana Pengembangan Rencana Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya disebutkan bahwa di Kabupaten Langkat terdapat kawasan lahan gambut yang merupakan salah satu kawasan lindung tersebut. Selain itu dalam pasal 32 paragraf 5 ayat (2) huruf f tentang rencana pengembangan kawasan rawan bencana disebutkan kabupaten Langkat termasuk ke dalam kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan angin puting beliung. Potensi Kabupaten Langkat sebagai kawasan peternakan hewan besar disebutkan dalam pasal 38 paragraf 4 tentang rencana pengembangan kawasan peternakan. Kemudian dalam pasal 40 paragraf 6 tentang rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan ayat (2) disebutkan bahwa kabupaten Langkat ditetapkan sebagai kawasan tambang minyak, gas bumi, panas bumi, dan batu bara. Terakhir adalah kawasan pertanian berupa pendaratan pasukan di Pangkalan Susu sebagaimana yang disebut dalam pasal 4 ayat (2).

2.3 TINJAUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANGKAT

2.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat tahun 2005-2025 terdapat beberapa permasalahan pembangunan daerah jangka panjang yang diangkat untuk dipertimbangkan dalam agenda pembangunan 20 tahun kedepan. Berdasarkan kondisi eksisting dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun-tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 adalah:

Masyarakat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025, selanjutnya ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Langkat 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal;
2. Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah;
4. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;

2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Langkat

Adapun Visi dan Misi Tersebut adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Langkat Yang Lebih Maju, Dinamis, Sejahtera dan Mandiri, Berlandaskan Aspek Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Makna dari setiap kata Kunci yang terangkai dalam Visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang lebih maju
Masyarakat yang lebih maju adalah masyarakat yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi, sehingga mampu memanfaatkan untuk mengembangkan produk- produk unggulan daerah.

2. Masyarakat yang lebih dinamis
Bermakna masyarakatnya berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok, serta menggunakan akal sehat untuk dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan nasional dan global.
3. Masyarakat yang lebih sejahtera
 - a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli
 - b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai, meningkatkan lapangan pekerjaan.
4. Masyarakat yang lebih mandiri
Bermakna bahwa masyarakat yang lebih mandiri adalah masyarakat yang berkemampuan untuk mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan dengan kekuatan sendiri melalui penguasaan IPTEK dan dipatuhinya seluruh aturan Hukum yang berlaku.
5. Landasan Aspek Hukum
Dapat diartikan bahwa dalam penyelenggaraan harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta kewajiban untuk menegakkan dan menjamin kepastian Hukum dalam segala bentuk pembangunan Kabupaten Langkat
6. Landasan Religius
Mengandung pengetahuan ketaatan masyarakat untuk menerapkan perilaku dan sikap hidup beragama. Sesama umat beragama dapat hidup rukun serta mampu diterapkan dalam kegiatan pembangunan.
7. Landasan Berwawasan Lingkungan
Mengandung pengetahuan bahwa masyarakat kabupaten Langkat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia.

Misi RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2014 -2019

Misi Pertama: “Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi”

Peningkatan Profesionalisme birokrasi memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. penyelenggaraan pemerintahan tidak semata – mata bergantung kepada pemerintah saja, akan tetapi harus ada sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggung jawab.

Proporsional dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap domain pemerintahan melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertanggung jawab mengandung pengertian bahwa pelaksanaan peran dan fungsi setiap domain pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Sesuai dengan perjalanan waktu dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, maka dirasa perlu adanya peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan masyarakat tersebut diantaranya adalah, adanya kepastian hukum, rasa keadilan, demokratis, transparan, responsive, akuntabel dan bebas dari KKN. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme birokrasi.

Misi Kedua: “Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Sosial) yang berlandaskan iman dan takwa serta pelestarian budaya.”

SDM berkualitas yang berlandaskan iman dan takwa merupakan salah satu tolok ukur menuju keberhasilan visi diatas. Keimanan dan ketakwaan adalah landasan moral dan etika yang tidak hanya memiliki muatan spiritual, tetapi juga muatan social sehingga pada prakteknya tidak saja di tunjukkan dengan keatatan individu tetapi juga di aplikasikan dalam kehidupan sosial sehingga tercipta kesadaran untuk merajut kehidupan bersama.

Misi Ketiga: “Memantapkan Pembangunan Perdesaan”.

Mayoritas Wilayah Kabupaten Langkat adalah Pedesaan oleh karena itu tumpuan pembangunan salah satunya diarahkan pada wilayah Pedesaan. Upaya dalam mewujudkan pembangunan Pedesaan yang mantap menuju Visi di atas adalah melalui peningkatan Infrastruktur Pedesaan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan Desa, Peningkatan keswadayaan dan kegotong royongan masyarakat Desa, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan Masyarakat, Perkuatan Lembaga- lembaga Keuangan Mikro di Desa, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa.

Misi Keempat: “Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah Melalui Penegakkan Supremasi Hukum dan HAM.

Membangun kondisi Daerah yang aman, tertib dan damai dengan menegakkan Supremasi Hukum dan HAM. Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Langkat yang ditandai oelh tidak adanya tindak kriminal/kejahatan atau kerusakan, serta adanya rasa saling percaya dan harmoni dari seluruh komponen masyarakat yang dilandasi penegakkan supremasi hukum dan HAM.

Misi Kelima: “Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dan Keterpaduan Tata Ruang Wilayah”

Dalam rangka mewujudkan Visi diatas, pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus bertumpu pada pengembangan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik serta memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah.

Misi Keenam: “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Yang Berdaya Saing”

Peningkatan Ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat yang rendah erat kaitannya dengan fungsinya, semakin besar daya beli masyarakat maka semakin kecil tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kemiskinan menyebabkan kemampuan masyarakat berkurang secara drastis dalam mengakses pelayan dasar.

Misi Ketujuh: “Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan Menerapkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”

Dalam mengatasi hal tersebut diperlukan pola pikir dan bertindak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, yaitu dengan mengacu pada pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya mengandalkan pada mekanisme kinerja Pemerintahan tetapi harus mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat dan membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui penegakkan hukum.

2.3.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat sampai tahun 2018 diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013. RTRW ini berlaku dari tahun 2013 hingga tahun 2033.

2.3.3.1 Tujuan Penataan Ruang, Kebijakan, dan Strategi-Strateginya

Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat adalah *terwujudnya Langkat yang maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan*. Kebijakan dan strategi-strateginya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031

Kebijakan	Strategi
(1) Peningkatan pelayanan pusat kegiatan kawasan yang merata dan berhierarki	<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan Lokal; B. Menjaga berfungsinya secara optimal pusat-pusat kegiatan yang sudah ada; C. Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang Kabupaten; dan D. Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Wilayah Kabupaten Langkat.
(2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana wilayah yang terpadu dan merata di seluruh kawasan.	<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, dan udara, serta keterpaduan intra dan antar moda; B. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi; C. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi secara optimal; dan D. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air.
(3) Peningkatan sarana dan prasarana yang merata dan terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Langkat.	<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan pemerataan fasilitas di setiap kecamatan dengan memperhatikan jumlah dan perkembangan penduduk; B. Menciptakan sistem perhubungan yang efektif dan efisien terutama di daerah pedalaman yang ditempuh dengan jalur transportasi laut maupun darat guna meningkatkan produktivitas.
(4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui pelatihan-pelatihan dan penyuluhan oleh pemerintah dan instansi terkait, seperti pelatihan bidang pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain-lain, serta pemerataan penduduk di Wilayah Kabupaten Langkat.	<ul style="list-style-type: none"> A. Penambahan fasilitas-fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan) di daerah/kecamatan yang masih kekurangan fasilitas; B. Mengarahkan perkembangan suatu wilayah melalui distribusi penduduk sesuai daya dukung wilayah sehingga tercapai kesejahteraan penduduk yang proporsional; C. Meningkatkan sumber daya manusia melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan-pelatihan serta fasilitas kesehatan untuk menjaga tingkat kesehatan masyarakat agar lebih baik.
(5) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, kereta api maupun laut yang berpotensi dan dapat dikembangkan.	<ul style="list-style-type: none"> A. Pengembangan pelayanan angkutan kereta api penumpang tidak hanya mencapai kota Binjai, namun dikembangkan menjadi Medan-Binjai-Stabat. B. Peningkatan pelayanan kereta api yang menghubungkan Medan (Sumatera Utara) menuju propinsi NAD dilakukan apabila kondisi keamanan sudah kondusif/baik; C. Peningkatan pembangunan jalan yang rusak berat yang meliputi Kecamatan Salapian, Sei Bingai, Stabat, Wampu, Batang Serangan, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, dan Besitang; D. Meningkatkan fungsi pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpan lokal dan pengembangan pelabuhan perikanan di kawasan pantai Timur Kabupaten Langkat sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera Utara; E. Untuk pembangunan pelabuhan baru di wilayah Secanggang perlu studi lebih lanjut dan detail dengan melihat seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap biota laut dan daya dukung lahan.

2.3.3.2 Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman/pusat-pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan untuk tata jenjang pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala merupakan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu Tanjung Pura dan Pangkalan Susu diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dikarenakan semakin banyak PKL yang ada akan mengakibatkan tumpang tindihnya sistem pusat pelayanan yang ada di Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu rencana ke depan yang menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan RTRW Provinsi Sumatera Utara sebagai PKL, dengan tetap membagi tiga wilayah pengembangan.

Rencana ke depan sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap akan dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru. Dimana ditetapkan pula 3 Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala. Untuk lebih jelas pembagian tata jenjang sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Strategi Masing-masing Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2011-2031

No	Wilayah Pengembangan	PKL	PPK	PPL
1	Langkat Hilir	Stabat	Tanjung Pura	Binjai, Wampu, Hinai, Secanggang, Padang Tualang, Sawit Seberang
2	Langkat Hulu	Kuala	Bahorok	Sei Bingai, Salapian, Selesai, Batang Serangan, Kutambaru, Serapit
3	Teluk Haru	Pangkalan Brandan (Babalan)	Pangkalan Susu	Gebang, Sei Lapan, Brandan Barat, Besitang, Pematang Jaya

2.3.3.3 Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Sedangkan sasaran pengelolaan kawasan lindung di Kabupaten Langkat adalah:

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam.
3. Peningkatan Hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman Multi Purposes Tree Spesies (MPTS).

Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat).

Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengarah kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk:

1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.
4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata Ruang Nasional;
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda);
7. Hasil Masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman di atas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah:

1. Kawasan hutan produksi :
 - Kawasan hutan produksi terbatas
 - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian :
 - Kawasan tanaman lahan basah
 - Kawasan tanaman lahan kering
 - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
 - Kawasan peternakan
 - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan permukiman

BAB 3 KONDISI UMUM DAERAH

3.1 KONDISI GEOGRAFIS

Karakteristik geografi adalah karakteristik bentang alam secara fisik. Karakteristik ini dapat dibagi menjadi karakteristik fisik alami dan buatan. Karakteristik alami yang dibahas antara lain topografi, sumber daya air, sumber daya tanah, dan klimatologi. Sementara itu, karakteristik buatan yang dibahas adalah penggunaan lahan. Kawasan rawan bencana dapat dikatakan sebagai irisan kedua karakteristik disebabkan kerawanan bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam tetapi juga adanya kawasan terbangun.

Karakteristik geografi adalah karakteristik bentang alam secara fisik. Karakteristik ini dapat dibagi menjadi karakteristik fisik alami dan buatan. Karakteristik alami yang dibahas antara lain topografi, sumber daya air, sumber daya tanah, dan klimatologi. Sementara itu, karakteristik buatan yang dibahas adalah penggunaan lahan. Kawasan rawan bencana dapat dikatakan sebagai irisan kedua karakteristik disebabkan kerawanan bencana tidak hanya disebabkan oleh faktor alam tetapi juga adanya kawasan terbangun.

3.1.1 Topografi

Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai, dengan ketinggian antara 0-1.200 m dpl, dengan garis pantai sepanjang 110 km. Bagian Timur Laut berada disepanjang pantai Selat Malaka, topografi relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian Timur laut disekitar Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Gebang. Daerah tersebut rata-rata memiliki ketinggian 0-4 m dpl, meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lengan, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang.

Bagian Barat sampai dengan Barat Daya relatif datar sampai berbukit dengan ketinggian 0-30 m dpl. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Selesai, Sawit Seberang, sebagian Sei Lengan, Sebagian Besitang, Sebagian Kuala, dan Sebagian Sei Bingai.

Daerah yang berbatasan dengan Karo, Aceh Tenggara dan Gayo Lues bergelombang sampai bergunung yang relatif terjal, dengan ketinggian antara 30 – 1200 m dpl. Daerah tersebut merupakan Hutan Lindung kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kecamatan yang termasuk daerah tersebut sebagian Besitang, Sei Lengan, Bahorok, Batang Serangan, Salapian, dan Sei Bingai.

3.1.2 Sumber Daya Air

3.1.2.1 Daerah Aliran Sungai

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sungai-sungai yang berada di wilayah Kabupaten Langkat masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang. DAS yang masuk dalam wilayah sungai tersebut meliputi DAS Damar Condong, DAS Pangkalan Susu, DAS Simpang Kiri, DAS Pardongkelan, DAS Besitang, DAS Beras Basah, DAS Tenggulun, DAS Lengan, DAS Karakunda, DAS Gebang, DAS Wampu, DAS Tanjung Ibus dan DAS Sembilan.

DAS Wampu adalah merupakan DAS terluas di wilayah Kabupaten Langkat, dengan luas areal mencapai 416,175.19 Ha. Tingkat kekritisian lahan DAS Wampu mencapai 87,103.61 Ha atau 20.08 % di mana Sub DAS Lau Biang Hulu merupakan wilayah yang memiliki kekritisian lahan paling luas yaitu 25,186.16 Ha atau 25.71 % dari luasan Sub DAS Lau Biang Hulu atau 6.05% dari luasan DAS Wampu.

3.1.2.2 Sungai, Rawa, dan Danau

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil, 5 diantaranya adalah sungai besar yaitu; Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lengan, Sungai Bingai dan Sungai Besitang. Keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk Irigasi dan budidaya air tawar. Data aliran sungai di Kabupaten Langkat disajikan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat

No.	Nama Sungai	Luas (Km ²)	Kecamatan	Panjang (Km)	Lebar (m)	Isi Normal (Km ³)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Wampu	2.569	Bohorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat, Binjai, Secanggang, Tg. Pura	105	100	80
2	Bagerpang	57	Bohorok	20	25	5
3	Gergas	58	Bohorok, Stabat	24	15	3
4	Salapian	145	Salapian	27	25	9
5	Bohorok	150	Bohorok	25	40	8
6	Bekulap	134	Salapian, Kuala	40	30	10
7	Temuyuk	5	Salapian	4	10	1
8	Bingai	717	Sei Bingei, Binjai, Stabat	67	30	15
9	Mencirim	43	Kabupaten Binjai, Wampu	38	38	13
10	Bengaru	15	Sei Bingei	10	10	3
11	Salaon	6	Sei Bingei	5	10	1
12	Begumit	347	Kuala, Selesai	34	30	13
13	Tembo	42	Kuala	27	15	4
14	Bekiun	94	Kuala, Salapian	25	20	6
15	Menjahong	18	Sei Bingei, Kuala	13	10	3
16	Bt. Serangan	1.413	Pdg. Tualang, Tj. Pura	80	100	43
17	Besilam	288	Stabat, Pdg Tualang, Binjai	45	15	13
18	Tenang	144	Pdg. Tualang	47	30	12
19	Musam	175	Pdg. Tualang	25	43	18
20	Lengan	825	Babalan	80	40	9
21	Besitang	440	Besitang	83	50	8
22	Kr, Gading	160	Secanggang, Stabat	27	30	2
23	Belengking	40	Stabat	17	10	1
24	Dendang	160	Stabat	27	30	2
25	Serapuh	40	Tanjung Pura	10	15	1
26	Alur Hitam	18	Gebang	10	10	0,5

3.1.3 Sumber Daya Tanah

3.1.3.1 Struktur dan Karakteristik

Jenis tanah di Kabupaten Langkat :

- Dataran sepanjang pantai terdiri dari tanah alluvial.
- Dataran rendah terdiri dari jenis gleihumus rendah, hindromofil kelabu dan plarosal.
- Dataran tinggi dan perbukitan terdiri dari tanah podsolid merah kuning.

Adapun susunan batuan (geologi) di Kabupaten Langkat adalah :

- Qh = Alluvium : Kerikil, pasir dan lempung;
- Qpme = Formasi Medan : Bongkah-bongkah kerikil, pasir, lanau dan lempung;

- QTjr = Formasi Julu Rayeu : Batupasir berlapis selang-seling dan batulumpur;
- Qvt = Tufa Toba : Tufa riadasit, sebagian terlaskan;
- Qvbj = Satuan Binjai : Breksi aliran bersusun andesit sampai dasit;
- Ppbl = Formasi Batu Gamping Batumilmil : Batu gamping dan rijang;
- Pub = Formasi Bahorok : Wakemalihan, batusabak, arenit kuarsa malihan, batulanau malihan, konglomerat malihan;
- Tps = Formasi Seurela : Batupasir berirama, batulumpur dan konglomerat;
- Tuk = Formasi Keutapang : Batupasir berlapis selang-seling dan batulumpur;
- Tmb = Formasi Baong : Batulumpur (beberapa berglaukonit) dan batu pasir;
- Tob = Formasi Bruksah : Batupasir dan konglomerat.

3.1.3.2 Potensi

Berpedoman kepada kriteria peruntukan pertambangan dan pembagian Wilayah Pengembangan di Kabupaten Langkat, maka potensi yang ada dan mendapat prioritas pengembangan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Jenis Bahan Galian di Kabupaten Langkat

No	Bahan Galian	Lokasi	Kegunaan
1	Batu Gamping	Kec. Salapian	Bahan bangunan / jalan, dan bahan baku semen
2	Kulit Kerang	Kec. Bahorok, Salapian dan Hinai	Bahan baku utama / penolong sektor industri
3	Fosfat	Bahorok	Pembuatan pupuk
4	Feldspar	Sepanjang Pantai Timur	Industri keramik, kaca lembaran
5	Gambut	Padang Tualang	Bahan bakar gas dan cair
6	Kalsit	Salapian	Pengisi kertas, cat, tapal gigi, pemutih
7	Kaolin	Bahorok	Bahan keramik, bahan filter pada industri cat, karet
8	Sirtu	Bahorok, Padang Tualang, Selesai	Bahan bangunan, jalan dan lain-lain
9	Oker	Berandan Barat	Bahan baku cat
10	Bentonit	Besitang	Pemboran, pencoran logam dan penjemih minyak goreng, minyak bumi, pembuatan wol mineral, campuran semen
11	Batu Bara	Bahorok, Batang Serangan	Bahan bakar
12	Lempung	Kuala, Bahorok	Bahan batu bara dan bahan baku semen
13	Pasir Laut	Sepanjang Pantai Timur	Campuran lempung feldspar
14	Batu Setengah Mulia	Brandan Barat	Perhiasan dan bahan dekorasi atau hiasan
15	Tanah Urug	Padang Tualang, Besitang	Penimbunan
16	Pasir Kuarsa	Pangkalan Susu	Bahan baku gelas
17	Pasir	Stabat, Wampu, Selesai	Bahan bangunan
18	Emas	Padang Tualang (masih dalam kajian)	Perhiasan
19	Minyak dan Gas Bumi	Kabupaten Langkat (potensi)	

3.1.3.3 Klimatologi

Kabupaten Langkat memiliki Iklim Tropis Basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah (curah hujan di atas 100 mm³/bulan) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm³ dan curah hujan terendah terjadi di bulan Pebruari yaitu 116 mm³.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan Pebruari-Maret dan musim hujan pada bulan September sampai dengan Februari. Curah hujan rata – rata berkisar antara 1.00 sampai dengan 3.000 mm pertahun. Suhu rata – rata minimum berkisar antara 23^o–25^oC dan rata – rata maksimum 30^o–33^oC, serta kelembaban udara relatif antara 65% – 75%.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin kencang dan kering yang berhembus dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun. Curah hujan di Kabupaten Langkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013 per daerah pengamatan diperlihatkan pada tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3
Curah Hujan Kabupaten Langkat Tahun 2009-2013

Daerah Pengamatan	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
BPP Bahorok	454	296	321	248	354	230	406	244	344	809	424	466
BPP Tg. Langkat	601	339	55	258	405	336	313	373	512	772	426	546
Ktr. Camat Kuala	330	337	94	176	400	251	267	326	183	516	176	334
BPP Selesai	260	317	76	230	193	202	150	164	254	534	165	266
BPP Sei Bingai	294	486	128	190	255	140	131	351	213	413	156	370
BPP Kw. Begumit	152	233	142	184	203	69	255	143	288	640	133	195
BPP Perdamaian	174	321	87	74	143	73	332	138	146	347	75	225
BPP Cempa	134	260	52	115	144	279	199	206	384	386	230	534
Ktr. Camat Pd. Tualang	31	114	6	33	56	98	101	94	115	171	45	92
Ktr. Camat Bt. srrangan	261	286	28	223	488	231	357	338	385	570	117	372
BPP Babalan	161	203	97	204	191	132	90	167	141	214	243	561
BPP Brandan Barat	198	107	11	228	136	173	44	195	132	128	132	398
BPP Besitang	150	49	39	115	176	103	83	122	166	220	148	201
BPP Gebang	172	218	67	82	224	203	173	203	375	373	136	494
BPP Pem Jaya	103	88	30	59	123	56	75	184	146	270	156	502
BPP Secanggang	153	135	52	150	196	156	221	234	123	371	86	287
BPP Tanjung Pura	198	214	36	124	96	213	96	152	183	208	174	379
BPP Sei Lapan	182	112	71	208	142	161	38	179	160	242	100	287
BPP Serapit	348	206	95	110	148	82	131	115	169	815	183	214
BPP Kutambaru	358	366	56	153	177	178	125	211	181	610	285	305
BPP Sawit Seberang	144	50	17	38	27	48	29	80	160	302	125	212
BPP Desa Lbk.Kasih	121	91	11	345	159	127	50	154	360	153	184	100
BPP Wampu	182	134	107	208	213	81	260	222	214	600	67	326
BPP Sei Siur Pkl. Susu	145	69	18	190	227	169	92	193	163	220	161	408
Rata-rata Tahun 2013	221	207	71	162	199	155	163	199	228	404	173	352
Tahun 2012	222	122	201	276	370	150	231	305	377	357	409	269
Tahun 2011	118	76	370	158	229	252	173	222	307	373	226	257
Tahun 2010	110	34	117	80	137	229	221	151	207	169	363	258
Tahun 2009	206	57	289	189	302	111	230	243	269	329	201	196

3.1.4 Penggunaan Lahan

3.1.4.1 Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan di Kabupaten Langkat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu guna lahan pertanian sawah yang mencapai sekitar 6,46%, lahan bukan pertanian sekitar 50,16% dan lahan pertanian bukan sawah sekitar 43,39% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Penggunaan lahan bukan pertanian, sebagai kawasan Hutan seluas ± 330.658,51 ha atau 52,79% luas wilayah Kabupaten Langkat (SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005), terdiri dari kawasan pelestarian

alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas \pm 213.985 Ha. (80,38%), Kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut seluas \pm 9.520 Ha (3,58%), Hutan Lindung (HL) seluas 3.386,65 Ha, Hutan produksi tetap (HP) seluas 58.442,22 Ha. Pada kawasan hutan terdapat ekosistem mangrove/bakau seluas 35.000 Ha. Pada hutan produksi tetap yang berhimpitan dengan TNGL terdapat Ekosistem Leuser seluas 7.600 Ha. Dalam wilayah ini juga terdapat objek wisata yang terkenal yaitu Kawasan Pemandian dan Rehabilitasi Orang Hutan di Bukit Lawang Bahorok.

Penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar (66,67%) untuk areal perkebunan. Luas areal perkebunan di Kabupaten Langkat adalah 208.782,83 Ha atau 33,3% dari luas wilayah Kabupaten Langkat. Dengan komposisi Perkebunan rakyat 43,99% (91.437,60 Ha). Perkebunan Negara 34,67% (72.387,61 ha), Perkebunan Swasta Nasional 15,82% (33.038,41 ha) dan Perkebunan Swasta Asing 5,70% (11.919,21 ha).

Areal perkebunan tersebut didominasi oleh perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa Sawit 132.006 ha. (63,23%), Karet 60.327 ha (30,35%), Coklat 8.324 ha (4,19 %), Kelapa 3.598 ha (1,81%), Tebu 1.159 ha (0,58%), Tembakau 1.476 ha (0,74%), Kopi 670 ha (0,33%) dan lain-lain 1.222,83 ha (0,62%).

Sedangkan luas baku areal persawahan adalah 43.805 ha pada tahun 2009, pada tahun 2013 tercatat tinggal 38.456 ha. Terdiri dari lahan sawah Irigasi 8.379 ha (Sumber; SP Lahan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat 2013), sisanya merupakan lahan sawah tadah hujan, pasang surut dan rawa lebak.

Tabel 3.4
Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013/2014 Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Lahan Pertanian		Non Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
1. Bahorok	720	105.185	4.278	110.183
2. Serapit	1.460	7.959	431	9.850
3. Salapian	171	20.587	1.415	22.173
4. Kutambaru	-	22.870	814	23.683
5. Sei Bingai	3.019	14.178	16.20	33.317
6. Kuala	766	8.777	1.080	20.623
7. Selesai	1.215	12.443	3.115	16.773
8. Binjai	1.491	2.382	332	4.205
9. Stabat	1.479	6.621	2.785	10.885
10. Wampu	1.381	14.745	3.295	19.421
11. Batang Serangan	118	88.522	1.298	89.938
12. Sawit Seberang	-	19.637	1.273	20.910
13. Padang Tualang	589	17.023	4.502	22.114
14. Hinai	1.928	7.394	1.204	10.526
15. Secanggang	5.826	13.122	4.171	23.119
16. Tanjung Pura	2.735	13.510	1.716	17.961
17. Gebang	2.785	13.438	1.626	17.849
18. Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
19. Sei Lapan	1.916	23.104	3.048	28.068
20. Brandan Barat	1.362	5.678	1.940	8.980
21. Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
22. Pangkalan Susu	2.984	10.273	1.878	15.135
23. Pematang Jaya	846	18.629	1425	20.900
Langkat	38.456	519.292	68.581	626.329

3.1.5 Kawasan Rawan Bencana

3.1.5.1 Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian Tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Batang Serangan (Utara), hingga Kecamatan Bahorok (Selatan). Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor tanah menuju kawasan yang lebih rendah.

3.1.5.2 Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang, Batang Serangan dan Stabat. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi banjir terutama disepanjang aliran sungai besar.

3.2 KONDISI DEMOGRAFIS

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 976.535 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 154,48 jiwa per Km². Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2000 adalah sebesar 0,88 persen. Untuk tahun 2017 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Langkat 1.028.309 jiwa.

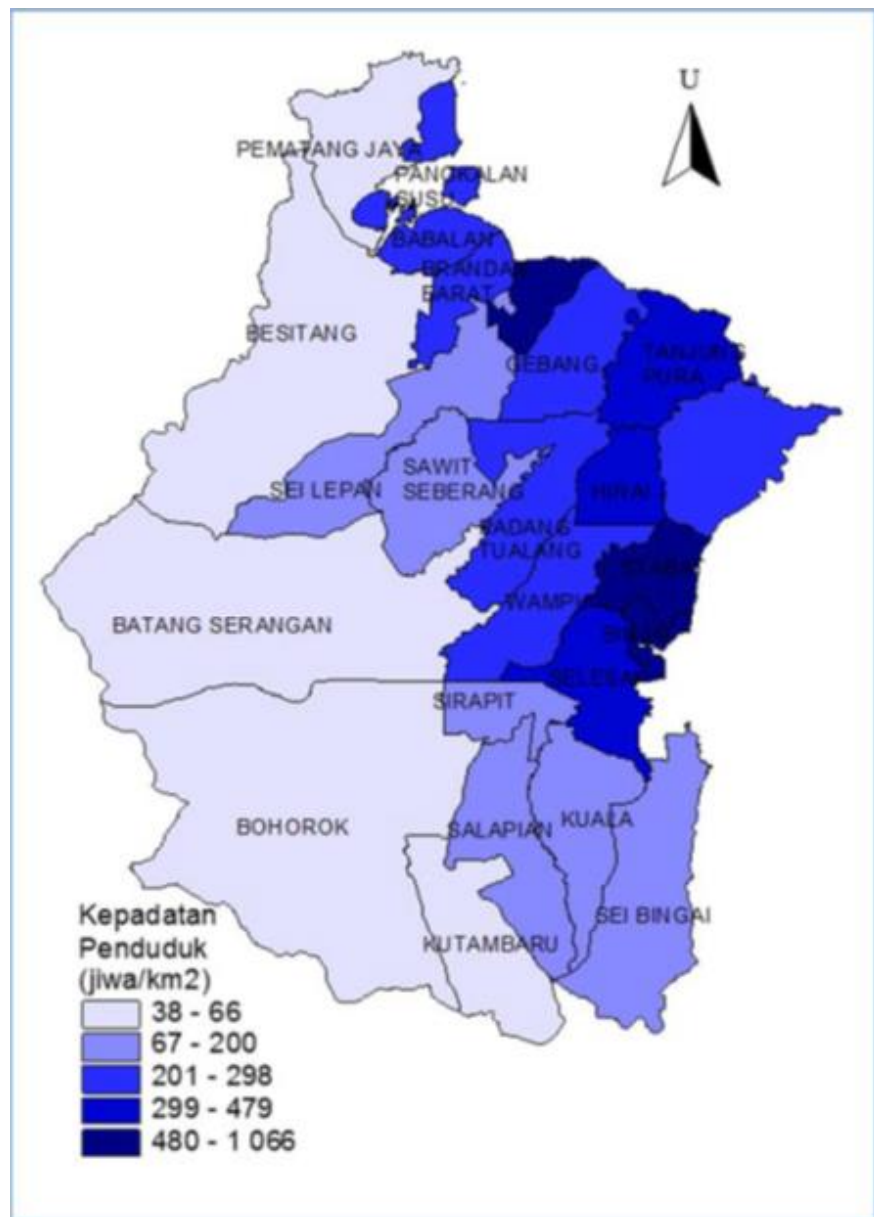
Tabel 3.5
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Bohorok	1,101.83	19	42,328	38
2	Sirapit	98.50	10	16,900	172
3	Salapian	221.73	17	27,516	124
4	Kutambaru	236.84	8	14,238	60
5	Sei Bingai	333.17	16	51,491	155
6	Kuala	206.23	16	41,576	202
7	Selesai	167.73	14	73,731	440
8	Binjai	42.50	7	45,168	1,063
9	Stabat	108.85	12	87,527	804
10	Wampu	194.21	14	43,106	222
11	Batang Serangan	899.38	8	37,173	41
12	Sawit Seberang	209.10	7	26,751	128
13	Padang Tualang	221.14	12	49,549	224
14	Hinai	105.26	13	50,751	482
15	Secanggang	231.19	17	69,376	300
16	Tanjung Pura	179.61	19	68,464	381
17	Gebang	178.49	11	45,165	253
18	Babalan	76.41	8	59,905	784
19	Sei Lapan	280.68	14	49,704	177
20	Brandan Barat	89.80	7	23,294	259
21	Besitang	720.74	9	46,676	65
22	Pangkalan Susu	151.35	11	44,125	292
23	Pematang Jaya	209.00	8	13,795	66
Kabupaten Langkat		6,263.74	277	1,028,309	164

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2017

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tahun 2012 sebanyak 1.271.454 jiwa. Terdiri dari laki-laki 651.121 jiwa dan perempuan 620.333 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Stabat yaitu 83.093 jiwa, kemudian Kecamatan Selesai 70.035 jiwa, sedangkan Kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Pematang Jaya dengan jumlah penduduk 13.102 jiwa.

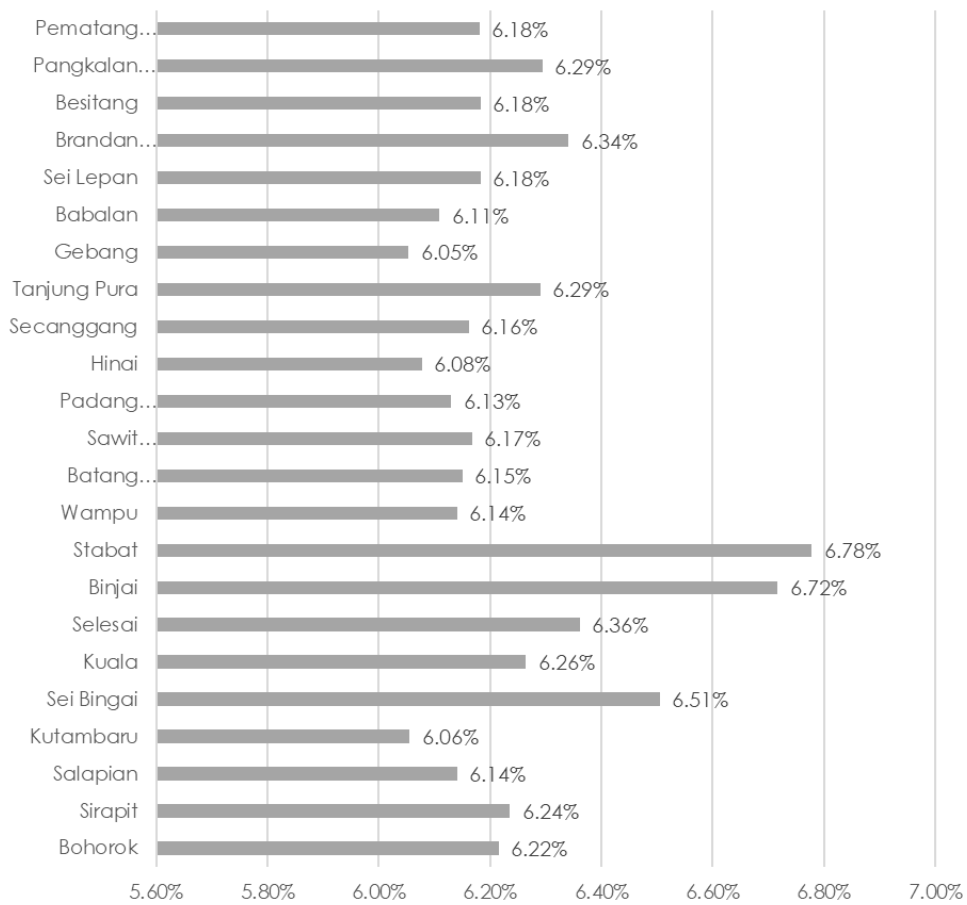
Gambar 3.1
Tingkat Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2017

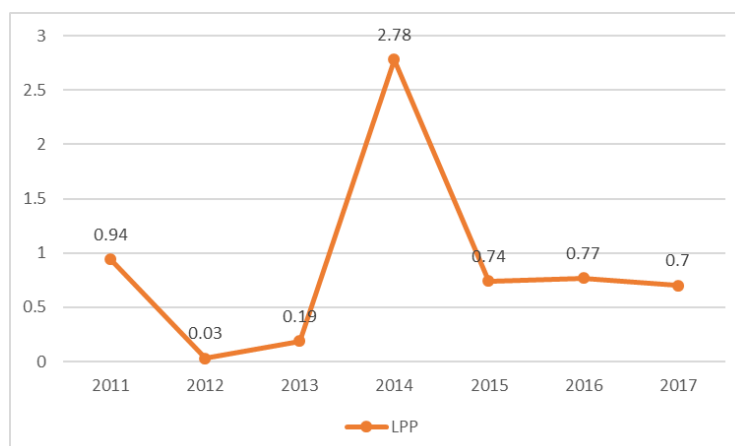
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat periode 2000-2017, rata-rata hanya 0,8% untuk penduduk laki-laki dan 0,9% untuk penduduk perempuan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari pertumbuhan penduduk laki-laki. Sedangkan sebaran pertumbuhan penduduk di tingkat kecamatan, Kecamatan Stabat memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi dengan rata-rata 1,8%/tahun. Sedangkan untuk penduduk perempuan Kecamatan Stabat juga memiliki pertumbuhan yang tertinggi yaitu 1,95%/tahun. Sebaran pertumbuhan penduduk per-kecamatan disajikan dalam gambar 3.2 sebagai berikut.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2017



Sumber: Pengolahan Data BPS Kab. Langkat, 2018

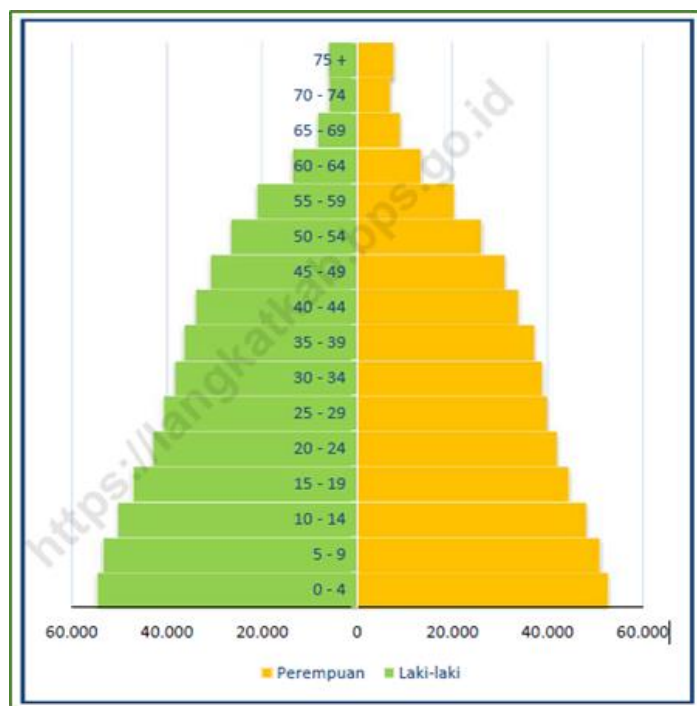
Gambar 3.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2011-2017



Sumber: Pengolahan Data BPS Kab. Langkat, 2018

Piramida penduduk Kabupaten Langkat tahun 2017 menunjukkan banyaknya penduduk anak-anak, namun kemiringan yang tajam juga menunjukkan banyaknya penduduk yang mati antara kelas interval usia. Piramida tersebut menunjukkan tingginya angka kelahiran, tingginya angka kematian, serta angka harapan hidup yang rendah.

Gambar 3.4
Piramida Penduduk Kabupaten Langkat Tahun 2017



Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka, 2017

3.3 KARAKTERISTIK KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT

3.3.1 PDRB

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) PDRB Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDRB (HK tahun 2010) mencapai 5,61% dan 5,05% pada tahun 2017. Namun pertumbuhan PDRB tersebut masih dibawah pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan PDRB (HK tahun 2010) Kabupaten Langkat pada tahun 2013-2017 dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.6
Perkembangan pertumbuhan PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan (Hk 2010) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Nasional

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
Kabupaten Langkat	5,61	5,12	5,03	4,98	5,05
Provinsi Sumatera Utara	6,07	5,23	5,10	5,18	5,12

Sumber: Pengolahan Data BPS Kab. Langkat, 2018

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Langkat dalam lima tahun terakhir berdasarkan ADHK 2010 dilihat dari sektor produksi diketahui bahwa SEKTOR Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mempunyai laju pertumbuhan dibawah laju pertumbuhan PDRB, sektor primer lainnya (Pertambangan dan Penggalian) dan sektor industri pengolahan mempunyai laju pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB. Sedangkan sektor-sektor yang lain, rata-rata memiliki laju pertumbuhan diatas laju pertumbuhan rata-rata, terutama sektor Bangunan dan Keuangan.

Tabel 3.7
Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 Kabupaten Langkat

URAIAN	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,71	3,10	3,85	3,62	5,08
Pertambangan & penggalian	5,69	5,91	4,93	5,16	6,24
Industri pengolahan	5,07	4,71	4,91	5,09	3,49
Listrik dan gas	0,59	0,84	4,38	4,99	10,70
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	3,19	0,16	2,86	7,86	5,25
Konstruksi/bangunan	9,55	12,66	6,66	6,84	5,36
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,36	7,01	7,52	8,04	4,80
Transportasi dan pergudangan	7,67	7,21	6,83	6,85	7,81
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,61	6,45	6,06	7,70	7,92
Informasi dan komunikasi	9,19	8,23	8,64	9,53	9,85
Jasa keuangan dan asuransi	9,11	7,78	6,27	6,36	3,98
Real estate	8,13	7,59	4,67	4,46	5,87
Jasa perusahaan	8,67	6,76	6,33	5,96	5,71
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4,54	4,42	7,01	3,59	1,66
Jasa pendidikan	8,04	5,97	5,64	5,33	5,54
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,64	5,00	4,76	4,84	6,67
Jasa lainnya	9,25	10,04	9,13	8,36	7,89
PDRB	5,61	5,12	5,03	4,98	5,05

Sumber: Pengolahan Data BPS Kab. Langkat, 2018

3.3.2 Kemiskinan

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})$. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Konsep kemiskinan yang digunakan dalam data ini adalah konsep kemiskinan absolut dengan memakai ukuran yang biasa digunakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat tahun 2018). Jumlah penduduk miskin Kabupaten Langkat tahun 2017 adalah sebanyak 114.140 jiwa atau 11,15% total penduduk, jumlah penduduk miskin tersebut meningkat dibandingkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 yang mencapai 100.630 jiwa atau 9,99%.

Tabel 3.8
Kemiskinan Kabupaten Langkat 2014-2017

Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	100.63	114.19	115.79	114.41
Persentase	9.99	11.3	11.36	11.15
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	294175	304825	348205	364517
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1.22	1.7	1.78	1.67
Indeks Keparahan Kemiskinan	0.26	0.42	0.41	0.39

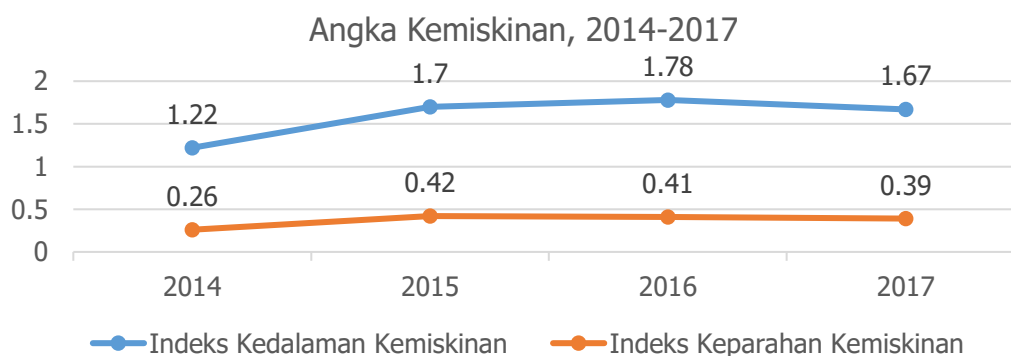
Sumber: BPS Kabupaten Langkat 2017

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Pada periode 2014-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun pada tahun 2017 menurun dibanding tahun 2016. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,22 pada tahun 2014 menjadi 1,67 pada tahun 2017. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,26 pada tahun 2014 menjadi 0,41 pada tahun 2017. Peningkatan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa ada penurunan pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan. Selain itu ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga menjadi semakin besar.

Gambar 3.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan



Sumber: BPS Kabupaten Langkat 2017

3.4 ASPEK LAYANAN UMUM

3.4.1 Sarana Pendidikan

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH Kabupaten Langkat tahun 2014 sebesar 99,02%, menurun menjadi 98,75% pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 98,93%. Angka rata-rata lama sekolah disajikan pada Tabel sebagai berikut.

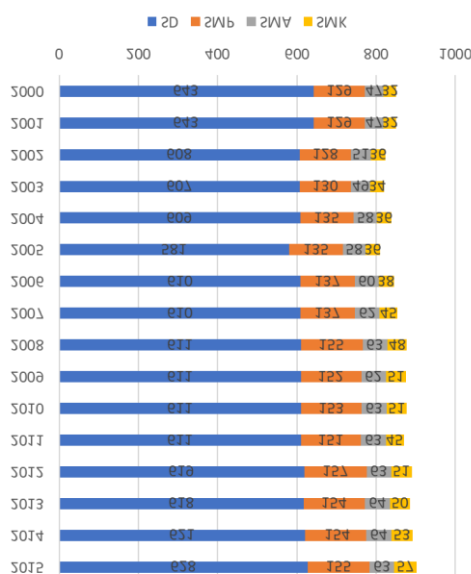
Tabel 3.9
Statistik Pendidikan Kab. Langkat 2017

Uraian	2014	2015	2016
Angka Melek Huruf	99,02	98,75	98,93
Laki-laki	99,28	99,59	99,42
Perempuan	98,77	97,90	98,43
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	7,85	7,92	8,18
Angka Partisipasi Sekolah			
7-12	99,76	99,76	100,00
13-15	94,73	95,38	97,38
16-18	67,87	61,28	68,73

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Langkat 2017

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan data sebelumnya diketahui bahwa APS Kabupaten Langkat untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2014 sebesar 99,76% dan pada tahun 2016 meningkat dan telah mencapai angka 100%. Demikian halnya dengan jenjang pendidikan SMP dimana pada tahun 2014 sebesar 94,73% dan tahun 2016 menjadi 97,38%. Data ini APS ini perlu dicermati bersama, mengingat wajib belajar 9 tahun, untuk tingkat SMP belum sepenuhnya berhasil di Kabupaten Langkat.

Gambar 3.6
Jumlah Fasilitas Pendidikan



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Langkat 2017

3.4.2 Sarana Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Kab. Langkat meningkat setiap tahun didukung pula dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan yang semakin meningkat. Sedangkan jumlah tenaga kesehatan fluktuatif dan jumlah dokter umum semakin menurun.

Tabel 3.10
Statistik Kesehatan Kab. Langkat 2017

Uraian	2014	2015	2016
Penolong Kelahiran (%)			
Dokter	14,28	22,79	39,26
Bidan	83,06	71,43	60,74
Dukun	2,22	4,41	0,00
Famili	0,43	1,37	0,00
Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,33	67,63	67,79
Angka Kesakitan (%)	28,16	13,45	16,55

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Langkat 2017

Tabel 3.11
Fasilitas Kesehatan

Jenis Fasilitas dan Tenaga Kesehatan		Jumlah						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dokter Umum		97	142	177	167	192	158	138
Dokter Gigi		48	55	57	63	61	48	63
Dokter Spesialis		10	2	14	15	14	15	17
Bidan		450	855	924	925	935	935	932
Perawat + Perawat Pembantu		274	260	302	268	255	255	166
Paramedis Non Perawat		133	118	146	145	134	134	134
Akper		147	157	238	239	236	237	297
AKZI, APK, AKPRO, AKFIS		37	32	45	45	39	39	39
Rumah Sakit	Umum	3	2	1	1	1	1	1
	Swasta	2	1	5	6	5	5	5
Puskesmas		28	30	30	30	30	30	30
Puskesmas Pembantu		158	161	164	163	167	171	171
Balai Pengobatan		118	117	102	79	87	93	100
Rumah Bersalin		17	16	15	13	20	27	27
Posyandu		1313	1283	1296	1308	1308	1308	1308

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Langkat 2017

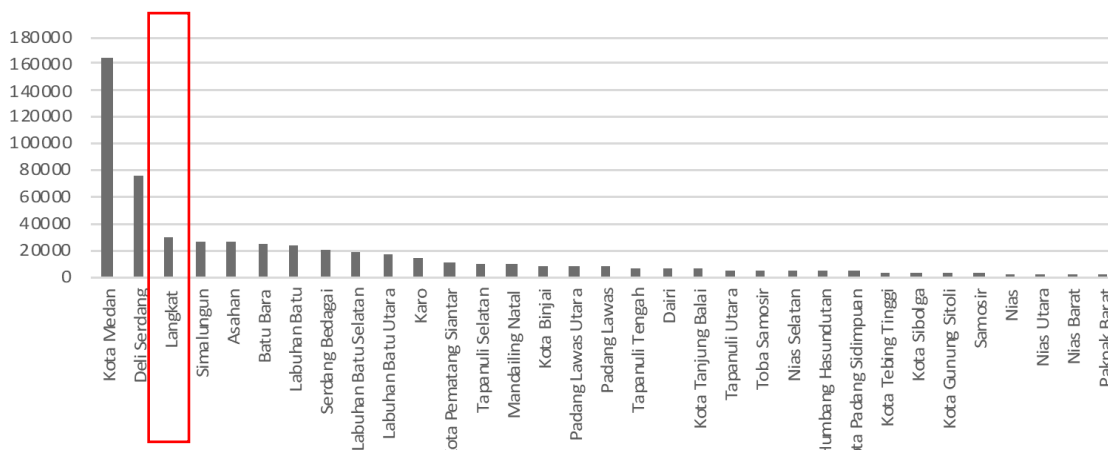
3.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH

3.5.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data Kabupaten Langkat dalam angka, didapatkan bahwa kecenderungan PDRB kabupaten Langkat meningkat dalam tahun 2013-2017 PDRB Kabupaten Langkat ADHB mencapai angka 37.023 milyar rupiah. Angka ADHB tersebut meningkat dari 25,42 milyar pada tahun 2013. Dalam pertumbuhan PDRB 5 tahun terakhir

mengalami kondisi yang cukup meningkat. Berdasarkan data Sumatra dalam angka tahun 2015 didapatkan bahwa kontribusi PDRB Langkat berada di urutan ke-3 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatra Utara.

Gambar 3.7
PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Di Sumatra Utara, 2015



Sumber: Sumatera Utara dalam Angka 2015

Dari keseluruhan poris PDRB tersebut, sektor yang paling unggul adalah Sektor Pertanian. Sektor Pertanian menjadi kontributor utama dengan mencapai 39,42 persen. Kontribusi kedua diberikan oleh sektor industri pengolahan 16,42% Sektor jasa lainnya, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa perusahaan merupaka 3 sektor terendah di Kabupaten Langkat.

3.5.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kabupaten Langkat memiliki jaringan jalan yang relatif baik dan memadai yang dapat menghubungkan kabupaten ini dengan propinsi lain, atau secara rinci: Terletak pada lintasan jalur utama Sumatera Utara Aceh; Tersedianya jalan Nasional yang menghubungkan Kabupaten Langkat dengan Kota Medan; Kondisi jalan di Kabupaten Langkat perlu mendapat perhatian yang serius, karena 48,82 persen jalan kabupaten yang ada dalam keadaan rusak dan rusak berat (693,95 km). Selain angkutan darat, tersedia juga sarana transportasi laut dan udara.

Dari jalur laut secara khusus, Kabupaten Langkat memiliki potensi pelabuhan yang tinggi. Potensi tersebut berada dari kualitas pelabuhan yang ada pada tingkat internasional, nasional, dan regional. Selain itu Kabupaten Langkat juga dilalui jalur pertukaran logistik nasional termasuk alur laut kepulauan Indonesia.

Dari sisi transportasi udara, terdapat dua macam bandara regional. Bandara tersebut memiliki fungsi Bandara tersebut diantaranya Bandara Umum Pusat penyebaran dan bandara umum pusat penyebaran khusus. Masing-masingnya memiliki fungsi untuk penerbangan lokal di regional Kabupaten Langkat dan sekitarnya.

[illegible]

3.5.3 Iklim Berinvestasi

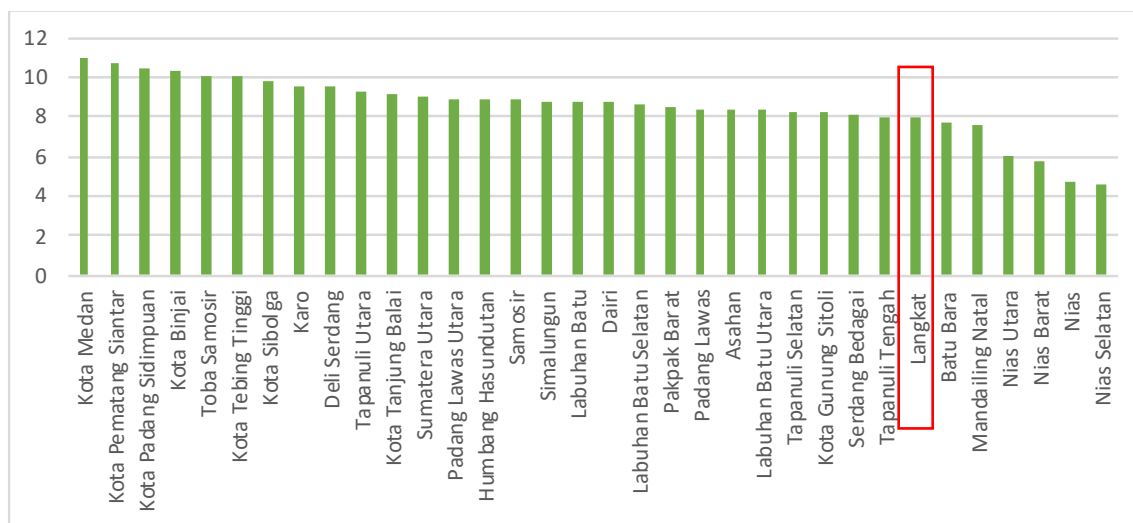
Selain itu dari kawasan sekitar Langkat juga terdapat potensi dari kawasan yang ada. Kabupaten Langkat memiliki perencanaan di tingkat Wilayah perairan dengan dirumuskannya RZWP3K. RZWP3K ini merumuskan potensi dari perairan laut yang dimiliki Kabupaten Langkat. Dalam hal ini Kabupaten Langkat memiliki potensi untuk menjadikan kawasannya dalam tema Minapolitan.

3.5.4 Sumber Daya Manusia

Penyusunan Draft Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Terbuka (TPT). Berdasarkan data BPS Kabupaten Langkat didapatkan bahwa rata-rata lama Sekolah pada Kabupaten Langkat berada pada angka 7.9. Angka tersebut berada pada peringkat ke 28 dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan tergolong cukup rendah karena berada di bawah rata-rata di Sumatera Utara.

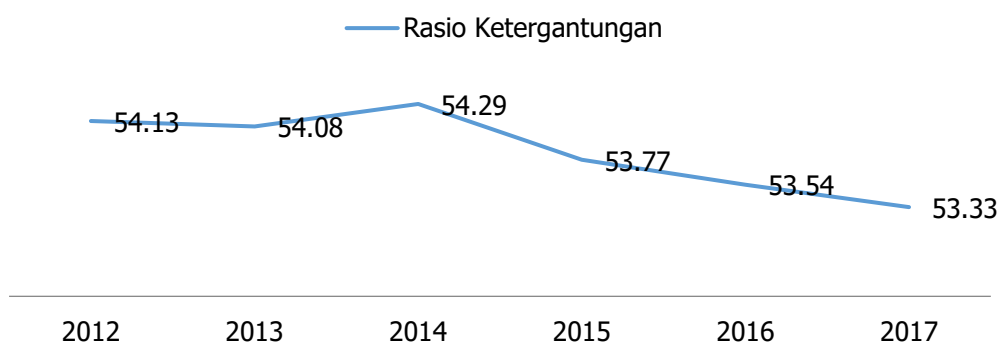
Gambar 3.9
Grafik Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Kabupaten Langkat, 2017

Dari angka Tingkat Pengangguran, Kabupaten Langkat menempati posisi di atas rata-rata Provinsi Sumut. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara angka TPT Kabupaten Langkat berada pada posisi 17 dari 33 Kabupaten. Angka TPT tersebut hanya di bawah Deli Serdang dan Medan.

Gambar 3.10
Grafik Rasio Gini Kabupaten Langkat 2012-2017



Sumber: BPS Kabupaten Langkat, 2013-2018

Pada komponen indikator selanjutnya berdasarkan data Indeks Gini. Indeks ini menunjukkan rasio ketimpangan perekonomian yang ada di Kabupaten Langkat. Berdasarkan data BPS, didapatkan bahwa rasio gini pada kabupaten Langkat relatif menurun dalam 5 tahun terakhir. Rasio paling rendah didapatkan terjadi pada tahun 2017 dengan besar 53.33.

Komponen terakhir dalam aspek Sumber Daya Manusia menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan IPM Kabupaten Langkat bila dibandingkan dengan Provinsi di Sumatera Utara berada di peringkat 17. Peringkat tersebut termasuk menengah diantara rata-rata Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Dengan keseluruhan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Langkat memiliki potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan daya saingnya.

3.6 KONDISI KEUANGAN DAERAH

3.6.1 Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam perencanaan APBD terdapat target pendapatan daerah yang merupakan capaian yang harus diperoleh, sedangkan pada akhir tahun anggaran, diketahui realisasi penerimaan atas pendapatan daerah.

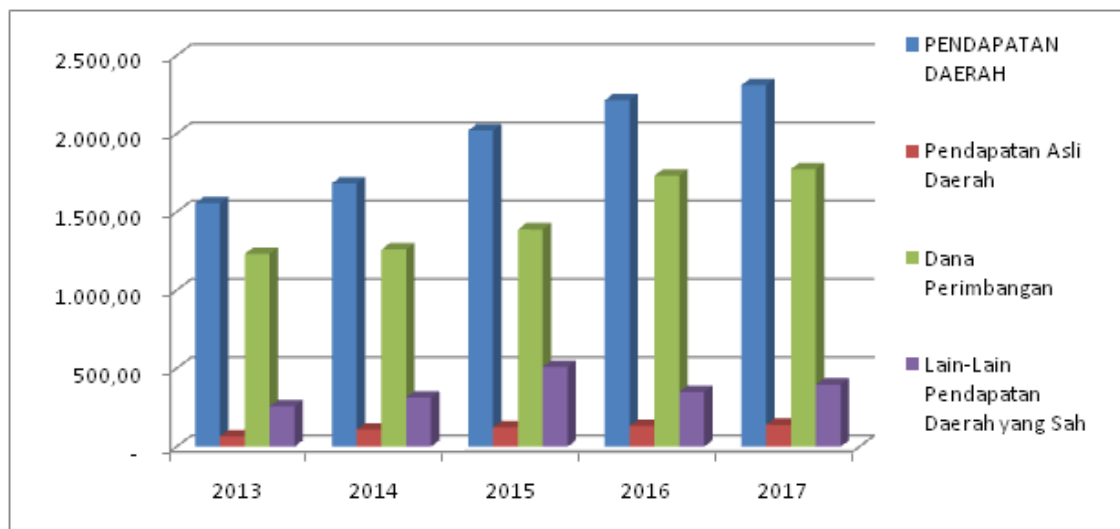
Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

No.	TAHUN	PENDAPATAN DAERAH		% CAPAIAN
		TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1.	2013			
2.	2014	1.623.707.886.136,00	1.682.148.282.104,21	103,60
3.	2015	2.017.699.111.462,00	2.020.688.705.016,79	100,15
4.	2016	2.336.327.100.862,00	2.215.047.135.449,93	94,81
5.	2017	2.348.070.654.167,00	2.311.283.153.445,09	98,43

Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Realisasi pendapatan daerah menunjukkan peningkatan yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,55% per tahun. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada realisasi anggaran tahun 2015, yang meningkat 20,13% dibanding realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan realisasi DAK dan dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Gambar 3.11
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017 (Milyar Rupiah)



Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Tabel 3.13
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.555.901.880.204,41	1.682.148.282.104,21	2.020.688.705.016,79	2.215.047.135.449,93	2.311.283.153.445,09	10,55
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	65.521.499.189,41	107.811.975.547,22	122.715.359.909,79	132.673.213.412,93	139.717.647.855,09	22,95
1.1.1.	Pajak daerah	27.682.021.547,50	37.150.151.469,76	42.304.284.902,54	46.948.822.153,00	56.895.356.836,00	20,06
1.1.2.	Retribusi daerah	23.953.910.248,00	15.433.552.042,00	18.370.307.878,00	19.471.687.021,00	20.786.318.452,00	(0,95)
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	4.637.997.487,00	3.398.214.567,00	5.745.433.350,00	7.996.061.801,00	6.953.913.846,00	17,12
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	9.247.569.906,91	51.830.057.468,45	56.295.333.779,25	58.256.642.437,93	55.100.058.721,09	116,79
1.2.	Dana Perimbangan	1.233.279.204.253,00	1.260.298.417.984,00	1.388.565.543.763,00	1.732.717.434.638,00	1.774.515.682.680,00	9,89
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	169.455.342.253,00	153.484.921.984,00	142.824.909.763,00	165.451.598.228,00	183.357.717.096,00	2,57
1.2.2.	Dana alokasi umum		1.039.650.946.000,00	1.099.486.754.000,00	1.200.481.463.000,00	1.179.392.864.000,00	4,75
1.2.3.	Dana alokasi khusus	982.658.132.000,00	67.162.550.000,00	146.253.880.000,00	366.784.373.420,00	411.765.101.584,00	65,89
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.165.730.000,00	314.037.988.573,00	509.407.801.344,00	349.656.487.399,00	397.049.822.910,00	16,64
1.3.1	Hibah	0	0	0	46.220.073.000,00	107.639.530.000,00	33,22
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	14.203.936.562,00	61.431.548.012,00	100.913.687.544,00	148.530.943.134,00	96.546.469.910,00	102,24
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	172.223.013.000,00	218.641.119.000,00	314.786.659.000,00	0	0	17,73
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	70.670.340.000,00	33.263.631.561,00	26.404.896.800,00	3.876.418.265,00	0	(39,72)
1.3.6	Pendapatan lainnya	3.887.200,00	701.690.000,00	1.730.000,00	0	0	4.462,89
1.3.7	Dana Desa	0	0	67.300.828.000,00	151.029.055.000	192.863.823.000,00	38,03

Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah cenderung menurun dari tahun 2013-2017. Pada tahun 2013, kontribusi dana perimbangan mencapai 79,26% dan pada tahun 2017 turun menjadi 76,78%. Meskipun kontribusi dana perimbangan ini cenderung menurun, namun masih terlalu tinggi dibandingkan kontribusi PAD, dengan demikian belum menunjukkan kemandirian daerah. Selama tahun 2013-2017, kontribusi PAD rata-rata 5,75%. Kontribusi PAD terbesar terjadi pada tahun anggaran 2015 yang mencapai 6,07%.

Tabel 3.14
Kontribusi Kelompok Pendapatan dan Jenis Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	4,21	6,41	6,07	5,99	6,05	5,75
1.1.1.	Pajak daerah	1,78	2,21	2,09	2,12	2,46	2,13
1.1.2.	Retribusi daerah	1,54	0,92	0,91	0,88	0,90	1,03
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,30	0,20	0,28	0,36	0,30	0,29
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	0,59	3,08	2,79	2,63	2,38	2,30
1.2.	Dana Perimbangan	79,26	74,92	68,72	78,22	76,78	75,58
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	10,89	9,12	7,07	7,47	7,93	8,50
1.2.2.	Dana alokasi umum	63,16	61,80	54,41	54,20	51,03	56,92
1.2.3.	Dana alokasi khusus	5,22	3,99	7,24	16,56	17,82	10,16
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,52	18,67	25,21	15,79	17,18	18,67
1.3.1	Hibah	-	-	-	2,09	4,66	1,35
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	0,91	3,65	4,99	6,71	4,18	4,09
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	11,07	13,00	15,58	-	-	7,93
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya	4,54	1,98	1,31	0,18	-	1,60
1.3.6	Pendapatan lainnya	0,00	0,04	0,00	-	-	0,01
1.3.7	Dana Desa	-	-	3,33	6,82	8,34	3,70

Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2013 hingga 2017, angka pertumbuhannya cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 22,95%. Namun kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh rata-rata sebesar 20,06%/tahun dan Retribusi Daerah hanya bertumbuh rata-rata minus 0,95%/tahun. Nilai ini masih tergolong relatif kecil, diperlukan adanya upaya yang lebih kongkrit agar PAD meningkat secara wajar dan proporsional, agar Kabupaten Langkat mampu mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Secara umum besarnya realisasi Dana Perimbangan antara tahun 2013-2017 cenderung meningkat setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,89% pertahun. Pendapatan dari DAK dan DBH Pajak/bukan pajak antara tahun 2013-2017 fluktuatif cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,57% dan 65,18%. Khusus untuk DAK pendapatan ini besaran penerimaannya tergantung dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sehingga dapat dipahami bila pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Langkat terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya dan Dana Desa. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Langkat rata-rata mencapai 18,67% pada tahun 2013-2017. Proporsi ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Selama tahun 2013-2017 bantuan keuangan dari Provinsi terus menurun, tahun 2017 tidak ada lagi

bantuan keuangan dari provinsi. Sementara itu bagi hasil pajak daerah dari provinsi cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir.

3.6.2 Belanja Daerah

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan dari kelompok belanja aparatur dan belanja pelayanan publik berdasar Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja bunga, (c) Belanja Subsidi, (d) Belanja Hibah, (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja (a) Belanja pegawai, (b) Belanja barang dan jasa, dan (c) Belanja modal.

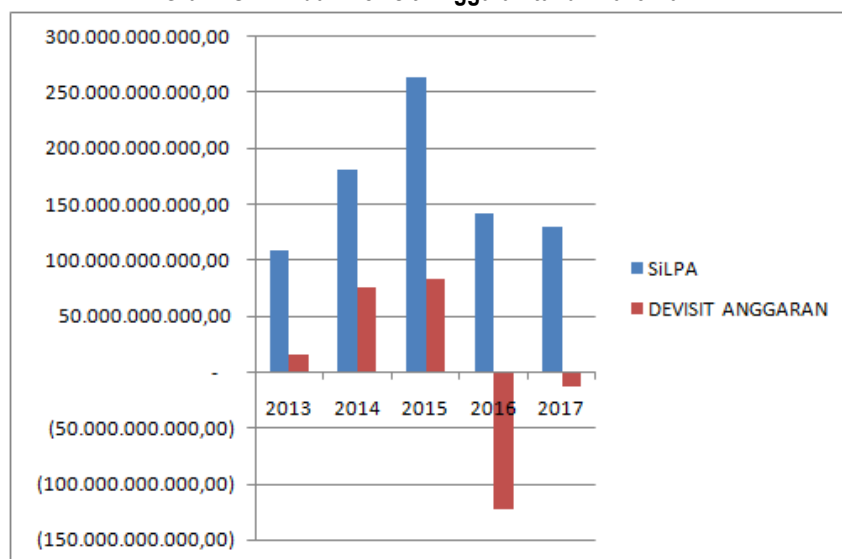
Pada tahun 2017, realisasi belanja Kabupaten Langkat mencapai Rp. 2.320.218.854.855,16. Besaran realisasi belanja ini meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 9,53%/tahun. Walaupun besaran belanja mengalami peningkatan namun proporsi masing-masing pos belanja relatif tidak banyak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai **59,30%**, sedangkan proporsi realisasi Belanja Langsung mencapai **40,70%**.

Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Pada tahun 2017 proporsi realisasi Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja mencapai 43,36%. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah imbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan, serta dengan tingginya proporsi tersebut berakibat mengurangi besaran belanja langsung secara signifikan.

3.6.3 Pembiayaan Daerah

Selama kurun waktu 2013-2017, APBD Kabupaten Langkat terus mengalami surplus anggaran. Meskipun fluktuatif namun cenderung meningkat dan di dua tahun terakhir terjadi devisa riel anggaran. Pada tahun 2013 surplus anggaran mencapai Rp.15.658.251.679,38 kemudian naik menjadi 82.571.887.024,69,- pada tahun 2015, selanjutnya terjadi devisa riel anggaran sebesar Rp. (122.254.402.394,75) pada tahun 2016, serta turun lagi menjadi Rp. (12.435.701.410,07). Guna menutup defisit anggaran, komponen pembiayaan yang digunakan seratus persen (100%) berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Gambar 3.12
Grafik SiLPA dan Devisa Anggaran tahun 2013-2017



Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan
A	Belanja Tidak langsung	996.388.812.722,00	1.052.345.028.779,00	1.186.306.456.071,00	1.357.470.891.120,00	1.375.832.647.101,00	7,64
1	Belanja Pegawai	894.907.472.158,00	989.511.177.482,00	1.059.971.121.439,00	1.057.882.440.632,00	1.006.072.901.544,00	2,72
2	Belanja Hibah	38.441.099.036,00	6.346.710.000,00	3.919.766.000,00	10.139.300.000,00	29.481.615.100,00	-110,16
3	Belanja bantuan Sosial	19.970.090.000,00	14.725.850.000,00	6.286.770.000,00	8.333.150.000,00	6.658.200.000,00	-42,61
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	42.678.451.528,00	41.761.291.297,00	115.718.828.632,00	277.033.927.176,00	329.795.977.832,00	33,99
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	3.246.047.900,00	3.505.085.000,00	7,39
6	Belanja Tidak Terduga	391.700.000,00	-	409.970.000,00	836.025.412,00	318.867.625,00	-37,07
B	Belanja langsung	540.423.115.306,03	552.956.182.685,57	748.637.272.331,10	929.728.966.194,68	944.386.207.754,00	12,36
1	Belanja Pegawai	62.180.218.560,00	60.248.577.694,00	61.207.451.461,00	85.549.203.591,00	114.254.622.156,00	12,98
2	Belanja Barang Dan Jasa	170.030.741.792,60	163.164.810.259,69	190.172.295.468,00	217.884.301.176,82	302.966.883.876,00	12,70
3	Belanja Modal	308.212.154.953,43	329.542.794.731,88	497.257.525.402,10	626.295.461.426,86	527.164.701.722,00	10,50
TOTAL BELANJA		1.536.811.928.028,03	1.605.301.211.464,57	1.934.943.728.402,10	2.287.199.857.314,68	2.320.218.854.855,16	9,53

Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

Tabel 3.16
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Langkat Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.555.901.880.204,41	1.682.148.382.104,21	2.020.688.705.016,79	2.215.047.135.449,93	2.311.283.153.445,09
	Dikurangi realisasi :					
2.	Belanja Daerah	1.536.811.928.028,03	1.605.301.211.464,57	1.934.943.728.402,10	2.287.199.857.314,68	2.320.218.854.855,16
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3.431.700.497,00	1.000.000.000,00	3.173.089.590,00	50.101.680.530,00	3.500.000.000,00
A	Defisit riil	15.658.251.679,38	75.847.170.639,64	82.571.887.024,69	(122.254.402.394,75)	(12.435.701.410,07)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :					
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	93.114.157.887,20	105.479.858.035,58	181.336.445.301,05	263.908.332.325,74	142.794.929.930,99
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	19.800.000,00	9.400.000,00	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	93.133.957.887,20	105.489.258.035,58	181.336.445.301,05	263.908.332.325,74	142.794.929.930,99
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	108.792.209.566,58	181.336.428.675,22	263.908.332.325,74	141.653.929.930,99	130.359.228.520,92

Sumber : LPJ Keuangan Daerah Kab. Langkat 2013-2017

BAB 4 PENGKAJIAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1 PENAPISAN INDIKATOR TPB

Karakteristik geografi adalah karakteristik bentang alam secara fisik. Karakteristik ini dapat dibagi. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai proses penapisan indikator TPB. Proses penapisan ini ditujukan untuk melihat indikator-indikator TPB mana yang relevan dalam RPJMD Kabupaten Langkat. Proses penapisan dilakukan dengan 4 kriteria. Kriteria pertama merupakan ketersediaan data, hal ini sudah banyak diulas pada bagian capaian indikator. Kriteria kedua adalah ketercapaian terhadap sasaran nasional. Kriteria kedua adalah relevansi terhadap isu RPJMD, hal ini dilihat dari keterhubungan indikator dengan isu RPJMD. Terakhir kriteria dari penapisan indikator adalah relevansi terhadap kewenangan otonomi daerah. Berdasarkan kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam penapisan indikator TPB.

4.1.1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Pada 33 indikator pada tujuan 1, didapatkan bahwa 22 indikator dari 33 yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat. Kriteria penapisan selanjutnya ada dari UU 23/2014 melalui kewenangan Kabupaten/kota. Pada kriteria ini didapatkan dari 33 indikator, 21 indikator yang termasuk kewenangan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan ketiga kriteria tersebut didapatkan: 19 indikator direkomendasikan tanpa syarat; dan 14 indikator tidak terpilih.

Tabel 4.1
Penapisan Indikator Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1	mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar Amerika perhari	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	7-8%	Ada	Ada	Ya
2	1	mengurangi setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan semua dimensi	presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan umur		Ada	Ada	Ya
4	2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	Ada	Ada	Ya
	3		presentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	Ada	Ada	Ya
	4		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	Ada	Ada	Ya
	5		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan	100%	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
			berkelanjutan				
	6		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100%	Ada	Ada	Ya
	7		presentase rumah tangga kumuh perkotaan	18.60%	Ada	Ada	Ya
	8		APM SD	94.78%	Ada	Ada	Ya
	9		APM SMP	82.20%	Ada	Ada	Ya
	10		APM SMA	91.63%	Ada	Ada	Ya
	11		Presentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta	77.40%	Ada	Ada	Ya
5	1	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		Ada	Ada	Ya
	3		pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	151ribu	Ada	Ada	Ya
	8		jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana		Ada	Ada	Ya
	9		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		Ada	Ada	Ya

4.1.2 Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tujuan 2 didapatkan bahwa dari keseluruhan indikator terdapat 12 indikator yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat. Kriteria penapisan selanjutnya ada dari UU 23/2014 melalui kewenangan Kabupaten/kota. Pada kriteria ini didapatkan dari 19 indikator, 11 indikator yang termasuk kewenangan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan ketiga kriteria tersebut didapatkan: 11 indikator direkomendasikan tanpa syarat dan 8 indikator tidak terpilih.

Tabel 4.2
Penapisan Indikator Tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Ada	Ada	Ya
	2		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	Tidak Ada	Ada	Ya
	3		Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		Ada	Ada	Ya
	4		Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	8.50%	Ada	Ada	Ya
2	1	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	9.50%	Ada	Ada	Ya

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewe nangan	Indikator Terpilih
	2	anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%%	Ada	Ada	Ya
	3		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe		Ada	Ada	Ya
	4		prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	Ada	Ada	Ya
	5		Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	Ada	Ada	Ya
	6		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 92,5 kg dan konsumsi ikan 54,5 kg	Ada	Ada	Ya
4	1	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ditetapkan	Ada	Ada	Ya

4.1.3 Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada tujuan 4 didapatkan bahwa dari 51 indikator hanya 21 indikator yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat. Kriteria penapisan selanjutnya ada dari UU 23/2014 melalui kewenangan Kabupaten/kota. Pada kriteria ini didapatkan dari keseluruhan indikator, 32 indikator yang termasuk kewenangan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan ketiga kriteria tersebut didapatkan: 19 indikator direkomendasikan tanpa syarat; dan 32 indikator tidak terpilih.

Tabel 4.3
Penapisan Indikator Tujuan 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewe nangan	Indikator Terpilih
1	1	pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	Ada	Ada	Ya
2	1	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka kematian balita 25 per 100	Angka Kematian Balita (AKBa) per 10000 kelahiran hidup	24	Ada	Ada	Ya
	2		Angka Kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		Ada	Ada	Ya
	3		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		Ada	Ada	Ya
	4		Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	0.95	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
5	2	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	85	Ada	Ada	Ya
	3		jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		Ada	Ada	Ya
	4		jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	2010	Ada	Ada	Ya
	5		jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	85	Ada	Ada	Ya
	6		prevalensi penyalahgunaan narkoba	0.0002	Ada	Ada	Ya
	7		konsumsi alkohol oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir		Ada	Ada	Ya
7	1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern		Ada	Ada	Ya
	2		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0.66	Ada	Ada	Ya
	3		angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang secara modern	0.235	Ada	Ada	Ya
	4		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	38	Ada	Ada	Ya
	5		Total fertility rate (TFR)	2.28	Ada	Ada	Ya
8	2	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Unmet Need pelayanan kesehatan	0.0991	Ada	Ada	Ya
	3		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		Ada	Ada	Ya
	4		cakupan jaminan kesehatan nasional	0.95	Ada	Ada	Ya

4.1.4 Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Pada tujuan 4 didapatkan bahwa dari keseluruhan indikator hanya 8 indikator yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat. Kriteria penapisan selanjutnya ada dari UU 23/2014 melalui kewenangan Kabupaten/kota. Pada kriteria ini didapatkan dari 20 indikator, 14 indikator yang termasuk kewenangan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan ketiga kriteria tersebut didapatkan: 6 indikator direkomendasikan tanpa syarat; dan 13 indikator tidak terpilih.

Tabel 4.4
Penapisan Indikator Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika		Ada	Ada	Ya
	2		Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	84.20%	Tidak Ada	Ada	Ya
	5		APK SD/MI	114.09%	Ada	Ada	Ya
	6		APK SMP/MTs	106.94%	Ada	Ada	Ya
	8		Rata-rata lama sekolah penduduk umur >= 15 tahun	8,8 tahun	Ada	Ada	Ya
2	3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	APK PAUD	77.20%	Tidak Ada	Ada	Ya
3	1	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 ahun terakhir menurut jenis kelamin		Ada	Ada	Ya
4	d	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	Presentase guru, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		Ada	Ada	Ya

4.1.5 Tujuan 5: Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Pada tujuan 5 didapatkan bahwa dari keseluruhan indikator terdapat 11 indikator yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat. Kriteria penapisan selanjutnya ada dari UU 23/2014 melalui kewenangan Kabupaten/kota. Pada kriteria ini didapatkan dari 20 indikator, hanya 12 yang termasuk kewenangan kabupaten/kota. Sehingga berdasarkan ketiga kriteria tersebut didapatkan: 11 indikator direkomendasikan tanpa syarat dan 9 indikator tidak terpilih.

Tabel 4.5
Penapisan Indikator Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
2	1	menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam	"menurun"	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
			12 bulan terakhir				
	2		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	"menurun"	Ada	Ada	Ya
	3		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	Ada	Ada	Ya
3	4	menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	APK SMA/SMK/MA	91.63%	Ada	Ada	Ya
6	1	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi		Ada	Ada	Ya
	2		unmet need KB	9.90%	Ada	Ada	Ya
	3		pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	85%	Ada	Ada	Ya
	4		Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Tersedianya regulasi	Ada	Ada	Ya

4.1.6 Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

Dari 40 indikator yang termasuk tujuan 6 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 19 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 19 indikator tersebut juga termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 19 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.6
Penapisan Indikator Tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
6.1	6.1.1.	6.1 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Ada	Ada	Ya
	6.1.1. (a)		6.1.1.a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	Ada	Ada	Ya
	6.1.1. (b)		6.1.1.b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku	118,6 m3/det penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Ada	Ada	Ya

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewe nangan	Indikator Terpilih
			untuk pulau-pulau.				
	6.1.1. (c)		6.1.1.c. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	Ada	Ada	Ya
6.2.	6.2.1. (a)	6.2. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.a. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	6.2.1. (b)		6.2.1.b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	Ada	Ada	Ya
	6.2.1. (c)		6.2.1.c. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45.000 desa/kelurahan	Ada	Ada	Ya
	6.2.1. (d)		6.2.1.d. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	6.2.1. (e)		6.2.1.e. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	438 kabupaten/kota.	Tidak	Ada	Ya
	6.2.1. (f)		6.2.1.f. Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat.	*target belum ada di perpres	Tidak	Ada	Ya
6.3	6.3.1.	6.3. meningkatkan kualitas air dengan	6.3.1. Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Tidak	Ada	Ya
	6.3.1. (a)	mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya,	6.3.1.a. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	409 kabupaten/kota	Tidak	Ada	Ya
	6.3.1. (b)	mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.b. Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.	*target belum ada di perpres	Tidak	Ada	Ya
	6.3.2. (a)		6.3.2.a. Kualitas air danau.	membaihnya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai	Ada	Ada	Ya
	6.3.2. (b)		6.3.2.b. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Ada	Ada	Ya
6.4	6.4.1. (b)	6.4. Secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan	6.4.1.b. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
		untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.		agriculture).			
6.5	6.5.1. (a)	6.5. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.a. Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 Rencana	Ada	Ada	Ya
	6.5.1. (c)		6.5.1.c. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	stasiun di 8 Wilayah Sungai	Ada	Ada	Ya
	6.5.1. (f)		6.5.1.f. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 Wilayah Sungai	Ada	Ada	Ya

4.1.7 Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Dari 9 indikator yang termasuk tujuan 7 Pembangunan berkelanjutan, hanya terdapat 2 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. Namun 2 indikator tersebut tidak termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan tersebut tidak ada indikator yang dipilih.

4.1.8 Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Terdapat 28 indikator yang termasuk tujuan 8 Pembangunan berkelanjutan, 19 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 11 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 11 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.7
Penapisan Indikator Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
8.1	8.1.1*	8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1. * Laju pertumbuhan PDB per kapita.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	8.1.1. (a)		8.1.1.a. PDB per kapita.	> lebih dari Rp 50 juta	Ada	Ada	Ya
8.2	8.2.1*	8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1. * Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	meningkat	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
8.3	8.3.1*	8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1. *Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	8.3.1. (a)		8.3.1.a. Persentase tenaga kerja formal.	51%	Ada	Ada	Ya
	8.3.1. (b)		8.3.1.b. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	8.3.1. (c)		8.3.1.c. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Ada	Ada	Ya
8.5	8.5.1*	8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1. * Upah rata-rata per jam pekerja. (UMR)	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya

4.1.9 Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Dari 22 indikator yang termasuk tujuan 9 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 14 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 9 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 9 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.8
Penapisan Indikator Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
9.1	9.1.2.(b)	9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.b. Jumlah dermaga penyeberangan.	275	Ada	Ada	Ya
	9.1.2.(c)		9.1.2.c. Jumlah pelabuhan strategis.	24	Ada	Ada	Ya
9.2	9.2.1*	9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1. *Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.60%	Ada	Ada	Ya
	9.2.1. (a)		9.2.1.a. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	8.60%	Ada	Ada	Ya
	9.2.2*		9.2.2. *Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
9.3	9.3.1*	9.3. Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1. * Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	9.3.2*		9.3.2. * Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewe nangan	Indikator Terpilih
9.5	9.5.1*	9.5. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.	9.5.1. * Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya

4.1.10 Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Dari 23 indikator yang termasuk tujuan 10 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 19 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 9 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 9 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.9
Penapisan Indikator Tujuan 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewe nangan	Indikator Terpilih
10.1	10.1.1*	10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1. * Koefisien Gini.	0.36	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(a)		10.1.1.a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(b)		10.1.1.b. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(c)		10.1.1.c. Jumlah desa tertinggal.	berkurang sebanyak 5.000 desa	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(d)		10.1.1.d. Jumlah Desa Mandiri.	meningkat 2.000 desa	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(e)		10.1.1.e. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	10.1.1.(f)		10.1.1.f. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	14%	Ada	Ada	Ya
10.2	10.2.1*	10.2. Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1. * Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya

4.1.11 Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Dari 33 indikator yang termasuk tujuan 11 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 12 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 8 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 8 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.10
Penapisan Indikator Tujuan 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
11.1	11.1.1.(a)	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta	Ada	Ada	Ya
11.2	11.2.1.(a)	11.2. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1.a. Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	32%	Ada	Ada	Ya
11.5	11.5.1*	11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. * Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	*target belum ada di perpres	Ada	ada	Ya
	11.5.1.(a)		11.5.1.a. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun hingga 30%	Ada	Ada	Ya
	11.5.1.(c)		11.5.1.c. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ada	Ada	Ya
	11.5.2.(a)		11.5.2.a. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya
11.6	11.6.1.(a)	11.6. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.a. Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	80%	Ada	Ada	Ya
11.b	11.b.2*	11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang	11.b.2. * Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	*target belum ada di perpres	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
		penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.					

4.1.12 Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dari 19 indikator yang termasuk tujuan 2 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 5 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 1 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 1 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.11
Penapisan Indikator Tujuan 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
4	2a	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Ada	Ada	Ya
5	1a	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari	Ada	Ada	Ya
6	1a	Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Ada	Ada	Ya
7	1a	Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Ada	Ada	Ya

4.1.13 Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Dari 8 indikator yang termasuk tujuan 13 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 2 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 2 indikator tersebut termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 2 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.12
Penapisan Indikator Tujuan 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1*	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	terdapat strategi pengurangan risiko bencana hingga tahun 2019 sehingga indeks risiko bencana daerah berkurang	Ada	Ada	Ya
	2*		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Ada	Ada	Ya

4.1.14 Tujuan 14: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dari 15 indikator yang termasuk tujuan 14 Pembangunan berkelanjutan, tidak terdapat indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. Urusan terkait Sumberdaya kelautan dan Samudera berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Sehingga tidak ada indikator yang dipilih dari tujuan 14 pembangunan berkelanjutan ini.

4.1.15 Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Dari 25 indikator yang termasuk tujuan 15 Pembangunan berkelanjutan, hanya terdapat 3 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. Namun tidak ada indikator tersebut yang termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut tidak ada indikator yang dipilih untuk dianalisis.

Tabel 4.13
Penapisan Indikator Tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1a	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	peningkatan tutupan lahan hutan	Tidak ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
3	1a	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	*sasaran nasional tidak sesuai dengan indikator 5,5 juta hektar	Tidak ada	Ada	Ya
9	1a	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Tidak ada	Ada	Ya

4.1.16 Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Dari 52 indikator yang termasuk tujuan 16 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 21 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 12 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 12 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.14
Penapisan Indikator Tujuan 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1a	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Tidak	Ada	Ya
	3a		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Tidak	Ada	Ya
2	1a	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	Tidak	Ada	Ya
2	1b		Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	Tidak	Ada	Ya
	3a		Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Tidak	Ada	Ya
5	1a		Indeks Pelaku Anti Korupsi (IPAK) *diganti menjadi jumlah kasus korupsi dalam 1 tahun	4 *diganti jadi 0	Ada	Ada	Ya
6	1*	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Ada	Ada	Ya
6	1a		Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan	kabupaten: 60%	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
			Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)				
	1b		Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	kabupaten: 50%	Ada	Ada	Ya
	1c		Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	kabupaten: 80%	Tidak	Ada	Ya
	1d		Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	kabupaten: 45%	Ada	Ada	Ya
	2a		Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	kabupaten: 80%	Ada	Ada	Ya
7	1a	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat dari 16,6% pada 2014	Tidak	Ada	Ya
	1b		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Tidak	Ada	Ya
9	1*	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	0.774	Ada	Ada	Ya
	1a		Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Ada	Ada	Ya
	1b		Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0.85	Ada	Ada	Ya
10	2c	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Tidak	Ada	Ya

4.1.17 Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dari 47 indikator yang termasuk tujuan 17 Pembangunan berkelanjutan, terdapat 16 indikator yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan UU 23/2014. 12 indikator diantaranya termasuk dalam isu RPJMD di Kabupaten Langkat 2019-2024. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut didapatkan: 12 indikator yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 4.15
Penapisan Indikator Tujuan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
1	1*	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Ada	Ada	Ya
	1a		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	>12% per tahun	Ada	Ada	Ya
	2*		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Ada	Ada	Ya
6	2b	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	-perkotaan (20 megabyte/detik) menjangkau 71% rumah tangga atau 30% populasi -perdesaan (10 megabyte/detik) menjangkau 49% rumah tangga atau 6% populasi	Tidak	Ada	Ya
	2c		Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	dengan kecepatan 1 megabyte/detik menjangkau - perkotaan 100% populasi - perdesaan 52% populasi	Tidak	Ada	Ya
8	1*	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Proporsi individu yang menggunakan internet.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Tidak	Ada	Ya
17	1a	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Ada	Ada	Ya
18	1a	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Ada	Ada	Ya
	1b		Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Ada	Ada	Ya
	1c		Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRuSa).	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Ada	Ada	Ya
19	2b	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	*target tidak ada di perpres	Ada	Ada	Ya
	2c		Jumlah pengunjung	*target tidak ada di	Ada	Ada	Ya

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Isu RPJMD	Kewenangan	Indikator Terpilih
		Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	perpres			
	2d		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	*target tidak ada di perpres	Ada	Ada	Ya
1	1*	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Ada	Ada	Ya

4.2 ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

Tujuan identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan adalah:

1. menentukan secara tepat pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan KLHS;
2. menjamin diterapkannya azas partisipasi yang diamanatkan UU PPLH;
3. menjamin bahwa hasil perencanaan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program memperoleh legitimasi atau penerimaan oleh publik;
4. agar masyarakat dan pemangku kepentingan mendapatkan akses untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan pertimbangan tentang pembangunan berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan KLHS.

Identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang representatif dapat diawali dengan pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan ini untuk membantu pemilihan pemangku kepentingan yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang akan dirumuskan serta peduli terhadap lingkungan hidup. Hasil dari identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16
Identifikasi Pemangku Kepentingan KLHS RPJMD Kabupaten Langkat

Kelompok	Lembaga/Institusi/Aktor yang Terlibat	Peran
Pembuat Keputusan	DPRD Kabupaten Langkat	Menetapkan Perda RPJMD Kabupaten Langkat
	Bupati Kabupaten Langkat	Melakukan pembahasan Ranperda RPJMD Kabupaten Langkat
Penyusun kebijakan, rencana dan/atau program	Bappeda Kab. Langkat	Menyusun Materi Teknis dan Ranperda RPJMD Kabupaten Langkat
	Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap Kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Langkat • Melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Langkat
	Badan (SKPD) di Kabupaten Langkat	
	Dinas Teknis di Kabupaten Langkat	
	12 Camat di Kab. Langkat	
Masyarakat	Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, Tokoh Masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap Kebijakan, rencana, dan/atau program RPJMD Kabupaten Langkat • Melakukan pembahasan dan memberikan masukan terhadap penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Langkat • Memberikan dukungan dalam pelaksanaan

Kelompok	Lembaga/Institusi/Aktor yang Terlibat	Peran
		upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan tujuan pembangunan berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2018

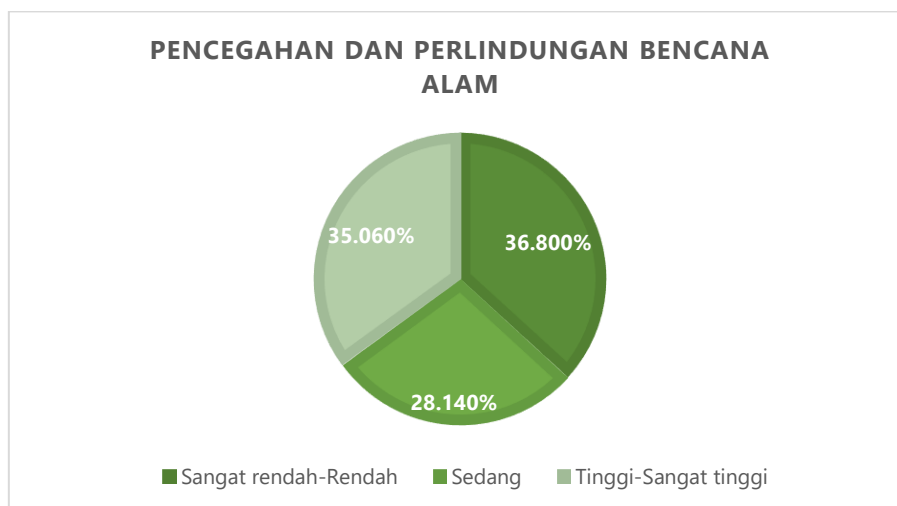
4.3 ANALISIS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bagian ini akan dievaluasi mengenai aspek daya dukung daya tampung lingkungan hidup pada masing-masing indikator. Analisis ini dilakukan ada indikator yang memiliki dampak langsung terhadap jasa ekosistem yang sesuai dengan indikator tersebut. Indikator yang dimaksud ada pada tujuan 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 14, dan 15.

4.3.1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Pada tujuan 1 didapatkan indikator yang terpengaruh berhubungan dengan kebencanaan. Jasa Ekosistem yang dipengaruhi dari indikator tersebut adalah fungsi pengatur dengan jenis jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana. Terdapat 2 indikator yang dipengaruhi. Pada analisis luasan jasa ekosistem tersebut didapatkan bahwa 36,80% memiliki jasa ekosistem pada klasifikasi sangat rendah-rendah. Luas klasifikasi sangat rendah-rendah tersebut adalah sebesar 227,173.79 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak dapat menunjang pencapaian indikator. Sehingga, jasa ekosistem perlindungan bencana alam membutuhkan pengendalian dan penguatan kembali terhadap luasan lahannya sehingga minimal daya dukung dan daya tampungnya meningkat.

Gambar 4.1
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 1

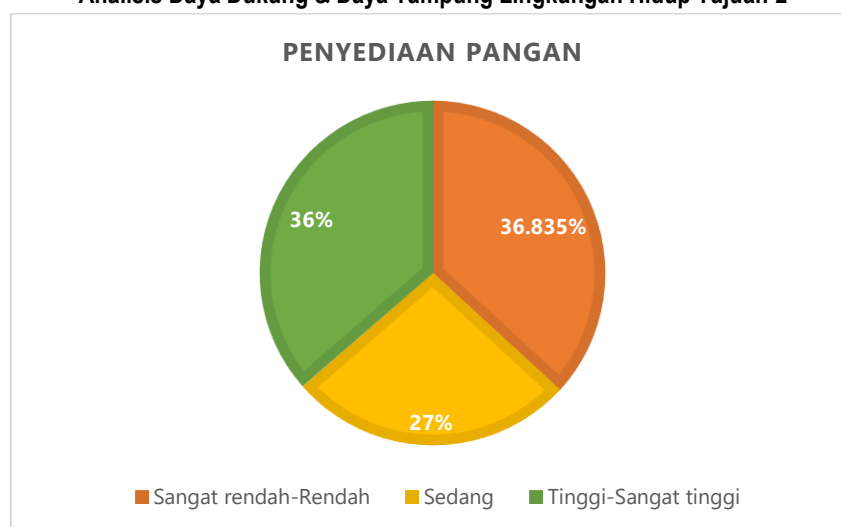


Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.2 Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tujuan 2 didapatkan indikator yang terpengaruh berhubungan dengan pangan. Jasa Ekosistem yang dipengaruhi dari indikator tersebut adalah memiliki fungsi Penyediaan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan. Terdapat 4 indikator yang dipengaruhi. Pada hasil tersebut didapatkan bahwa luas lahan yang memiliki jasa ekosistem dengan fungsi sangat rendah-rendah terdapat 36,83% dengan luas 227,398.21 Ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak dapat menunjang pencapaian indikator. Sehingga, jasa ekosistem penyediaan pangan membutuhkan pengendalian dan penguatan kembali terhadap luasan lahannya sehingga minimal daya dukung dan daya tampungnya meningkat.

Gambar 4.2
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 2



Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.3 Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

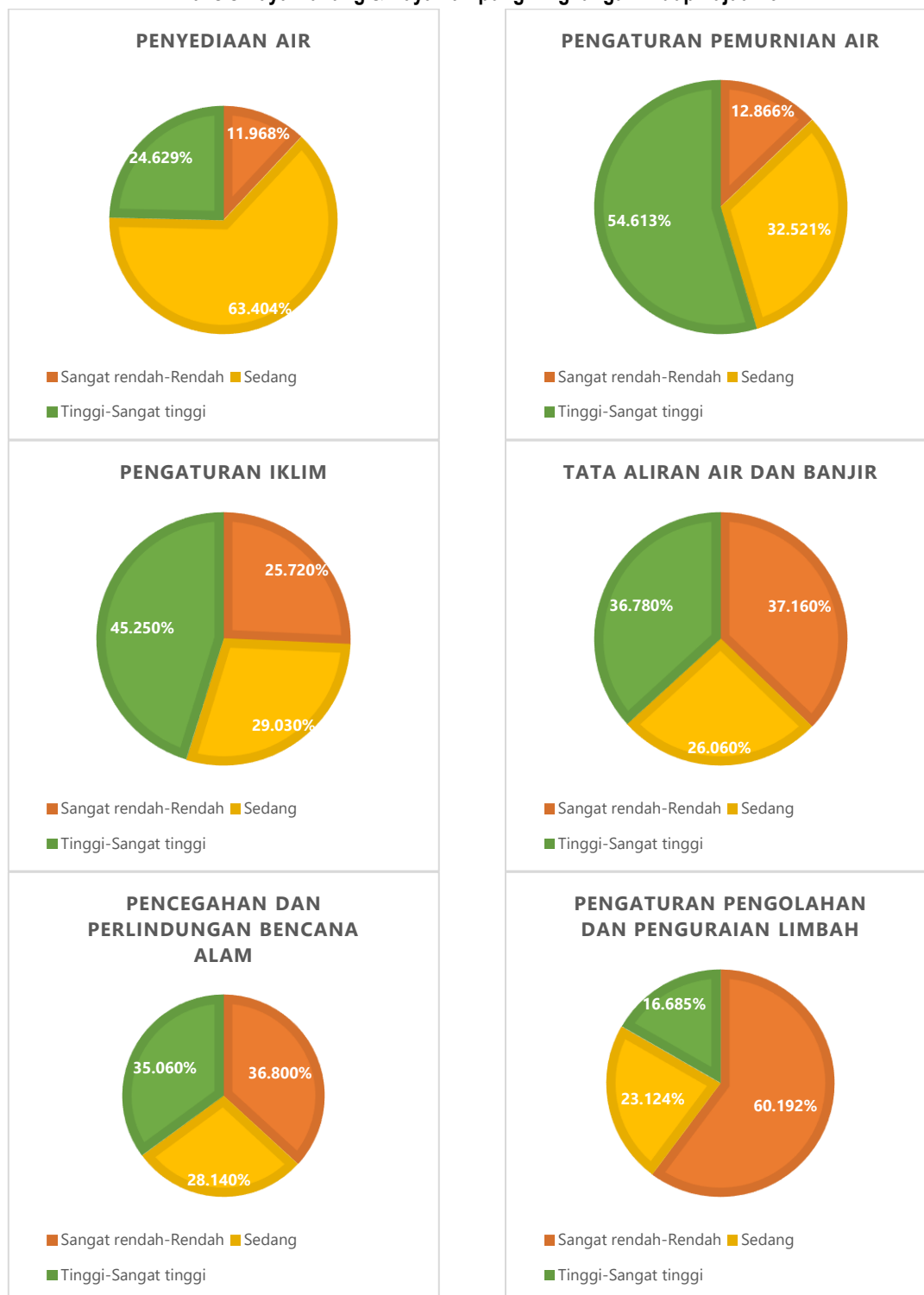
Pada tujuan 6 didapatkan beberapa indikator pada semua target yang terpilih terkait dengan jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jasa ekosistem yang terkait yaitu penyediaan air bersih, pengaturan permukiman air, Pengaturan Pengolahan dan penguraian limbah, Tata Aliran Air dan Banjir, Pencegahan dan Perlindungan dari bencana alam dan Pengaturan iklim. Jasa Ekosistem yang dipengaruhi dari indikator tersebut dengan fungsi Penyediaan dan pengaturan.

Jasa ekosistem penyediaan air bersih, pengaturan permukiman air dan pengaturan iklim dinilai dapat memenuhi untuk mencapai indikator tersebut. Hal ini dinilai dari proporsi luasan klasifikasi masing-masing jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut. Jasa ekosistem penyediaan air bersih memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sedang sebanyak 63,40% seluas 391,417.61 Ha. Jasa ekosistem pengaturan permukiman air memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi-sangat tinggi sebanyak 54.61% seluas 337,148.88 Ha. Jasa ekosistem pengaturan iklim memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi-sangat tinggi sebanyak 45.25% seluas 279,332.62 Ha.

Sementara itu untuk jasa ekosistem lainnya, yaitu tata aliran air dan banjir, perlindungan bencana alam dan pengolahan penguraian limbah dinilai belum memenuhi untuk mencapai indikator tersebut. Hal ini dinilai dari proporsi luasan klasifikasi masing-masing jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut yang masih rendah. Jasa ekosistem tata aliran air dan banjir memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya

tampung sangat rendah-rendah sebanyak 37.16% seluas 229,379.95 Ha. Jasa ekosistem perlindungan bencana alam memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sangat rendah-rendah sebanyak 36.80% seluas 227,173.79 Ha. Jasa ekosistem pengolahan penguraian limbah memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sangat rendah-rendah sebanyak 60.19% seluas 371,588.77 Ha.

Gambar 4.3
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 6



Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.4 Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Pada tujuan 9 didapatkan beberapa indikator yang terkait dengan jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jasa ekosistem yang terkait yaitu Pengaturan Iklim dan Pemeliharaan Kualitas Udara. Jasa Ekosistem yang dipengaruhi dari indikator tersebut adalah memiliki fungsi Pengaturan. Dari keseluruhan indikator terdapat 2 indikator yang dipengaruhi, namun indikator tersebut tidak terpilih pada saat penapisan, sehingga tidak ada indikator terpilih yang dipengaruhi DDDTLH.

4.3.5 Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Pada tujuan 11 didapatkan beberapa indikator yang terkait dengan jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jasa ekosistem yang terkait yaitu Pemeliharaan Kualitas Udara; Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam; dan Pengaturan dan Pengolahan dan Penguraian Limbah. Jasa Ekosistem yang dipengaruhi dari indikator tersebut adalah memiliki fungsi Pengaturan.

Terdapat 9 indikator yang dipengaruhi. Pada hasil jasa ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam diketahui memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sangat rendah-rendah sebanyak 36.80% seluas 227,173.79 Ha. Jasa ekosistem pengolahan penguraian limbah memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sangat rendah-rendah sebanyak 60.19% seluas 371,588.77 Ha. Serta pada jasa ekosistem pemeliharaan kualitas udara proporsi paling besar ada di klasifikasi sangat rendah – rendah yang mencapai 36.32% seluas 224,238.23 Ha.

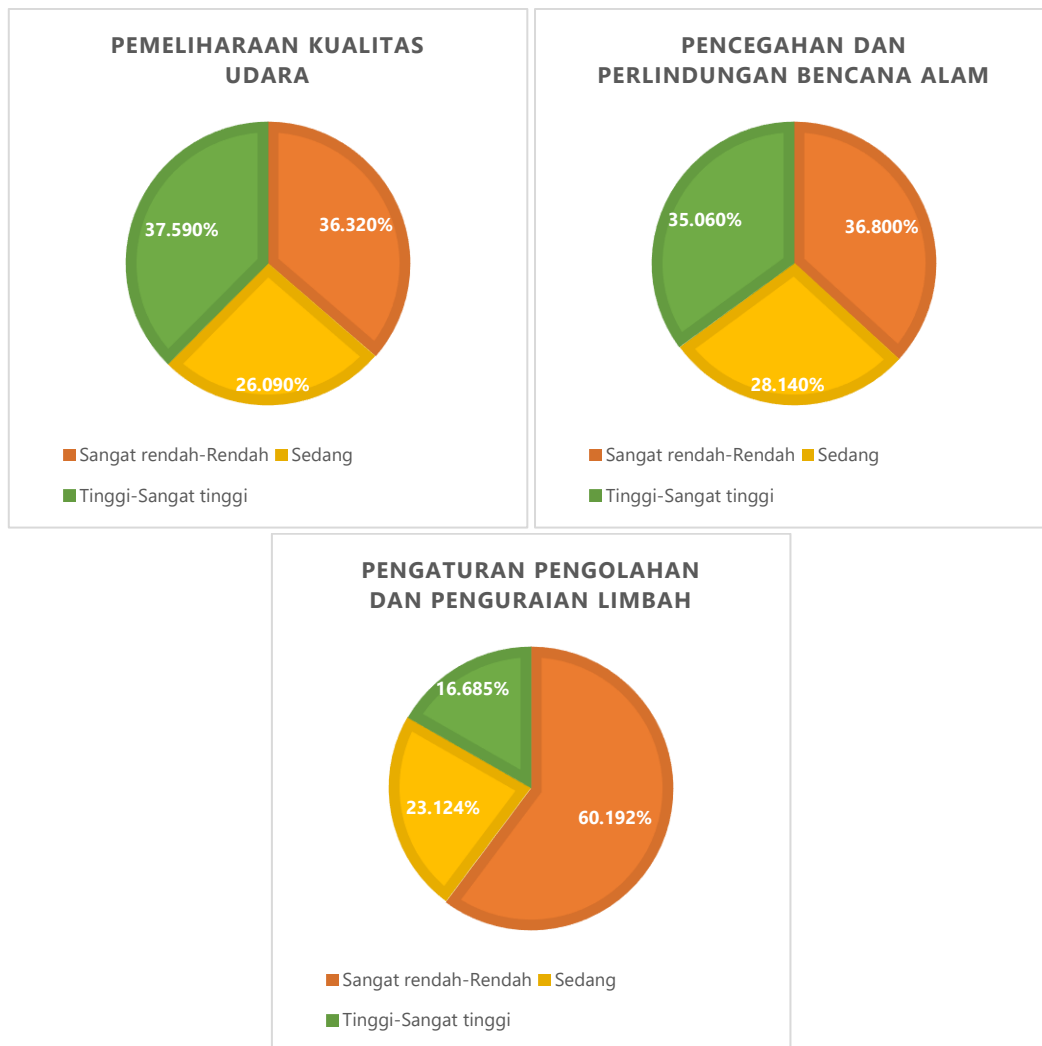
Oleh karena itu, pada jasa ekosistem pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam; Pengaturan dan Pengolahan dan Penguraian Limbah; dan Pemeliharaan Kualitas Udara masing-masing dinilai belum dapat memenuhi untuk mencapai indikator tersebut. Sehingga membutuhkan pengendalian dan penguatan kembali terhadap luasan lahannya sehingga minimal daya dukung dan daya tampungnya meningkat.

4.3.6 Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Dalam tujuan ini hanya terdapat satu jenis jasa yang terlibat, yakni jasa pengaturan. Subjasa pengaturan tersebut adalah pengaturan pengolahan dan penguraian limbah. Dari analisis daya dukung dan daya tampung, diketahui persentase luas wilayah yang daya dukung dan daya tampung jasanya sangat rendah dan rendah mencapai 60.19% atau seluas 371,588.77 Ha.

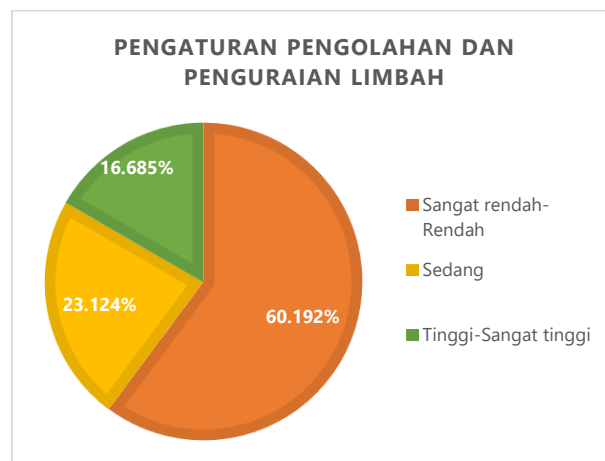
Dengan demikian, lebih dari setengah wilayah kabupaten Langkat adalah wilayah yang tidak memiliki daya dukung dan daya tampung pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang cukup. Dengan demikian dinyatakan bahwa jasa tersebut tidak mencapai kriteria dukungan yang diperlukan.

Gambar 4.4
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 11



Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 4.5
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 12

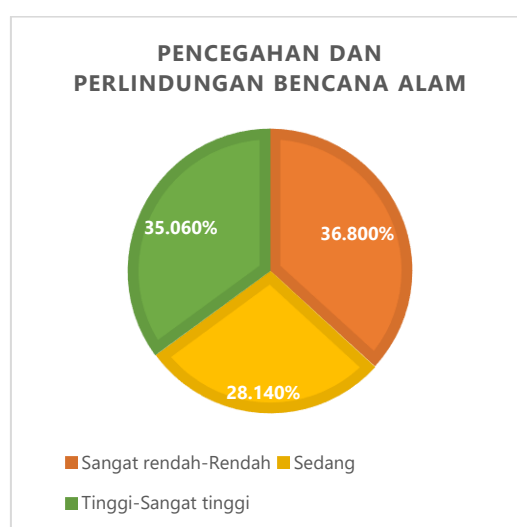


Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.7 Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Dalam tujuan ini juga hanya terdapat satu jenis jasa yang dianalisis, yakni jasa pengaturan. Subjasa pengaturan tersebut adalah pencegahan dan perlindungan dari bencana alam. Pada hasil jasa ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam diketahui memiliki proporsi lahan dengan daya dukung dan daya tampung sangat rendah-rendah sebanyak 36.80% seluas 227,173.79 Ha. Dengan demikian, kabupaten Langkat memiliki luas wilayah yang tingkat jasanya belum mencukupi dukungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam karena dominasi wilayah yang luasnya berkategori sangat rendah-rendah.

Gambar 4.6
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 13

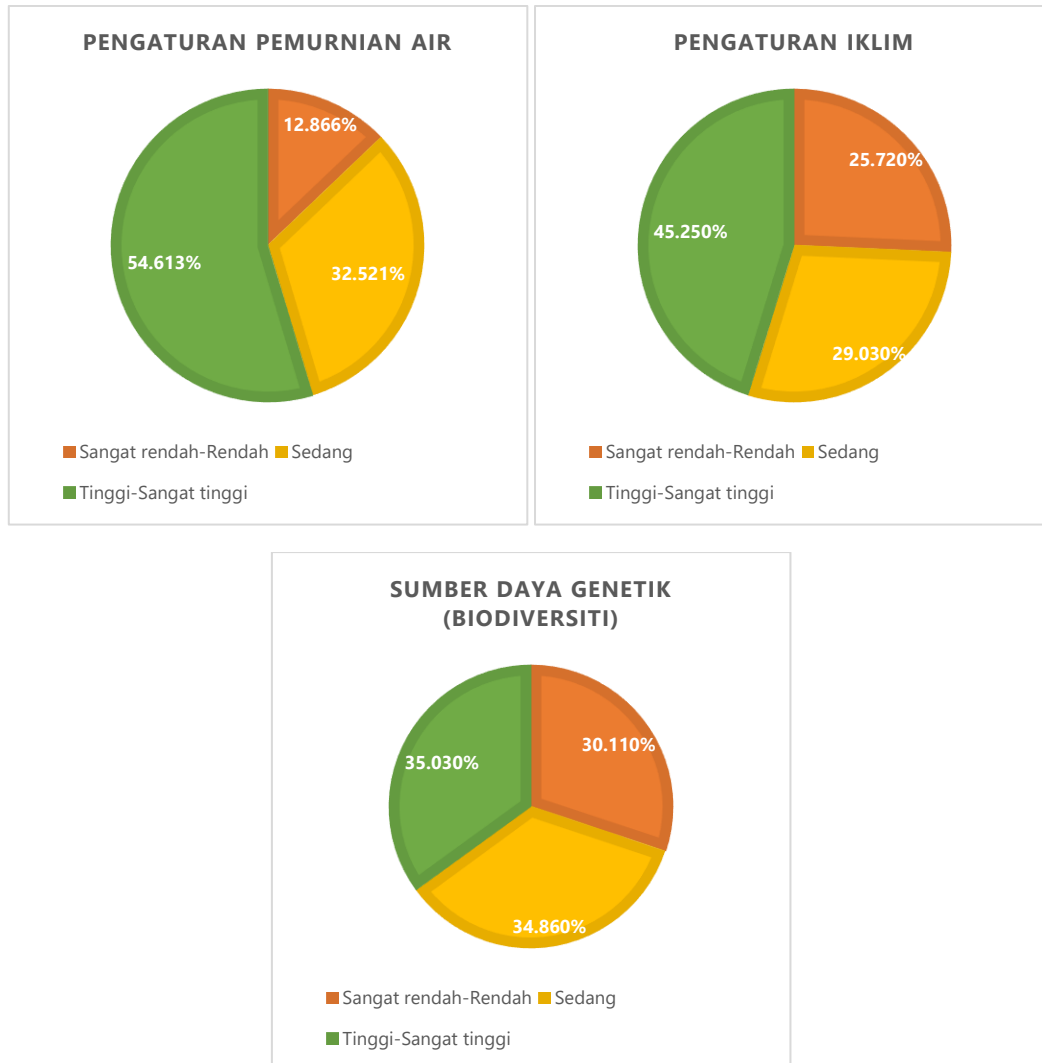


Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.3.8 Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Terdapat tiga subjasa yang terlibat dalam tujuan ini: pengaturan iklim & tata aliran air dan banjir, pemurnian air, dan sumber daya genetik/biodiversiti. Seluruhnya termasuk ke dalam jasa ekosistem pengaturan. Ketiga subjasa tersebut memiliki angka persentase luas yang termasuk kategori tinggi-sangat tinggi yang besar sehingga dapat dikatakan mendukung pengaturan iklim, tata aliran air serta pemurniannya, dan keanekaragaman hayatinya.

Gambar 4.7
Analisis Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup Tujuan 15



Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.4 REKAPITULASI PENAPISAN INDIKATOR TPB

Berdasarkan hasil penapisan yang sudah dilakukan didapatkan bahwa tidak semua indikator yang ada permendagri 7/2018 termasuk dalam indikator yang terpilih. Secara keseluruhan indikator yang terpilih bagi Kabupaten Langkat adalah 156 indikator dari total 473 indikator pada Permendagri 7/2018.

Tabel 4.17
Rekapitulasi Penapisan Indikator TPB Kabupaten Langkat

Nomor Tujuan	Total Jumlah Indikator Tujuan	Hasil Penapisan			Total Jumlah Indikator Dipilih	Total Indikator Terkait DDDTLH	Indikator Terpilih	
		Terdapat Kewenangan Kabupaten dan Isu RPJMD	Terdapat Kewenangan Pemerintah Kabupaten	Tidak dipilih			Tidak Terkait DDDTLH	Terkait DDDTLH
1	33	18	21	5	16	5	14	2
2	19	10	11	0	11	4	7	4
3	51	19	32	13	19	0	19	0
4	23	6	14	6	8	0	8	0
5	20	8	12	4	8	0	8	0
6	40	14	19	0	19	23	4	15
7	9	0	0	0	0	0	0	0
8	28	11	11	0	11	0	11	0
9	22	9	13	6	8	2	8	0
10	23	8	11	11	8	0	8	0
11	33	8	12	4	8	9	1	7
12	19	5	5	1	4	4	3	1
13	8	2	2	0	2	3	0	2
14	15	0	0	0	0	1	0	0
15	25	0	3	0	3	7	0	3
16	52	9	20	3	18	0	18	0
17	47	10	16	3	13	0	13	0
TOTAL	467	137	202	56	156	58	122	34

Sumber: Hasil Analisis, 2018

4.5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai proses penapisan indikator TPB. Proses penapisan ini ditujukan untuk melihat indikator-indikator TPB mana yang relevan dalam RPJMD Kabupaten Langkat. Proses penapisan dilakukan dengan 4 kriteria. Kriteria pertama merupakan ketersediaan data, hal ini sudah banyak diulas pada bagian capaian indikator. Kriteria kedua adalah ketercapaian terhadap sasaran nasional. Kriteria kedua adalah relevansi terhadap isu RPJMD, hal ini dilihat dari keterhubungan indikator dengan isu RPJMD. Terakhir kriteria dari penapisan indikator adalah relevansi terhadap kewenangan otonomi daerah. Berdasarkan kriteria tersebut menjadi pertimbangan dalam penapisan indikator TPB.

4.5.1 Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Dari tujuan 1 didapatkan bahwa terdapat 18 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 3 indikator tidak memiliki data capaian. Selain itu, 11 indikator belum mencapai sasaran nasional. Tersisa, 4 indikator yang mencapai sasaran nasional. Sasaran tersebut adalah presentase perempuan pernah kawin yang melahirkan di fasilitas kesehatan, presentase umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar, prevalensi penggunaan CPR pada PUS, dan APM SD.

Tabel 4.18
Capaian Tujuan 1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1	mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar Amerika sehari	Tingkat Kemiskinan Ekstrim	7-8%	9.99	11.3	11.36	11.41	(-) 3%	Tidak Tercapai
2	1	mengurangi setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan semua dimensi	presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan umur		9.99%	11.30%	11.36%	11.15%	?	Tidak Ada Target
4	2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	70%	81.08	90.05	92.49	98.49	(+) 28.49	Tercapai
	3		presentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	63%	87.48	86.95	91.37	92.54	(+) 29.54%	Tercapai
	4		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	65%	68.08	68.33	69.5	68.72	(+) 2%	Tercapai
	5		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	100%	n/a	n/a	35.37	5.94	(-) 95	Tidak Tercapai
	6		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	100%	n/a	n/a	79.71	81.94	(-) 19	Tidak Tercapai
	7		presentase rumah tangga kumuh perkotaan	18.60%	n/a	n/a	n/a	0.01%	(+) 16,8%	Tercapai

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
	8		APM SD	94.78%	96.98	94.2	94.2	97.28	(+) 3%	Tercapai
	9		APM SMP	82.20%	70.89	78.05	78.05	77.49	(-) 5%	Tidak Tercapai
	10		APM SMA	91.63%	58.57	52.76	52.76	63.22	(-) 28%	Tidak Tercapai
	11		Presentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta	77.40%	n/a	n/a	n/a	68.34	(-) 9%	Tidak Tercapai
5	1	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		0	1	0	0		Tercapai
	3		pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	151 ribu	56	176	196	160	?	Tidak Ada Target
	9		Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		2	2	2	2		Tercapai

4.5.2 Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Dari tujuan 2 didapatkan bahwa terdapat 11 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 3 indikator tidak memiliki data capaian. Tersisa, 8 indikator yang keseluruhannya tidak mencapai sasaran nasional.

Tabel 4.19
Capaian Tujuan 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	2	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	17%	0.28	0.23	0.14	0.35	(-) 16.65	Tidak Tercapai
2	1	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	9.50%	0	0	0.28	4.6	(-) 25.4	Tidak Tercapai
	2		Prevalensi stunting (pendek dan	28%%	0	0	0.28	4.2	(-) 25.8	Tidak Tercapai

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
		bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta							
	3		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe		0.93	-0.7	0.4	2.5	Tidak dapat ditentukan	Tidak Tercapai
	4		prevalensi anemia pada ibu hamil	28%	0.28	0.22	0.14	0.39	(-) 27.61	Tidak Tercapai
	5		Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	50%	n/a	n/a	n/a	6.79	(-) 44%	Tidak Tercapai
	6		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 92,5 kg dan konsumsi ikan 54,5 kg	n/a	n/a	n/a	84.2 kg		Tidak Tercapai
4	1	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ditetapkan	0	0	0	0	(-) 1	Tidak Tercapai

4.5.3 Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Dari tujuan 3 didapatkan bahwa terdapat 32 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 4 indikator tidak memiliki data capaian. Selain itu, 27 indikator belum mencapai sasaran nasional. Tersisa, 7 indikator yang mencapai sasaran nasional. Sasaran tersebut adalah Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita, Jumlah penyalahguna narkoba dan alkohol yang menerima rehab, prevalensi penggunaan narkoba, prevalensi penggunaan CPR, dan prevalensi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang secara modern.

Tabel 4.20
Capaian Tujuan 3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1	pada tahun 2030 mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	22	13	13	7	(+) 299	Tercapai
2	1	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan	Angka Kematian Balita (AKBa) per 10000 kelahiran hidup	24	9	3	3	0	(+) 24	Tercapai
	2		Angka Kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		70	45	25	31	?	Tidak Tercapai
	3		Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		10	3	3	1	?	Tidak Tercapai
	4	Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka kematian balita 25 per 100	Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	0.95	87.48	86.95	91.37	92.54	(-) 3%	Tidak Tercapai
5	2	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	85	0	0	0	0	(+) 85	Tercapai
	3		jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		0	0	0	0	?	Belum Ada Target
	4		jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	2010	0	0	20	7	?	Belum Ada Target
	6		prevalensi penyalahgunaan narkoba	0.0002	0	0	0	0		Tercapai
	7		konsumsi alkohol oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir		3	3	4	2	(+)0.00018	Tercapai
7	1	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern		126,313	127,123	130,113	123,168	?	Tercapai
	2		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0.66	68.08	68.33	69.5	68.72	(+) 2%	Tercapai

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
	3		angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang secara modern	0.235	248	249	2,557	2,584	(+) 0.2	Tercapai

4.5.4 Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua

Dari tujuan 4 didapatkan bahwa terdapat 11 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 4 indikator tidak memiliki data capaian. Selain itu, 4 indikator belum mencapai sasaran nasional. Tersisa, 1 indikator yang mencapai sasaran nasional. Sasaran tersebut adalah Presentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Tabel 4.21
Capaian Tujuan 4 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	5	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif	APK SD/MI	114.09%	99.79	112.36	112.36	111.41	(-) 3%	Tidak Tercapai
	6		APK SMP/MTs	106.94%	81.54	99.04	99.04	92.8	(-) 15%	Tidak Tercapai
	8		Rata-rata lama sekolah penduduk umur >= 15 tahun	8,8 tahun	7.85	7.92	8.28	7.9	(-) 0,9 tahun	Tidak Tercapai
2	3	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar	APK PAUD	77.20%	n/a	n/a	n/a	21.39	(-) 55%	Tidak Tercapai
4	d	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil	Presentase guru, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		n/a	n/a	n/a	45.65	?	Tercapai

4.5.5 Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Dari tujuan 5 didapatkan bahwa terdapat 8 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 4 indikator tidak memiliki data capaian. Selain itu, 2 indikator belum mencapai sasaran nasional. Tersisa, 2 indikator yang mencapai sasaran nasional. Sasaran tersebut adalah proporsi perempuan dewasa yang mengalami kekerasan oleh pasangan serta proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Tabel 4.22
Capaian Tujuan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
2	1	menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	"menurun"	50	80	84	33	menurun	Tercapai
	2		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	"menurun"	27	48	43	22	menurun	Tercapai
	3		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	70%	100	100	100	75	(-) 5%	Tidak Tercapai
3	4	menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan	APK SMA/SMK/MA	91.63%	79.12	67.26	67.26	83.4	(-) 8,2%	Tidak Tercapai

4.5.6 Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak yang Berkelanjutan untuk semua

Pada tujuan 6 didapatkan bahwa terdapat 19 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 14 indikator tidak memiliki data capaian. Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional, yaitu indikator 6.1.1. terkait Kapasitas prasarana air baku, serta indikator terkait Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman yang belum didefinisikan target nasionalnya. Serta terdapat 3 indikator yang tidak mencapai sasaran nasional.

Tabel 4.23
Capaian Tujuan 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
6.1	6.1.1.	6.1 mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1. Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	-	0.66	0.69	0.65		Belum ada target
	6.1.1. (a)		6.1.1.a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	-	66.80%	68.92%	64.78%	-35.22%	Tidak Tercapai

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
	6.1.1. (b)		6.1.1.b. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/det penyediaan air baku untuk 60 pulau.					211.4	Tercapai
	6.1.1. (c)		6.1.1.c. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	-	325	404	330	-90.22%	Tidak Tercapai
6.2.	6.2.1. (b)	6.2. Mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	64.65% (2013)	-	-	-	35.35%	Tidak Tercapai

4.5.7 Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Pada tujuan 8 didapatkan bahwa terdapat 11 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 4 indikator tidak memiliki data capaian. Terdapat 5 indikator yang terus meningkat namun yang belum didefinisikan target nasionalnya, yaitu indikator terkait Laju pertumbuhan PDB per kapita, PDB per kapita, Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian, Upah rata-rata per jam pekerja. (UMR), dan indikator terkait Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Sementara itu terdapat 2 indikator yang belum mencapai sasaran nasional yaitu indikator terkait Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun dan Persentase tenaga kerja formal.

Tabel 4.24
Capaian Tujuan 8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
8.1	8.1.1*	8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi	8.1.1. * Laju pertumbuhan PDB per kapita.	*target belum ada di perpres	4.01%	4.11%	4.01%	4.15%	-	Belum ada target

No. Tar get	No. indi kator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
	8.1.1. (a)	nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.a. PDRB per kapita.	> lebih dari Rp 50 juta	23,013,524.29	24,000,361.65	25,003,534.61	26,085,037.98		Tidak Tercapai
8.2	8.2.1*	8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1. * Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	meningkat	28.20%	16.53%	6.43%	5.41%		Tidak Tercapai
8.3	8.3.1. (a)	8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.a. Persentase tenaga kerja formal.	51%	51.00%	46.10%	47.13%	48.67%	-2.33%	Tidak Tercapai
	8.3.1. (b)		8.3.1.b. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	*target belum ada di perpres	49.00%	53.90%	52.87%	51.33%	-	Belum ada target
8.5	8.5.1*	8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1. * Upah rata-rata per jam pekerja. (UMR)	*target belum ada di perpres	1,575,000	1,762,500	1,965,200	2,127,375		Belum ada target
	8.5.2*		8.5.2. * Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	*target belum ada di perpres	6.60%	8.02%		3.57%		Belum ada target

4.5.8 Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Pada tujuan 9 didapatkan bahwa terdapat 8 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Terdapat 2 indikator yang telah mencapai target nasional, yaitu indikator 9.1.2.(c) terkait Jumlah pelabuhan strategis karena tidak terdapat target pelabuhan strategis nasional di Kabupaten Langkat, serta indikator terkait Jumlah dermaga penyeberangan yang belum didefinisikan target nasionalnya. Sementara itu terdapat 2 indikator yang belum mencapai sasaran nasional yaitu indikator terkait Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur dan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Tabel 4.25
Capaian Tujuan 9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
9.1	9.1.2. (b)	9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.b. Jumlah dermaga penyeberangan.	275	-	-	-	11		Belum ada target
	9.1.2. (c)		9.1.2.c. Jumlah pelabuhan strategis.	24	0	0	0	0		Tercapai (tidak ada target pelabuhan strategis nasional di Langkat)
9.2	9.2.1*	9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1. *Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.60%	14.94%	15.31%	15.45%	16.24%	-5.36%	Tidak Tercapai
	9.2.1. (a)		9.2.1.a. Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	8.60%	4.71%	4.91%	5.09%	3.49%	-5.11%	Tidak Tercapai
	9.2.2*		9.2.2. *Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	*target belum ada di perpres	0.08	0.06	-	0.09		Belum ada target

4.5.9 Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Pada tujuan 10 didapatkan bahwa terdapat 8 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 6 indikator tidak memiliki data capaian. Terdapat 2 indikator yang belum mencapai sasaran nasional yaitu indikator terkait Koefisien Gini dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.

Tabel 4.26
Capaian Tujuan 10 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
10.1	10.1.1*	10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1. * Koefisien Gini.	0.36	5.81 (2013)	-	-	-	-0.22	Tidak Tercapai
	10.1.1.(a)		10.1.1.a. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	9.99%	11.30%	11.36%	11.15%	-3.15%	Tidak Tercapai

4.5.10 Tujuan 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Pada tujuan 11 didapatkan bahwa terdapat 8 indikator yang dipilih untuk dianalisis capaian indikator tersebut. Berdasarkan analisis didapatkan 3 indikator tidak memiliki data capaian. Terdapat 2 indikator yang belum mencapai sasaran nasional yaitu indikator terkait Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Serta terdapat 1 indikator yang telah mencapai target nasional, yaitu indikator terkait Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah, serta indikator terkait Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau; dan indikator Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 yang belum didefinisikan target nasionalnya.

Tabel 4.27
Capaian Tujuan 11 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
11.1	11.1.1.(a)	11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta	-	-	-	86.99%		Target belum rinci
11.5	11.5.1*	11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1. * Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	*target belum ada di perpres	0	0	0	0		Belum Ada Target
	11.5.1.(a)	mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.a. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun hingga 30%	155	155	155	155	-108.5	Tidak Tercapai
	11.5.1.(c)		11.5.1.c. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	0	0	0	0	1	Tidak Tercapai

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
11.b	11.b.2*	11.b. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2. * Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	*target belum ada di perpres	2	2	2	2	2	Tercapai

4.5.11 Tujuan 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Satu-satunya indikator yang memiliki data adalah indikator timbulan sampah yang didaur ulang, dan indikator ini pun satu-satunya indikator yang terpilih. Data yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah yang didaur ulang di tahun 2017 masih terpaut 9 ton di bawah target yang sebesar 20 ton per hari. Dengan demikian, indikator ini belum terpenuhi.

Tabel 4.28
Capaian Tujuan 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
5	1a	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari	-	-	-	11	9	Tidak tercapai

4.5.12 Tujuan 13: Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Dua indikator yang terpilih dari tujuan ini belum ada yang tercapai. Kabupaten Langkat diketahui belum memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB). Dari data BPS mengenai jumlah korban yang terdampak bencana, kecenderungan selama lima tahun juga tidak memperlihatkan adanya penurunan.

Tabel 4.29
Capaian Tujuan 13 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1*	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	terdapat strategi pengurangan risiko bencana hingga tahun 2019 sehingga indeks risiko bencana daerah berkurang	2	2	2	2	0	Tercapai
	2*		Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	1	1	2427	3526		Tidak Tercapai

4.5.13 Tujuan 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Dalam tujuan ini tidak ada indikator yang isunya sesuai dengan isu pembangunan dalam RPJMD kabupaten Langkat. Oleh karena itu, tidak ada indikator yang terpilih dalam tujuan ini dan dengan demikian tidak ada indikator yang dianalisis dalam tujuan ini.

Tabel 4.30
Capaian Tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1a	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	peningkatan tutupan lahan hutan	-	-	-	36%		
3	1a	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	*sasaran nasional tidak sesuai dengan indikator 5,5 juta hektar	-	-	-	69.862 hektar	>5 juta hektar	Tercapai
9	1a	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	0	0	0	0	1 dokumen	Tidak Tercapai

4.5.14 Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan

Terdapat dua indikator yang memiliki data dari kesebelas indikator terpilih tersebut: proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dan proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. Kedua indikator tersebut tercatat mencapai sasaran masing-masing. Angka proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan tercatat mengalami penurunan sepanjang tahun 2013 hingga 2017. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas dua ratus sehingga masih perlu diturunkan. Di samping itu, dari data yang terdapat di tahun 2013 dan 2017, proporsi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran yang disetujui mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan mencapai target.

Tabel 4.31
Capaian Tujuan 16 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1a	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	7	9	8	3	-	Tercapai
	3a		Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	308	280	278	236	236	Tercapai
6	1*	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	-	-	-	93.32%	-	Tercapai (meningkat dari 2013-2017)
7	1a	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat dari 16,6% pada 2014	-	-	-	6.38%	kurang 10%	Tidak Tercapai
	1b		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	5.88%	5.88%	5.88%	14.29%	kurang 2%	Tidak Tercapai
9	1b	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0.85	0.7651	0.7934	0.8048	0.8054	0.05	Tidak Tercapai

4.5.15 Tujuan 17: Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat lima indikator yang datanya tersedia, di antaranya tiga indikator pada target kesatu dan dua indikator terkait BPS yang berada pada target kedelapan belas, tepatnya indikator persentase konsumen BPS yang merasa puas dengan kualitas data statistik, dan target kesembilan belas, tepatnya indikator persentase konsumen BPS yang puas dengan akses data BPS. Untuk tiga indikator pertama hanya dua indikator yang diketahui mencapai target, di antaranya indikator proporsi pendapatan pemerintah terhadap PDRB dan proporsi anggaran domestik yang juga dibiayai pajak domestik. Kedua indikator tersebut mengalami peningkatan yang sesuai dengan sasaran masing-masing indikatornya.

BPS kabupaten Langkat telah melakukan survei kepuasan terhadap pengunjung situs BPS yang datanya tersedia untuk tahun 2015 dan 2016. Angka dua tahun tersebut menunjukkan peningkatan. Karena dua indikator tersebut sangat spesifik dan nuansa “kepuasan terhadap pelayanan BPS”-nya sangat kental maka diusulkan kedua indikator tersebut menggunakan data yang sama dari angka kepuasan pengunjung hasil survei BPS tersebut dan sasarannya adalah “meningkat”.

Tabel 4.32
Capaian Tujuan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No. Target	No. indikator	Target	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Capaian Daerah				Gap Existing	Simpulan
					2014	2015	2016	2017		
1	1*	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat				6.24%	-	Tercapai
	1a		Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	>12% per tahun				0.15%	11.85%	Tidak Tercapai
	2*		Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat				2.45%	-	Tercapai
18	1a	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	-	82.27	87.29	-	-	Tercapai (Meningkat)
19	2d	Pada tahun 2030, mengadopsi inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	*target tidak ada di perpres	-	82.27	87.29	-	-	Tercapai (Meningkat)

BAB 5 PENYUSUNAN ALTERNATIF PROYEKSI

5.1 PENGGOLONGAN SKENARIO

Setelah dilakukan penapisan berdasarkan wewenang, capaian indikator, beserta relevansi terhadap isu RPJMD. Indikator terpilih diproyeksikan untuk melihat ketercapaiannya pada tahun terakhir RPJMD. Selain itu, masing-masing indikator berdasarkan pedoman pelaksanaan KLHS, dilakukan analisis sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Analisis ini menggunakan basis pada peta Jasa Ekosistem.

Setelah dianalisis masing-masing indikator akan dibagi sesuai skenario tertentu. Penggolongan skenario didasarkan pada kondisi-kondisi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kriteria Pemilihan Skenario

Keterangan Indikator	Skenario	Keterangan	Rekomendasi Proyeksi
Tidak dipengaruhi DDDTLH	1.1	Mencapai sasaran/target	Tanpa upaya
	1.2	Tidak mencapai sasaran/target	Dengan upaya
	1.3	Perlu Pengumpulan Data	Penyediaan data
Dipengaruhi DDDTLH	2.1	DDDT Memenuhi/ Mencapai sasaran	Tanpa upaya
	2.2	DDDT Memenuhi/ Tidak mencapai sasaran	Dengan upaya
	2.3	DDDT Tidak memenuhi/ Mencapai sasaran	Dengan upaya
	2.4	DDDT Tidak memenuhi/ Tidak mencapai sasaran	Dengan upaya
	2.5	Perlu Pengumpulan Data	Penyediaan data

Sumber: Bahan Paparan KLHS RPJMD Kementerian Dalam Negeri, 2018 dengan Penyesuaian

Skenario tersebut dibagi pada dua macam indikator. Indikator yang berkaitan dengan Daya Dukung dan Daya Tampung, serta indikator yang tidak terpengaruh. Pada masing-masing indikator tersebut terbagi beberapa skenario. Pada indikator yang tidak terpengaruh oleh DDDTLH skenario yang dipertimbangkan adalah tercapai atau tidaknya target TPB tersebut. Sedangkan pada indikator DDDTLH selain melihat ketercapaian indikator TPB, kondisi DDDTLH juga dipertimbangkan apakah dapat memenuhi atau tidak.

Pada masing-masing skenario tersebut diberikan metode proyeksi yang sesuai masing-masing terdapat proyeksi tanpa upaya apabila kondisi DDDT dan indikator TPB mencapai sasaran. Sedangkan upaya dibutuhkan apabila DDDT dan target TPB tidak terpenuhi. Komponen lainnya apabila indikator TPB dan DDDT LH tidak memiliki data maka direkomendasikan untuk menyediakan data.

Pada bagian sebelumnya sudah dilakukan analisis capaian target TPB dan analisis DDDTLH beserta penapisan isu. Dari keseluruhan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Langkat didapatkan 156 indikator yang terpilih dari hasil penapisan. Keseluruhan indikator terpilih kemudian dibagi menjadi 8 skenario. Pada skenario indikator yang hanya dipengaruhi capaian TPB indikator pada skenario 1.1 (indikator TPB yang tercapai) didapatkan

38 indikator. Sedangkan pada indikator 1.2 yang menunjukkan tidak tercapainya indikator TPB tersebut terdapat 32 indikator. Sementara pada skenario 1.3 sejumlah 52 indikator membutuhkan pengumpulan data.

Kriteria indikator TPB selanjutnya adalah indikator yang dipengaruhi analisis DDDTLH. Indikator yang terpengaruh tersebut berjumlah 34 indikator. Setelah proses analisis didapatkan bahwa terdapat sebanyak 3 indikator yang tergolong pada skenario 2.1, yaitu indikator yang mencapai DDDT dan juga memenuhi indikator TPB. Pada skenario 2.2, indikator yang mencapai DDDT namun indikator TPB tidak mencapai sasaran didapatkan 3 indikator. Sedangkan pada skenario 2.3 indikator TPB tidak mencapai sasaran didapatkan 4 indikator. Sementara itu terdapat 6 indikator yang tergolong pada skenario 2.4, dimana kondisi DDDT Tidak memenuhi serta sasaran TPB juga tidak tercapai. Terakhir terdapat 18 indikator yang terpengaruh DDDTLH lainnya membutuhkan pengumpulan data lebih lanjut.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penggolongan Skenario Indikator TPB Kabupaten Langkat

Nomor Tujuan	Skenario Indikator TPB			Skenario Indikator DDDTLH					Total Jumlah Indikator Tujuan	Total Jumlah Indikator Dipilih
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5		
1	8	6	0	1	0	0	0	1	33	16
2	0	7	0	0	0	1	0	3	19	11
3	13	1	5	0	0	0	0	0	51	19
4	2	3	3	0	0	0	0	0	23	8
5	3	1	4	0	0	0	0	0	20	8
6	1	0	3	1	2	0	1	11	40	19
7	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
8	5	2	4	0	0	0	0	0	28	11
9	2	2	4	0	0	0	0	0	22	8
10	0	2	6	0	0	0	0	0	23	8
11	1	0	0	0	0	2	2	3	33	8
12	0	0	3	0	0	0	1	0	19	4
13	0	0	0	0	0	1	1	0	8	2
14	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
15	0	0	0	1	1	0	1	0	25	3
16	1	5	12	0	0	0	0	0	52	18
17	2	3	8	0	0	0	0	0	47	13
TOTAL	38	32	52	3	3	4	6	18	467	156

Sumber: Hasil Analisis, 2018

5.2 SKENARIO INDIKATOR TIDAK DIPENGARUHI DDDTLH

Pada bagian ini akan dibahas mengenai indikator yang tidak dipengaruhi analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup. Indikator ini terbagi menjadi 3 macam skenario. Skenario pertama menunjukkan ketercapaian sasaran nasional terhadap indikator terkait. Skenario kedua, menunjukkan tidak tercapainya sasaran nasional. Skenario ketiga apabila tidak ditemukan data terkait.

5.2.1 Skenario 1.1: Indikator TPB Mencapai Sasaran

Terdapat 38 indikator yang termasuk ke dalam skenario ini, yakni yang mencapai target nasional. Keempat belas skenario tersebar ke dalam tujuh tujuan, yakni di antaranya tujuan ke-1, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-8, ke-9, ke-11, ke-16, dan ke-17. Indikator-indikator yang termasuk ke dalam skenario ini tidak memerlukan perhatian khusus dalam perumusan kebijakan.

Tabel 5.3
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.1

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
1	4	2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	0.7	126.15	Tercapai	
1	4	3	presentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	0.63	94.58	Tercapai	
1	4	4	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	0.65	70385	Tercapai	
1	4	7	presentase rumah tangga kumuh perkotaan	18.60%	0.0001	Tercapai	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai kawasan pemukiman kumuh
1	4	8	APM SD	94.78%	113.03	Tercapai	
1	4	9	APM SMP	82.20%	91.755	Tercapai	
1	5	3	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial			Belum Ada Target Daerah	Menetapkan target daerah terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial
1	5	9	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		2	Tercapai	
3	1	1	Angka Kematian Ibu (AKI)	306	-6.5	Tercapai	
3	2	1	Angka Kematian Balita (AKBa) per 10000 kelahiran hidup	24	-12	Tercapai	
3	2	2	Angka Kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup		-36.5	Tercapai	
3	2	3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		-18.5	Tercapai	
3	5	2	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis	85	0	Tercapai	
3	5	3	jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi		0	Tercapai	
3	5	4	jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	2010	0	Tercapai	
3	5	5	jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	85	0	Tercapai	
3	5	6	prevalensi penyalahgunaan narkoba	0.0002	-14	Tercapai	
3	5	7	konsumsi alkohol oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir			Tercapai	
3	7	1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern		121419	Tercapai	
3	7	2	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	0.66	70385	Tercapai	
3	7	3	angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang secara modern	0.235	2737	Tercapai	
4	1	6	APK SMP/MTs	1.0694	109.75	Tercapai	
4	4	d	Presentase guru, TK, SD, SMP, SMA,			Tercapai	

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
			SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik				
5	2	1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	"menurun"	27	Tercapai	
5	2	2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	"menurun"	13.25	Tercapai	
5	3	4	APK SMA/SMK/MA	0.9163	95.94	Tercapai	
6	1	1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	0.62	Belum Target	Ada Menetapkan target daerah terkait Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan melakukan program penyediaan sistem pengelolaan air minum yang menjangkau lebih banyak masyarakat
8	1	1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	*target belum ada di perpres	8.43%	Belum target	ada Menetapkan target daerah terkait Laju pertumbuhan PDB per kapita.
8	1	1a	PDB per kapita.	> lebih dari Rp 50 juta	38,521,189.78	Belum target	ada Menetapkan target daerah terkait PDB per kapita.
8	3	1b	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	*target belum ada di perpres	51.71%	Belum target	ada Menetapkan target daerah terkait Persentase tenaga kerja formal.
8	5	1*	Upah rata-rata per jam pekerja. (UMR)	*target belum ada di perpres	3,237,079	Belum target	ada Menetapkan target daerah terkait upah rata-rata perjam
8	5	2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	*target belum ada di perpres	6.33%	Belum target	ada Menetapkan target daerah terkait Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.
9	1	2b	Jumlah dermaga penyeberangan.	275	11	Belum target	ada
9	1	2c	Jumlah pelabuhan strategis.	24	0	Tercapai	
11	1	1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta	96,875	Target rinci	belum Menetapkan target daerah terkait rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
16	1	3a	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	< 236	Tercapai	Indikator diganti menjadi "Angka kasus kekerasan" Memastikan ketercapaian penurunan angka kekerasan
17	18	1a	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	87.64	Tercapai	Mengubah indikator menjadi "angka kepuasan pelanggan BPS" dan sasaran menjadi "Meningkat"
17	19	2d	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	*target tidak ada di perpres	87.64	Tercapai	Mengubah indikator menjadi "angka kepuasan pelanggan BPS" dan sasaran menjadi "Meningkat"

5.2.2 Skenario 1.2: Indikator TPB Tidak Mencapai Sasaran

Dalam skenario ini terdapat 32 indikator yang tersebar di tujuan ke-1 sampai ke-5, tujuan ke-8, tujuan ke-10, ke-16, dan ke-17. Indikator-indikator tersebut akan menjadi isu strategis yang merupakan landasan penentuan kebijakan lingkungan hidup strategis dalam RPJMD yang ditetapkan.

Tabel 5.4
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.2

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
1	1	1	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	7-8%	14.25	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program-program yang berfokus pada perekonomian Kabupaten Langkat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha dari penduduknya. Selain itu, program pemberdayaan perekonomian juga ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang berdiskusi keluar dari kemiskinan
1	2	1	presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan umur		12.22%	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program yang berfokus pada pekerjaan spesifik pada jenis kelamin serta jangkauan umur tertentu. Sehingga dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh
1	4	5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1	-170.64	Tidak Tercapai	Dibutuhkan pembangunan jaringan pipa distribusi air minum yang layak kepada rumah tangga
1	4	6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	95.32	Tidak Tercapai	Dibutuhkan pembangunan sanitasi yang layak kepada rumah tangga
1	4	10	APM SMA	91.63%	75.91	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penrogram untuk meningkatkan awareness terhadap penduduk. Serta kebijakan yang membantu memudahkan masyarakat menjadi penduduk SMA
1	4	11	Presentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta	77.40%	68.34	Tidak Tercapai	Dibutuhkan peningkatan kinerja dari dinas terkait agar lebih fokus
2	2	1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.095	1.22	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penyuluhan dan pencerdasan rutin terkait stunting pada ibu/anak
2	2	2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%%	10.92	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penyuluhan dan pencerdasan rutin terkait stunting pada ibu/anak
2	2	3	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe		6295	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program untuk memastikan kecukupan gizi pada anak balita. Dapat berupa penyuluhan langsung atau pemberian paket gizi terhadap keluarga kurang mampu
2	2	4	prevalensi anemia pada ibu hamil	0.28	375	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penyuluhan rutin terkait kondisi ibu hamil
2	2	5	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	0.5	6.79	Tidak Tercapai	Dibutuhkan pemantauan rutin terhadap bayi usia kurang dari enam bulan yang mendapat asi eksklusif
2	2	6	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor	PPH 92,5 kg dan konsumsi ikan	84.2 kg	Tidak Tercapai	Dibutuhkan sosialisasi dan peningkatan pemahaman

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
			Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	54,5 kg			masyarakat terkait pola pangan harapan dan konsumsi ikan
2	4	1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ditetapkan	0	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penetapan LP2B mengenai kawasan pertanian berkelanjutan
3	2	4	Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	0.95	94.61	Tidak Tercapai	Dibutuhkan usaha penyuluhan rutin mengenai imunisasi
4	1	5	APK SD/MI	1.1409	108845	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program yang berfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menyekolahkan anaknya pada tingkat dasar
4	1	8	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >= 15 tahun	8,8 tahun	6.55	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program yang berfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menyekolahkan anaknya pada tingkat SMA
4	2	3	APK PAUD	0.772	21.39	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program yang berfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menyekolahkan anaknya pada tingkat dasar
5	2	3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0.7	63.75	Tidak Tercapai	Dibutuhkan penyuluhan mengenai pelayanan dan pertolongan yang dapat didapat para korban kekerasan
8	2	1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	meningkat	-27.96%	Tidak Tercapai	Meningkatkan program-program kesejahteraan tenaga kerja
8	3	1a	Persentase tenaga kerja formal.	0.51	48.30%	Tidak Tercapai	Meningkatkan program pelatihan untuk penyiapan angkatan kerja di bidang formal
9	2	1*	tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.60%	18.94%	Tidak Tercapai	meningkatkan pendapatan daerah dari sektor manufaktur melalui program-program pemberdayaan industri
9	2	2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	*target belum ada di perpres	0.135	Belum ada target	Menetapkan target daerah terkait Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.
10	1	1*	Koefisien Gini.	0.36	5.81	Tidak Tercapai	Meningkatkan program-program yang berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat
10	1	1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	12.22%	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program yang berfokus pada pekerjaan spesifik pada jenis kelamin serta jangkauan umur tertentu. Sehingga dapat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh
16	1	1a	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun		Tidak Tercapai	Merancang program yang dapat menurunkan angka pembunuhan
16	6	1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator		Tidak Tercapai	Mengupayakan peningkatan proporsi realisasi pengeluaran terhadap anggarannya
16	7	1a	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat dari 16,6% pada 2014		Tidak Tercapai	Meningkatkan jumlah anggota legislatif perempuan

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
16	7	1b	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).		Tidak Tercapai	Meningkatkan persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam lembaga eksekutif
16	9	1b	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0.85		Tidak Tercapai	Mennggencarkan sosialisasi pendaftaran setiap kelahiran dan membangun sistem pelaporan kelahiran yang efisien
17	1	1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat		Tidak Tercapai	Menggencarkan penerimaan pajak daerah
17	1	1a	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	>12% per tahun		Tidak Tercapai	Menggencarkan penerimaan pajak daerah
17	1	2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat		Tidak Tercapai	Menggencarkan penerimaan pajak daerah

5.2.3 Skenario 1.3: Indikator TPB Perlu Pengumpulan Data

Skenario inilah yang paling banyak memuat indikator. Ada 52 indikator yang belum memiliki data sehingga tidak dapat ditentukan ketercapaiannya. Tiga urutan yang memiliki indikator terbanyak dalam skenario ini adalah tujuan ke-16 (dua belas indikator), ke-17 (delapan indikator), ke-10 (enam indikator). Indikator-indikator yang belum memiliki data tersebut disarankan untuk dilakukan pengumpulan data sesuai atau menggunakan data proxy yang terkait dengan indikator tersebut. Sehingga untuk perencanaan daerah selanjutnya telah dapat diketahui kondisi masing-masing indikator.

Tabel 5.5
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 1.3

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Rekomendasi
3	7	4	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun	38	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai kelahiran pada perempuan berdasarkan umur
3	7	5	Total fertility rate (TFR)	2.28	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai kelahiran pada perempuan berdasarkan umur
3	8	2	Unmeet Need pelayanan kesehatan	0.0991	Dibutuhkan pengumpulan data terkait kawasan/daerah pada Langkat yang tidak dilayani pelayanan kesehatan
3	8	3	jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk		Dibutuhkan pengumpulan data mengenai penduduk dengan asuransi kesehatan
3	8	4	cakupan jaminan kesehatan nasional	0.95	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai penduduk dengan asuransi kesehatan
4	1	1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika		Dibutuhkan pengumpulan data mengenai siswa SD, SMP, SMA yang mencapai standar minimum membaca dan matematika

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Rekomendasi
4	1	2	Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	0.842	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai SD/MI yang berakreditasi minimal B
4	3	1	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 ahun terakhir menurut jenis kelamin		Dibutuhkan pengumpulan data mengenai tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal
5	6	1	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi		Dibutuhkan pengumpulan data mengenai perempuan usia 15-49 yang menyadari pentingnya kesadaran dalam hubungan seksual, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi
5	6	2	unmeet need KB	0.099	Dibutuhkan pengumpulan data terkait jangauan pelayanan KB dalam Kab. Langkat
5	6	3	pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	0.85	Dibutuhkan data mengenai pemahaman PUS terhadap metode kontrasepsi
5	6	4	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	Tersedianya regulasi	Dibutuhkan data mengenai UU atau PP yang menjamin perempuan mendapat pelayanan dan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi
6	2	1a	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
6	3	1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Menghimpun data terkait limbah cair yang diolah secara aman.
6	5	1c	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	stasiun di 8 Wilayah Sungai	Menghimpun data terkait Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
8	3	1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait Proporsi lapangan kerja informal sektor nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin.
8	3	1c	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0.25	Menghimpun data terkait akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan
8	5	2a	Tingkat setengah pengangguran.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait Tingkat setengah pengangguran
8	6	1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	MENINGKAT	Menghimpun data terkait Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)
9	2	1a	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur. (ADHK)	8.60%	meningkatkan pendapatan daerah dari sektor manufaktur melalui program-program pemberdayaan industri
9	3	1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
9	3	2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait industri kecil dengan pinjaman atau kredit
9	5	1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
10	1	1b	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten	Menghimpun data terkait Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.
10	1	1c	Jumlah desa tertinggal.	berkurang sebanyak 5.000 desa	Menghimpun data terkait desa tertinggal
10	1	1d	Jumlah Desa Mandiri.	meningkat 2.000 desa	Menghimpun data terkait Desa Mandiri.
10	1	1e	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.
10	1	1f	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	0.14	Menghimpun data terkait Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.
10	2	1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang	*target belum ada di perpres	Menghimpun data terkait penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Rekomendasi
			difabilitas.		difabilitas.
12	4	2a	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	
12	6	1a	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Menghimpun data jumlah perusahaan yang menerapkan ISO 14001
12	7	1a	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Menghimpun data jumlah produk ramah lingkungan yang teregister
16	2	1a	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	-Mengganti indikator dengan jumlah anak yang mengalami hukuman fisik -Menghimpun data terkait
16	2	1b	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	Menghimpun data jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kekerasan secara umum
16	2	3a	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	Menghimpun data jumlah anak laki-laki dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual
16	5	1a	Indeks Pelaku Anti Korupsi (IPAK) *diganti menjadi jumlah kasus korupsi dalam 1 tahun	4 *diganti jadi 0	Melaksanakan penelitian mengenai IPAK
16	6	1a	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	kabupaten: 60%	Mengumpulkan jumlah pemeriksaan setiap tahun dengan jumlah hasil WTP
16	6	1b	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	kabupaten: 50%	mengumpulkan data hasil SAKIP tahun 2013-2017
16	6	1c	Persentase penggunaan Eprocurement terhadap belanja pengadaan.	kabupaten: 80%	Mengumpulkan data pengadaan dan mencatat mana pengadaan yang menggunakan e-procurement
16	6	1d	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	kabupaten: 45%	Menghimpun nilai indeks reformasi birokrasi instansi pemerintahan di kabupaten Langkat
16	6	2a	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	kabupaten: 80%	Menghimpun data kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik di kabupaten Langkat
16	9	1*	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	0.774	Menghimpun kepemilikan data registrasi kematian dan kelahiran di setiap kecamatan/kelurahan (untuk indikator 17.19.2b juga)
16	9	1a	Persentase kepemilikan akta lahir untuk	*tidak ditemukan sasaran nasional yang	Menghimpun kepemilikan data registrasi kematian dan kelahiran di setiap

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Rekomendasi
			penduduk 40% berpendapatan bawah	sesuai dengan indikator	kecamatan/kelurahan (untuk indikator 17.19.2b juga)
16	10	2c	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Menghimpun data jumlah kepemilikan sertifikat PPID
17	6	2b	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	-perkotaan (20 megabyte/detik) menjangkau 71% rumah tangga atau 30% populasi -perdesaan (10 megabyte/detik) menjangkau 49% rumah tangga atau 6% populasi	Menghimpun data tingkat penetrasi akses tetap pita lebar di perkotaan dan perdesaan
17	6	2c	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	dengan kecepatan 1 megabyte/detik menjangkau - perkotaan 100% populasi - perdesaan 52% populasi	Menghimpun data jumlah penduduk yang terlayani mobile broadband
17	8	1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Menghimpun data pengguna internet di kabupaten Langkat
17	17	1a	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Mengumpulkan data terkait jumlah proyek yang dilaksanakan dengan skema KPBU
17	18	1b	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Menanyakan apakah sumber data dari BPS dijadikan sebagai sumber data utama kepada seluruh responden survei kepuasan BPS
17	18	1c	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan target	Menghimpun data jumlah metadata kegiatan statistik dalam SIRuSa.
17	19	2b	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	*target tidak ada di perpres	Menghimpun kepemilikan data registrasi kematian dan kelahiran di setiap kecamatan/kelurahan Mengubah sasaran menjadi "tersedia"
17	19	2c	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	*target tidak ada di perpres	Mengadakan survei ke pengunjung website BPS

5.3 SKENARIO INDIKATOR DIPENGARUHI DDDTLH

Pada bagian ini akan dibahas mengenai proyeksi pembangunan pada indikator-indikator yang dipengaruhi oleh Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup. Indikator yang dibahas dalam bagian ini terdapat 34 macam. Setelah proses analisis didapatkan bahwa terdapat sebanyak 3 indikator yang tergolong pada skenario 2.1, yaitu indikator yang mencapai DDDT dan juga memenuhi indikator TPB. Pada skenario 2.2, indikator yang mencapai DDDT namun indikator TPB tidak mencapai sasaran didapatkan 3 indikator. Sedangkan pada skenario 2.3 indikator TPB tidak mencapai sasaran didapatkan 4 indikator. Sementara itu terdapat 6 indikator yang tergolong pada skenario 2.4, dimana kondisi DDDT Tidak memenuhi serta sasaran TPB juga tidak tercapai. Terakhir terdapat 18 indikator yang terpengaruh DDDTLH lainnya membutuhkan pengumpulan data lebih lanjut.

5.3.1 Skenario 2.1: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Mencapai Sasaran

Skenario pertama, merupakan skenario dari indikator DDDTLH, yang mana kondisi DDDTLH-nya sudah mencapai batas minimal. Selain itu, analisis capaian TPB pada indikator terkait juga menunjukkan kalau sudah mencapai sasaran nasional. Pada KLHS RPJMD Langkat, ditemukan terdapat 3 indikator dari tujuan ke-1, ke-6, dan tujuan ke 15 yang tergolong pada skenario 2.1. Indikator tersebut adalah Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. Sementara indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; dan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan terdapat data yang menunjukkan nilai positif, namun sasaran nasional belum didefinisikan. Sehingga disarankan untuk daerah menetapkan sasaran daerah untuk indikator ini.

Tabel 5.6
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.1

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian
1	5	1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			Tercapai
6	1	1b	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	118,6 m3/det penyediaan air baku untuk 60 pulau.	360	Tercapai
15	3	1a	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	*sasaran nasional tidak sesuai dengan indikator 5,5 juta hektar		Tercapai

5.3.2 Skenario 2.2: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Tidak Mencapai Sasaran

Skenario kedua, merupakan skenario dari indikator DDDTLH, yang mana kondisi DDDTLH-nya sudah mencapai batas minimal. Selain itu, analisis capaian TPB pada indikator terkait juga menunjukkan kalau belum mencapai sasaran nasional. Pada analisis KLHS RPJMD Langkat, ditemukan terdapat 3 indikator dari tujuan ke-6 dan tujuan ke-15 yang mencapai skenario 2.2. Indikator tersebut adalah terkait dengan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan; dan Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Tabel 5.7
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.2

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
6	1	1a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	58.72%	Tidak Tercapai	mengadakan/meningkatkan program terkait pengadaan layanan sumber air minum layak baik sumber maupun jaringan distribusi
6	1	1c	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	11.94%	Tidak Tercapai	mengadakan/meningkatkan program terkait pengadaan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan baik sumber maupun jaringan distribusi
15	9	1a	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	0	Tidak Tercapai	Menyusun rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berisi rencana aksi pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat

5.3.3 Skenario 2.3: Indikator TPB Tidak Mencapai DDDTLH dan Mencapai Sasaran

Skenario ketiga, merupakan skenario dari indikator DDDTLH, yang mana kondisi DDDTLH-nya belum mencapai batas minimal. Selain itu, analisis capaian TPB pada indikator terkait juga menunjukkan kalau sudah mencapai sasaran nasional. Pada analisis KLHS RPJMD Langkat, ditemukan terdapat 4 indikator dari tujuan ke-2, ke-11, dan ke-13 yang mencapai skenario 2.3. 2 indikator tersebut yaitu terkait dengan Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; dan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000, berada pada kondisi Sasaran TPB belum tercapai serta kondisi DDDTLH yang juga tidak memenuhi. Sementara itu 2 indikator lainnya yaitu terkait dengan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah; dan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah, DDDTLH belum memenuhi namun sasaran TPB telah tercapai.

Tabel 5.8
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.3

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
2	1	2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.17	7.67	Tidak Tercapai	Dibutuhkan program untuk memastikan kecukupan gizi pada anak balita. Dapat berupa penyuluhan langsung atau pemberian paket gizi terhadap keluarga kurang mampu
11	5	1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	0	Tercapai	
11	b	2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	*target belum ada di perpres	2	Tercapai	mengadakan sistem peringatan dini terkait dengan bencana prioritas di daerah
13	1	1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	terdapat strategi pengurangan risiko bencana hingga tahun 2019 sehingga indeks risiko bencana daerah berkurang	2	Tercapai	

5.3.4 Skenario 2.4: Indikator TPB Tidak Mencapai DDDTLH dan Tidak Mencapai Sasaran

Skenario keempat, merupakan skenario dari indikator DDDTLH, yang mana kondisi DDDTLH-nya belum mencapai batas minimal. Selain itu, analisis capaian TPB pada indikator terkait juga tidak mencapai sasaran nasional. Pada analisis KLHS RPJMD Langkat, ditemukan terdapat 6 indikator dari tujuan ke-6, ke-11, ke-12, ke-13 dan tujuan ke-15 yang mencapai skenario 2.4. Indikator tersebut adalah terkait dengan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak; Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan; Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang; dan Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Tabel 5.9
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.4

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
6	2	1b	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	64.65%	Tidak Tercapai	Melengkapi kebutuhan dari hingga tahun terakhir, menetapkan target daerah terkait sanitasi penduduk dan melaksanakan program penyuluhan terkait sanitasi layak
11	5	1a	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun hingga 30%	155	Tidak Tercapai	Meningkatkan program pengurangan risiko bencana, menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Proyeksi Tahun 2023	Ketercapaian	Rekomendasi
11	5	1c	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	*target belum ada di perpres	0	Tidak Tercapai	mengadakan sistem peringatan dini terkait dengan bencana prioritas di daerah
12	5	1a	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari	11	Tidak Tercapai	Meningkatkan jumlah infrastruktur pengelolaan timbulan sampah
13	1	2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	3526	Tidak Tercapai	Menyusun dokumen pengurangan risiko bencana dan melaksanakan kebijakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana - mendata kawasan rawan banjir dan melakukan intervensi penataan ruang di kawasan tersebut
15	1	1a	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	peningkatan tutupan lahan hutan	-	Tidak Tercapai	Melakukan pengawasan pemanfaatan lahan hutan untuk mencegah deforestasi yang berkelanjutan

5.3.5 Skenario 2.5: Indikator TPB Dipengaruhi DDDTLH dan Perlu Pengumpulan Data

Skenario terakhir, merupakan skenario dari indikator yang terpengaruh DDDTLH. Namun, tidak memiliki data capaian TPB yang dapat dianalisis. Terdapat 18 indikator pada skenario ini sehingga direkomendasikan untuk keseluruhan indikator pada skenario ini untuk mengadakan pengumpulan data. Tujuan ke-6 memiliki jumlah indikator terbanyak yang terpilih untuk skenario 2.5.

Tabel 5.10
Proyeksi Tanpa Upaya Skenario 2.5

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Ketercapaian	Rekomendasi
2	1	1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Belum ada Data	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
1	5	8	jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	*target belum ada di perpres	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
2	1	1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Belum ada Data	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
2	1	3	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		Belum ada Data	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai penduduk dengan kerawanan pangan
2	1	4	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	0.085	Belum ada Data	Dibutuhkan pengumpulan data mengenai asupan kalori penduduk per kapita per hari
6	2	1c	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	45.000 desa/kelurahan	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
6	2	1d	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	*target belum ada di perpres	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
6	2	1e	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	438 kabupaten/kota.	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal
6	2	1f	Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat.	*target belum ada di perpres	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait rumah tangga yang terlayani system pengelolaan air limbah terpusat
6	3	1a	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja	409 kabupaten/kota	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan

No. Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Target Nasional	Ketercapaian	Rekomendasi
			perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).			dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
6	3	1b	Proporsi rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja.	*target belum ada di perpres	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait rumah tangga yang terlayani system pengelolaan lumpur tinja
6	3	2a	Kualitas air danau.	membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Kualitas air danau
6	3	2b	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
6	4	1b	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of wastewater in agriculture).	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.
6	5	1a	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	108 Rencana	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
6	5	1f	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 Wilayah Sungai	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
11	2	1a	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	menurun hingga 30%	Tidak Tercapai	Meningkatkan program pengurangan risiko bencana, menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana
11	5	2a	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	*target belum ada di perpres	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait kerugian ekonomi langsung akibat bencana.
11	6	1a	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	0.8	Tidak Ada Data	Menghimpun data terkait sampah perkotaan yang tertangani.

BAB 6 PERUMUSAN ISU STRATEGIS

6.1 RUMUSAN ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan analisis capaian indikator TPB didapatkan indikator-indikator yang terpilih yang tidak mencapai target nasional. Indikator yang tidak mencapai target tersebut berjumlah 45 indikator. Berdasarkan urusan konkrut pemerintah daerah, ke-45 indikator tersebut terbagi pada beberapa urusan. Urusan tersebut diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kesehatan; Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Lingkungan Hidup; Pangan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pendidikan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; dan Tenaga Kerja. Selain itu, terdapat indikator yang berkaitan dengan perekonomian yang bersifat lintas sektor, serta indikator yang berkaitan dengan urusan tata kelola pemerintahan.

Tabel 6.1
Indikator Terpilih yang Tidak Mencapai Target Nasional

Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Urusan Pemerintahan
1	4	11	Persentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta	77.40%	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	9	1b	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	0.85	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	1	2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	0.17	Kesehatan
2	2	1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	0.095	Kesehatan
2	2	2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	28%%	Kesehatan
2	2	3	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe		Kesehatan
2	2	4	prevalensi anemia pada ibu hamil	0.28	Kesehatan
2	2	5	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	0.5	Kesehatan
3	2	4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	0.95	Kesehatan
11	5	1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
11	5	1a	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	menurun hingga 30%	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
11	5	1c	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
11	b	2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	*target belum ada di perpres	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
13	1	1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	terdapat strategi pengurangan risiko bencana hingga tahun 2019 sehingga indeks risiko bencana daerah berkurang	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
13	1	2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Urusan Pemerintahan
16	1	1a	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
12	5	1a	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari	Lingkungan Hidup
15	1	1a	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	peningkatan tutupan lahan hutan	Lingkungan Hidup
15	9	1a	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Lingkungan Hidup
2	2	6	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	PPH 92,5 kg dan konsumsi ikan 54,5 kg	Pangan
2	4	1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	ditetapkan	Pangan
8	2	1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	meningkat	Pembangunan Daerah
9	2	1*	tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	21.60%	Pembangunan Daerah
10	1	1*	Koefisien Gini.	0.36	Pembangunan Daerah
5	2	3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	0.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	7	1a	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	meningkat dari 16,6% pada 2014	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	7	1b	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	4	10	APM SMA	91.63%	Pendidikan
4	1	5	APK SD/MI	1.1409	Pendidikan
4	1	8	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >= 15 tahun	8,8 tahun	Pendidikan
4	2	3	APK PAUD	0.772	Pendidikan
1	4	5	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	4	6	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	1	1a	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	1	1c	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	2	1b	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	100%	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	1	1	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	7-8%	Sosial
1	2	1	presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, menurut jenis kelamin dan umur		Sosial
10	1	1a	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	7-8%	Sosial
16	6	1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	*tidak ditemukan sasaran nasional yang sesuai dengan indikator	Tata Kelola Pemerintahan

Tujuan	No. Target	No. Indikator	Nama Indikator	Sasaran Nasional	Urusan Pemerintahan
17	1	1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Tata Kelola Pemerintahan
17	1	1a	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	>12% per tahun	Tata Kelola Pemerintahan
17	1	2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Tata Kelola Pemerintahan
8	3	1a	Persentase tenaga kerja formal.	0.51	Tenaga Kerja
9	2	2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	*target belum ada di perpres	Tenaga Kerja

Sumber: Hasil Analisis, 2018

6.1.1 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdapat 2 indikator TPB yang terkait. Indikator tersebut berupa Presentase penduduk 0-17 dengan kepemilikan akta dan Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu isu strategis pada urusan ini adalah terkait pencatatan kelahiran anak melalui dokumen akte kelahiran.

6.1.2 Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan, terdapat 7 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut diantaranya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita; Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta; Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe; prevalensi anemia pada ibu hamil; Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif; dan Presentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. Maka berdasarkan indikator tersebut, isu strategis pada urusan ini:

1. Tingginya prevalensi kekurangan gizi, malnutrisi (berat badan/tinggi badan), stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah lima tahun (balita);
2. Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil; dan
3. Rendahnya Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif

6.1.3 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan kesehatan, terdapat 4 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut diantaranya Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI); Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan; dan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. Maka berdasarkan indikator tersebut, isu strategis pada urusan ini:

1. Tingginya Indeks Risiko Bencana Daerah.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.
3. Tingginya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

6.1.4 Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan kehutanan, terdapat 3 indikator TPB yang terkait. Indikator tersebut berupa Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan dan Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, isu strategis pada urusan ini adalah proporsi tutupan lahan yang menurun serta belum adanya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dan rendahnya pengolahan sampah dinilai dari rendahnya jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.

6.1.5 Urusan Pangan

Pada urusan pangan terdapat 2 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Kualitas konsumsi pangan dan Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah rendahnya kualitas konsumsi pangan dan tingkat konsumsi ikan serta penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

6.1.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah proporsi Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II); dan Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah:

1. Proporsi rendahnya peningkatan Persentase keterwakilan perempuan di DPRD dan Lembaga eksekutif eselon II.
2. Rendahnya Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.

6.1.7 Urusan Pendidikan

Pada Urusan pendidikan terdapat 4 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah APM SMA, APK SD/MI, APK PAUD, dan Rata-rata Lama Sekolah. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah rendahnya tingkatan partisipasi belajar 9 tahun;. Serta rendahnya partisipasi dalam pendidikan tahap lanjutan.

6.1.8 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdapat 4 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan; Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak; Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan; dan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah Rendahnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum dan sanitasi yang layak aman dan berkelanjutan.

6.1.9 Urusan Sosial

Pada Urusan sosial terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah tingkat kemiskinan ekstrim dan presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah tingginya jumlah penduduk miskin.

6.1.10 Urusan Tenaga Kerja

Pada Urusan tenaga kerja terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Persentase tenaga kerja formal dan Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. Oleh karena itu, rumusan Isu strategis pada urusan ini adalah Rendahnya presentase dan proporsi tenaga kerja pada sektor formal dan tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

6.1.11 Urusan Perekonomian

Dalam urusan pembangunan daerah terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun; Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita; dan Koefisien Gini. Urusan pembangunan daerah ini dalam implementasinya akan bersifat lintas sektoral dapat berkaitan dengan urusan-urusan seperti: Pangan, Koperasi dan UMKM, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, Perindustrian.

6.1.12 Tata Kelola Pemerintahan

Pada Urusan tata kelola terdapat dua indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut adalah Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya; Rasio penerimaan pajak terhadap PDB; Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. Oleh karena itu, rumusan isu strategis urusan ini adalah rendahnya pendapatan pemerintah dan tidak seimbang anggaran domestik yang didanai oleh pajak.

6.2 RUMUSAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan analisis capaian indikator TPB didapatkan indikator-indikator yang terpilih yang tidak mencapai target nasional. Indikator yang tidak mencapai target tersebut berjumlah 45 indikator. Berdasarkan urusan konkrit pemerintah daerah, ke-45 indikator tersebut terbagi pada 17 tujuan pembangunan. 17 tujuan tersebut akan menjadi sasaran strategis pada rumusan KLHS RPJMD. Ke-17 sasaran strategis tersebut akan dibagi menjadi 12 urusan. Urusan tersebut diantaranya: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Kesehatan; Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; Lingkungan Hidup; Pangan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pendidikan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; dan Tenaga Kerja. Selain itu, terdapat indikator yang berkaitan dengan perekonomian yang bersifat lintas sektor, serta indikator yang berkaitan dengan urusan tata kelola pemerintahan.

6.2.1 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdapat 2 indikator TPB yang terkait yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 15 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

Meningkatkan kinerja dari dinas terkait catatan sipil dengan mennggencarkan sosialisasi pendaftaran setiap kelahiran dan membangun sistem pelaporan kelahiran yang efisien.

6.2.2 Urusan Kesehatan

Pada urusan kesehatan, terdapat 7 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 2 dan tujuan 3 Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Dibutuhkan program untuk memastikan kecukupan gizi pada anak balita. Dapat berupa penyuluhan langsung atau pemberian paket gizi terhadap keluarga kurang mampu.
2. Meningkatkan penyuluhan dan pencerdasan rutin terkait stunting pada ibu/anak.
3. Mengadakan dan meningkatkan program untuk memastikan kecukupan gizi pada anak balita. Dapat berupa penyuluhan langsung atau pemberian paket gizi terhadap keluarga kurang mampu.
4. Melakukan penyuluhan rutin terkait kondisi ibu hamil dan pemantauan rutin terhadap bayi usia kurang dari enam bulan yang mendapat asi eksklusif.
5. Meningkatkan upaya penyuluhan rutin mengenai imunisasi.

6.2.3 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan kesehatan, terdapat 4 indikator TPB yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 11, tujuan 13 dan tujuan 16 Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Meningkatkan program pengurangan risiko bencana, menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana
2. mengadakan sistem peringatan dini terkait dengan bencana prioritas serta cuaca dan iklim di daerah
3. Meningkatkan program upaya penurunan angka kasus kejahatan pembunuhan

6.2.4 Urusan Lingkungan Hidup

Pada urusan kehutanan, terdapat 3 indikator TPB terkait yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 12 dan tujuan 15 Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
2. Menyusun rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berisi rencana aksi pemanfaatan keanekaragaman ekosistem, jenis, dan genetika untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat serta mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
3. Meningkatkan jumlah infrastruktur dalam upaya pengelolaan timbulan sampah.

6.2.5 Urusan Pangan

Pada urusan pangan terdapat 2 indikator terkait yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 2 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Melakukan dan meningkatkan upaya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait pola pangan harapan dan konsumsi ikan
2. Mengoptimalkan penetapan LP2B mengenai kawasan pertanian berkelanjutan

6.2.6 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 2 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Dibutuhkan penyuluhan mengenai pelayanan dan pertolongan yang dapat didapat para korban kekerasan
2. Meningkatkan persentase keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif dan sebagai pengambil keputusan dalam lembaga eksekutif

6.2.7 Urusan Pendidikan

Pada Urusan pendidikan terdapat 4 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 2 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Dibutuhkan penrogram untuk meningkatkan awareness terhadap penduduk. Serta kebijakan yang membantu memudahkan masyarakat menjadi penduduk SMA
2. Dibutuhkan program yang berfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar menyekolahkan anaknya pada tingkat dasar dan SMA

6.2.8 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdapat 4 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 1 dan tujuan 6 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Mengadakan/meningkatkan program terkait pengadaan layanan sumber air minum layak baik sumber maupun jaringan distribusi.
2. Mengadakan/meningkatkan program terkait pengadaan akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan baik sumber maupun jaringan distribusi.
3. Meningkatkan distribusi air minum yang layak kepada rumah tangga seperti dengan pembangunan jaringan pipa air minum yang menyeluruh.
4. Melengkapi kebutuhan data hingga tahun terakhir, menetapkan target daerah terkait sanitasi penduduk dan melaksanakan program penyuluhan terkait sanitasi layak.
5. Meningkatkan sosialisasi mengenai pembangunan sanitasi yang layak kepada rumah tangga.

6.2.9 Urusan Sosial

Pada Urusan sosial terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 1 dan tujuan 10 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Dibutuhkan program-program yang berfokus pada perekonomian Kabupaten Langkat serta meningkatkan kemampuan berwirausaha dari penduduknya. Selain itu, program pemberdayaan perekonomian juga ditingkatkan agar lebih banyak masyarakat yang berdikari keluar dari kemiskinan.
2. Dibutuhkan program yang berfokus pada pekerjaan spesifik pada jenis kelamin serta jangkauan umur tertentu. Sehingga dpaat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.
3. Dibutuhkan program yang berfokus pada pekerjaan spesifik pada jenis kelamin serta jangkauan umur tertentu. Sehingga dpaat memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

6.2.10 Urusan Tenaga Kerja

Pada Urusan tenaga kerja terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 8 dan tujuan 9 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Meningkatkan program pelatihan untuk penyiapan angkatan kerja di bidang formal.
2. Menetapkan target daerah terkait Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

6.2.11 Urusan Perekonomian

Dalam urusan pembangunan daerah terdapat 3 indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 8, tujuan 9 dan tujuan 10 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor manufaktur melalui program-program pemberdayaan industri.
3. Meningkatkan program-program yang berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat.

6.2.12 Tata Kelola Pemerintahan

Pada Urusan tata kelola terdapat dua indikator yang belum tercapai. Indikator tersebut termasuk dalam tujuan 16 dan tujuan 17 tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu sasaran strategis pada urusan ini adalah:

1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
2. Mengupayakan peningkatan proporsi realisasi pengeluaran terhadap anggarannya.
3. Menggencarkan penerimaan pajak daerah.